

# ANALISA

1985 — 10

## KELUAR DARI KEMELUT EKONOMI



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

# ANALISA

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai terbitan berkala yang menyajikan analisa-analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh Staf CSIS. Tetapi ANALISA juga menerima tulisan-tulisan dari luar CSIS dan menyediakan honoraria bagi karangan-karangan yang dimuat. Tulisan-tulisan dalam ANALISA tidak selalu mencerminkan pandangan CSIS.

*Pemimpin Redaksi/  
Penanggung Jawab*

Pande Radja SILALAH

*Dewan Redaksi*

Daoed JOESOEF  
Rufinus LAHUR  
J. PANGLAYKIM  
A.M.W. PRANARKA  
M. Hadi SOESASTRO  
Harry TJAN SILALAH  
Jusuf WANANDI  
Clara JOEWONO  
Kirdi DIPOYUDO  
Djisman S. SIMANDJUNTAK  
J. Soedjati DJIWANDONO  
Ronald NANGOI

*Redaksi Pelaksana*

Pande Radja SILALAH  
Ronald NANGOI  
S. TJOKROWARDOJO  
Medelina KUSHARWANTI

STT

SK Menpen RI No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978,  
tanggal 28 Agustus 1978

ISSN

0126-222X

*Alamat*

*Redaksi* : Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160,  
Telepon 356532, 356533, 356534, 356535  
*Tata Usaha* : Biro Publikasi CSIS, Jalan Tanah Abang III/27,  
Jakarta 10160, Telepon 356532, 356533, 356534,  
356535

# ANALISA

TAHUN XIV, NO. 10, OKTOBER 1985

PENGANTAR REDAKSI	792
PROSPEK JANGKA PENDEK EKONOMI INDONESIA <i>Djisman S. SIMANDJUNTAK</i>	795
BISNIS INDONESIA: KEADAAN SEKARANG DAN PROSPEKNYA <i>J. PANGLAYKIM</i>	802
PROSPEK PERUSAHAAN DAGANG DI INDONESIA <i>Djukardi ODANG</i>	821
SINGAPURA MENGHADAPI MASA PERALIHAN DARI PERTUMBUHAN EKONOMI PESAT KE EKONOMI LAMBAT <i>J. PANGLAYKIM</i>	834
SUMBERDAYA LAUT PERAIRAN MALUKU DAN MASALAH PENGEMBANGANNYA <i>Atjep SUWARTANA</i>	850
PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN DALAM KAITANNYA DENGAN KETAHANAN NASIONAL <i>Syachrinuddin SEMAN</i>	878



## Pengantar Redaksi

*Indonesia sampai saat ini masih dilanda kelesuan dan menurut pendapat beberapa ahli ekonomi keadaan ini masih akan terus berlangsung sesedikitnya dalam dua tahun yang akan datang jika tidak ada tindakan-tindakan khusus untuk mengatasinya. Pada tahun 1982, ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot, para pengusaha atau pelaku bisnis masih merasa optimis dan yakin bahwa perekonomian Indonesia akan bangkit dengan cepat dalam tahun-tahun berikutnya. Tetapi dalam beberapa bulan belakangan ini sikap optimis dari para pelaku bisnis telah sirna dan tampaknya mereka menjadi bersikap menunggu, tidak bergairah melakukan gebrakan agar dapat keluar dari kemelut ekonomi yang sedang dihadapi.*

*Bagaimanapun sikap menunggu dengan perasaan pesimis dalam keadaan seperti sekarang tidak menguntungkan bagi perekonomian Indonesia. Dalam kesulitan ekonomi seperti sekarang harus ditemukan jalan ke luar agar roda perekonomian dapat berjalan normal. Atas dasar pertimbangan ini ANALISA bulan Oktober ini secara khusus menyoroti masalah-masalah yang berkaitan dengan perekonomian Indonesia dengan harapan daripadanya dapat ditemukan jalan keluar dari kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi oleh Indonesia.*

*Dalam tulisan pertama yang berjudul "Prospek Jangka Pendek Ekonomi Indonesia," Djisman S. SIMANDJUNTAK mengemukakan beberapa dimensi lingkungan ekonomi internasional yang tidak menguntungkan negara berkembang seperti Indonesia. Menyadari perubahan lingkungan internasional ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah penyesuaian dan sampai tingkat-tingkat tertentu tindakan penyesuaian ini menunjukkan hasilnya. Namun berdasarkan pengkajian ternyata masih dibutuhkan beberapa langkah-langkah tertentu untuk mengatasi kelesuan ekonomi. Kebijakan yang dimaksudkan mencakup kebijakan antisiklis, industri dan perdagangan.*

Sejalan dengan tulisan pertama, J. PANGLAYKIM dalam tulisannya yang berjudul "Bisnis Indonesia: Keadaan Sekarang dan Prospeknya" mengutarakan perkembangan bisnis di Indonesia khususnya setelah terjadi kemerosotan dalam pertumbuhan ekonomi. Secara terinci penulis mengemukakan beberapa hambatan yang selama ini dihadapi oleh para pelaku bisnis. Berdasarkan pengkajian yang mendalam penulis mengemukakan bahwa walaupun secara makro gambaran ekonomi adalah baik tetapi hal ini tidak berarti kita dapat tinggal diam. Pengkajian di tingkat mikro sangat diperlukan karena tanpa pengkajian seperti ini kelanggaran pertumbuhan ekonomi akan sulit dipertahankan atau bahkan dapat menyebabkan timbulnya masalah dalam usaha pembangunan. Selanjutnya dalam uraiannya penulis mengemukakan betapa pentingnya Indonesia memiliki suatu program terinci yang harus dilaksanakan secara konsisten. Sejalan dengan ini ia menawarkan beberapa pilihan bagi Indonesia dalam usaha meningkatkan ekspor atau memasuki pasar internasional.

Salah satu faktor yang menyebabkan Indonesia mengalami kesulitan memasuki pasar internasional adalah karena Indonesia belum memiliki perusahaan dagang yang ampuh dan memadai. Dalam beberapa tahun belakangan ini semakin jelas terlihat betapa pentingnya kita mempunyai perusahaan dagang seperti "Sogo Shosha" yang dimiliki oleh Jepang atau "Chaebol" yang dimiliki Korea Selatan. Atas dasar pemikiran seperti ini Djukardi ODANG dalam tulisannya yang berjudul "Prospek Perusahaan Dagang di Indonesia" menguraikan hal yang berkaitan dengan perusahaan dagang. Berdasarkan pengetahuan mengenai fungsi perusahaan dagang, penulis menguraikan beberapa faktor baik yang positif maupun yang negatif yang mempengaruhi perkembangan perusahaan dagang di Indonesia. Berdasarkan perkiraan terhadap perkembangan ekonomi dunia, penulis mengemukakan betapa pentingnya Indonesia mempunyai perusahaan dagang yang tangguh.

Salah satu negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dalam dekade 1970-an adalah Singapura. Tetapi dengan terjadinya resesi ekonomi dunia ternyata negara ini tidak dapat mempertahankan pertumbuhan ekonominya bahkan dalam tahun 1985 ini perekonomian Singapura berada dalam keadaan yang sulit. Dalam menghadapi kesulitan ekonomi seperti sekarang, Indonesia perlu belajar lebih banyak. Sehubungan dengan ini tulisan keempat secara sengaja mengemukakan kasus Singapura dalam tulisan yang berjudul "Singapura Menghadapi Masa Peralihan dari Pertumbuhan Ekonomi Pesat ke Ekonomi Lambat." Dalam tulisan ini J. PANGLAYKIM menyoroti faktor-faktor yang menyebabkan Singapura harus beralih dari pertumbuhan yang cepat ke pertumbuhan lambat. Secara jelas penulis mengemukakan bahwa di samping faktor-faktor ekonomi, kebijakan yang tepat waktu serta sikap para pelaku ekonomi sangat menentukan bagi keberhasilan suatu negara mempertahankan pertumbuhan ekonominya.



*Dalam menghadapi kelesuan ekonomi, Indonesia sejauh mungkin harus menggali seluruh potensi yang dimilikinya. Selanjutnya karena hasil pembangunan tersebut diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, maka perlu diusahakan agar tidak terjadi pertumbuhan yang pincang antar wilayah. Sejalan dengan ini dua buah tulisan terakhir, masing-masing, "Sumber Daya Laut Perairan Maluku, dan Masalah Pengembangannya," oleh Atjep SUWARTANA dan "Pertumbuhan dan Pemerataan Dalam Kaitannya Dengan Ketahanan Nasional" oleh Syachrinuddin SEMAN, menyoroti hal yang berkaitan dengan pemanfaatan potensi yang ada dan pemerataan pembangunan. Dalam tulisannya, Atjep Suwartana, mengemukakan bahwa perairan Maluku mempunyai potensi yang mungkin untuk dikembangkan. Tetapi dalam usaha pengembangannya akan dihadapi berbagai masalah. Dalam tulisan terakhir Syachrinuddin Seman mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi berkaitan erat dengan ketahanan nasional. Dengan dasar pertimbangan seperti ini penulis mengemukakan bahwa untuk meningkatkan ketahanan nasional, pemerataan pembangunan antar wilayah perlu mendapat perhatian yang saksama.*

Oktober 1985

REDAKSI

# **Prospek Jangka Pendek Ekonomi Indonesia**

**Djisman S. SIMANDJUNTAK**

## **LINGKUNGAN INTERNASIONAL**

Dari sudut pandang neraca pembayaran dan pembelanjaan pembangunan, lingkungan ekonomi internasional adalah sangat penting bagi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi negara-negara industri dalam tahun ini dan tahun depan menurut perkiraan memang akan lebih baik dibanding tahun 1983. Tetapi ia sedang menurun dan beberapa dimensi lingkungan internasional tampak tidak menguntungkan bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Pasar bahan mentah menghadapi kelesuan struktural terutama karena perkembangan-perkembangan berikut. Pertama, kenaikan harga-harga selama 1970-an mendorong kenaikan penawaran. Penawaran minyak non-OPEC, misalnya naik dari 17 juta barrel/hari dalam tahun 1973 menjadi 40 juta barrel/hari dalam tahun 1985. Kedua, persaingan dengan bahan artifisial semakin ketat karena kepesatan teknologi bahan artifisial seperti teknologi serat silikon dan rekayasa gen. Ketiga, negara-negara sosialis sudah menjadi penawar penting dalam perdagangan bahan mentah internasional. Ekspor mereka dalam kategori ini naik dari hanya 4,4 milyar dollar dalam tahun 1970 menjadi 35,1 milyar dollar tahun 1983.

Di lain pihak, ekonomi negara-negara industri sudah semakin hemat bahan. Untuk sebagian ini terjadi karena peran barang (goods) yang menurun dan peran jasa yang naik sebagai komponen produk domestik. Sementara produksi industri Jerman Barat dibandingkan sebelumnya menurut perkiraan akan naik dengan masing-masing 4 dan 3,25% dalam tahun 1985 dan 1986, impor bahan mentahnya di luar pangan dan energi diperkirakan akan naik hanya dengan 3%. Indeks total harga-harga komoditi akan turun dengan 9% dalam tahun ini dibanding 1984, sementara untuk tahun 1986 diperkirakan kenaikan nominal yang demikian kecil hingga secara riil tetap terjadi penurunan.



Pasar minyak tentu saja adalah yang terpenting bagi Indonesia dalam perdagangan bahan mentah. Dua kendala ketat menimbulkan kekhawatiran. Permintaan akan minyak praktis tidak berubah dalam tahun 1986 dibanding 1985. Walaupun pertumbuhan ekonomi OECD diharapkan lebih dari 3%, konsumsi minyak dapat ditekan. Jika dalam tahun 1975 negara-negara OECD menggunakan satu satuan minyak untuk menghasilkan satu nilai tambah, dalam tahun 1985 hanya diperlukan 0,67. Di lain pihak, kelebihan kapasitas membesar, sementara negara-negara pengeksport seperti Saudi Arabia, Mexico dan Indonesia menghadapi tekanan defisit dalam transaksi berjalan. Untuk meraih jumlah ekspor yang sebesar-besarnya, para pengeksport terlibat dalam perang rabat. Kalau Indonesia hendak mempertahankan bagian pasarnya, harga efektif tampaknya perlu diturunkan hingga sesedikitnya 3 dollar di bawah harga OPEC.

Yang diproklamasikan sebagai pengganti minyak adalah hasil-hasil non minyak. Tetapi di sini pun dihadapi berbagai kendala. Kenyataan bahwa yang dipacu Indonesia selama ini adalah industri substitusi impor dengan kapasitas yang praktis dibatasi hanya sebesar permintaan dalam negeri, berarti bahwa Indonesia pada dasarnya belum mempunyai surplus yang dapat diekspor sepanjang menyangkut hasil-hasil industri. Tampaknya penurunan permintaan dalam negeri adalah salah satu faktor penting di balik kenaikan ekspor hasil-hasil tekstil tahun-tahun terakhir. Bersamaan dengan keterbatasan penawaran ini, proteksi cenderung memburuk di negara-negara industri seperti ditunjukkan oleh Jenkins Bill dan ratusan rancangan serupa di Kongres atau Senat Amerika Serikat yang mengancam perdagangan sepatu bukan karet, kayu, telekomunikasi, mesin dan perkakas, dan lain-lain sebagai tambahan pada korban sebelumnya yang terdiri dari baja, kendaraan bermotor dan elektronik rumah tangga.

Poros proteksionisme yang sekarang adalah pertikaian sesama negara-negara industri, khususnya antara Amerika Serikat dan Masyarakat Eropa di satu pihak dan Jepang di lain pihak. Masing-masing mempunyai alasan. Amerika Serikat misalnya dilancam oleh pembengkakan defisit transaksi berjalan dari 120 milyar dollar dalam tahun 1985 menjadi 150 milyar dollar tahun 1986. Dalam tahun 1984, bagian impor dalam permintaan domestik sudah mencapai 40% dalam industri tekstil dan pakaian, 30% dalam kayu gelondongan, 70% dalam sepatu dan 40% dalam mesin dan peralatan.

Untuk sementara, defisit seperti di atas dapat dibelanjai dengan impor modal yang sekaligus adalah juga penting dari sudut pandang fiskal. Tetapi selanjutnya, penyesuaian tidak akan dapat dihindari. Masalahnya, penyesuaian ini tampaknya tidak dapat mengandalkan peningkatan ekspor saja. Pembatasan impor akan diperlukan. Bentuknya mungkin tidak seketat



dan sediskriminatif Jenkins Bill yang menurut perkiraan akan diveto oleh Presiden Reagan. Bea masuk tambahan barangkali akan dikenakan atas impor secara non-diskriminatif dan kampanye "perdagangan jujur" akan diteruskan. Konflik perdagangan sesama negara industri akan menajam, sementara negara berkembang seperti Indonesia akan terkena getah walaupun pada dasarnya tidak ikut memakan cempedak.

Dalam lingkungan seperti di atas, impor hasil-hasil industri ke negara-negara OECD diperkirakan tumbuh jauh lebih lambat dibanding tahun 1983 dan 1984, yaitu masing-masing 9 dan 9,25% dalam tahun 1985 dan 1986 di Amerika Serikat, dan 10,25% dan 7% di Jepang. Kalau demikian, tampaknya ekspor hasil-hasil industri Indonesia akan naik jauh lebih lambat dibandingkan yang direncanakan, walaupun pemasukan gas alam cair akan menghasilkan pertumbuhan yang mendekati sasaran Pelita IV.

Ketika neraca transaksi berjalan cenderung memburuk, perhatian wajar diarahkan pada impor modal sebagai pembelanjaan kompensatoris menghadapi transaksi berjalan dan kendala devisa yang memburuk. Dalam tiga tahun yang terakhir keseimbangan neraca pembayaran Indonesia pada dasarnya hanya dapat dipelihara berkat kenaikan impor modal yang berjumlah sekitar 7 milyar dollar dalam tahun anggaran 1983/1984 dan 4,1 milyar dollar tahun 1984/1985 serta penurunan impor barang dan jasa. Untuk tahun-tahun dekat pun, Indonesia masih dapat memanfaatkan impor modal, kalau diperlukan dan dikehendaki. Meskipun masih ibarat telur di ujung tandak, sistem keuangan internasional dengan bantuan berbagai inovasi, sudah membaik dibanding tahun 1982 dan 1983. Namun demikian beberapa catatan perlu dibuat. Pertama, dengan pasar komoditi yang melesu kelayakan kredit barangkali akan turun disusul oleh perburukan dasar peminjaman. Kedua, daya serap pemerintah terbukti tidak setinggi yang dicerminkan oleh rencana. SIAP membengkak yang berarti jangka amortisasi yang lebih pendek daripada yang disetujui. Ketiga, sebagai lokasi investasi asing, Indonesia cenderung semakin kurang menarik dibanding Amerika dan Cina. Menghadapi gejala-gejala ini, Indonesia perlu lebih hati-hati dalam peminjaman dibanding tahun-tahun sebelumnya.

## HASIL PENYESUAIAN KEBIJAKAN

Menyadari perubahan lingkungan internasional, pemerintah sejak dini sudah mengambil langkah-langkah penyesuaian kebijakan, terutama yang menyangkut segi keuangan. Pembatasan-pembatasan atas lalu lintas modal internasional dihilangkan sejak awal tahun 1982 dengan harapan bahwa perburukan transaksi berjalan dapat diimbangi dengan impor modal, termasuk



yang berupa investasi asing langsung. Bersamaan dengan itu, sejumlah rangsangan seperti tingkat bunga kredit preferensial dari kredit ekspor dan imbal beli diperkenalkan untuk mendorong ekspor hasil-hasil industri. Setahun kemudian rupiah yang sebelumnya ditulari "Penyakit Belanda" didevaluasi sekaligus diambangkan. Dengan begitu, risiko penilailebihan rupiah yang merugikan ekspor barang dan impor modal jangka panjang, diperkecil. Pada pertengahan tahun 1983 sistem perbankan mendapat giliran deregulasi. Pagu kredit dicabut, tingkat bunga diambangkan dan kredit likuiditas Bank Indonesia dipersedikit. Tujuannya adalah untuk memobilisasi tabungan swasta di satu pihak dan mendorong arus sumber yang semakin terbatas ke proyek yang menjanjikan hasil tertinggi. Dalam tahun 1984 dan 1985 Undang-undang Pajak baru diberlakukan. Tujuan utamanya memang adalah peningkatan penerimaan pajak. Tetapi perubahan tersebut mengandung beberapa perubahan penting. Perkiraan hutang pajak dipercayakan pada wajib pajak, jenis-jenis pajak dikurangi dan tarif pajak disederhanakan. Itu berarti bahwa pajak semakin netral terhadap alokasi sumber-sumber. Lebih jauh, jasa-jasa pendukung perdagangan pun dideregulasi melalui Inpres 4/1985. Pemeriksaan barang yang sebelumnya sering memperlambat lalu lintas barang internasional, dipercayakan pada pemeriksa swasta, yaitu SGS. Manajemen pelabuhan dideregulasi dalam arti dialihkan dari Departemen Perhubungan kepada manajemen yang otonom. Perusahaan-perusahaan pelayaran asing, termasuk pelayaran "omprengan" (tramp shipping) yang sebelumnya tidak diizinkan melayani perairan Indonesia, diberikan akses yang lebih bebas. Tujuannya adalah peningkatan kecepatan lalu lintas barang dan penurunan biaya jasa pendukung perdagangan yang menurut dugaan dan beberapa penelitian, merupakan bagian yang besar dari biaya penanganan muatan ekspor dan impor di Indonesia. Terakhir, kredit ekspor preferensial juga disediakan bagi perusahaan asing yang memang memainkan peran yang cukup penting dalam ekspor hasil-hasil industri Indonesia.

Meskipun hubungan penyesuaian kebijakan ini dengan prestasi ekonomi masih harus diteliti, dalam kenyataan ekonomi Indonesia menunjukkan prestasi makro yang cenderung membaik dalam tahun-tahun terakhir. Stabilitas nilai intern rupiah dapat diperbaiki seperti ditunjukkan oleh tingkat inflasi yang menurun hingga di bawah 4% dalam tahun 1984/1985. Tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto membaik dari 2,2% dalam tahun 1982 menjadi masing-masing 4,2 dan 5,2% dalam tahun 1983 dan 1984. Keseimbangan neraca pembayaran dapat dipelihara, walaupun dalam tahun 1982/1983 dan 1983/1984 pemeliharaan ini berasal dari lonjakan pinjaman luar negeri, baik pemerintah maupun swasta. Yang memprihatinkan adalah neraca ketenagakerjaan, walaupun belum diketahui sejauh mana. Kalau di satu pihak elastisitas ketenagakerjaan dari PDB tidak naik dan menurut perkiraan adalah 0,32 dalam 1971-1980, sementara di lain pihak angkatan



kerja naik dengan 2,8% per tahun, maka menurut perkiraan kasar ini sebagian besar dari angkatan kerja baru tidak dapat diserap. Belum diperhitungkan pengangguran yang dibonceng dari tahun-tahun lalu dan PHK yang terjadi, terutama dalam tahun 1985 ini. Se jauh mana sektor informal dapat berperan sebagai penyelamat seperti dalam tahun 1970-an, masih merupakan pertanyaan mengingat ketergantungan ekspansi sektor informal dari ekspansi sektor formal.

Terlepas dari neraca ketenagakerjaan, indikator-indikator makro yang disebut di atas sebenarnya juga mengandung segi-segi yang memprihatinkan. Pertama, produk domestik bruto Indonesia sudah kembali lebih tergantung dari sektor pertanian. Perubahan ini memang tidak dengan sendirinya berarti kemunduran. Yang memprihatinkan adalah ketergantungan produksi pertanian dari subsidi "saprotan." Dalam tahun 1984/1985 subsidi pupuk saja sudah mencapai Rp732 milyar dan kini timbul pertanyaan se jauh mana subsidi ini masih dapat dibelanjai dan dampak produksi yang mungkin timbul kalau ia diturunkan. Kedua, produksi industri yang justru termasuk di antara yang mempunyai daya serap ketenagakerjaan yang relatif tinggi, tumbuh lebih lambat dibanding PDB, begitu juga kalau dibanding dengan sasaran Pelita IV, kecuali kalau gas alam cair dihitung sebagai produk industri. Ketiga, dalam tahun 1984, sektor konstruksi menunjukkan pertumbuhan negatif, yaitu -1,5%. Itu tidak saja berarti bahwa salah satu sektor yang relatif padat karya sedang dirundung malang, tetapi juga kemungkinan bahwa kapasitas produktif baru sedang menurun. Keempat, sektor perdagangan tumbuh dengan hanya 0,8% dalam tahun 1984 atau jauh lebih lambat dari PDB. Produksi untuk persediaan tampaknya sudah naik dengan cepat. Padahal, kenaikan seperti ini hanya dapat bersifat sementara dan tampaknya sudah terbentur batas seperti ditunjukkan oleh frekuensi PHK yang meningkat dalam dua tahun terakhir.

## PENYESUAIAN LEBIH LANJUT

Kalau diumpamakan bahwa permintaan dan harga internasional dari minyak bumi dan bahan mentah lain turun, sementara penawaran hasil-hasil industri masih terbatas serta menghadapi permintaan yang tumbuh lebih lambat dan proteksionisme yang memburuk di negara-negara maju, maka prestasi ekonomi Indonesia dalam tahun mendatang dapat turun dibanding dua tahun yang terakhir.

Defisit transaksi berjalan mungkin akan naik, walaupun masih dalam batas-batas yang dapat dibelanjai dengan pinjaman dan cadangan devisa. Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat menurun dan neraca ketenagakerjaan memburuk lebih jauh. Namun demikian, perkiraan tersebut mengumpamakan



bahwa kebijakan ekonomi tidak berubah. Pesan perkiraan menjadi lain, kalau kebijakan ekonomi dapat disesuaikan. Karena itu, bagian berikut akan menjelajah perubahan-perubahan kebijakan yang kiranya perlu dibuat.

Dalam menghadapi ancaman kelesuan, kebijakan anti siklis sering diterapkan untuk menaikkan permintaan total, baik yang berupa konsumsi maupun investasi. Peluang kebijakan seperti itu tampaknya memang masih tersedia bagi Indonesia dewasa ini. Dengan segala keterbatasan penerimaan yang dihadapi pemerintah, dampak pengeluarannya terhadap permintaan total kiranya masih dapat ditingkatkan melalui penajaman prioritas. Melalui pengurangan pos-pos tertentu dalam anggaran pembangunan seperti subsidi bagi kegiatan yang dilanda kelebihan produksi dan atau kegiatan yang tergantung pada permintaan pemerintah dengan bantuan subsidi, pengeluaran rutin kiranya masih dapat dipertahankan, kalau tidak dinaikkan. Dalam kebijakan moneter pun tampaknya peluang penurunan bunga masih tersedia mengingat tingkat inflasi yang sangat rendah. Lebih dari itu, penertiban aparatur negara, termasuk yang di lingkungan BUMN, dapat melahirkan dampak yang cukup besar terhadap permintaan total, kalau ia lebih berhasil dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, penyesuaian yang bersifat anti-siklis seperti ini belum cukup. Ia harus didukung oleh penyesuaian lain, khususnya dalam kebijakan industri dan perdagangan.

Berbeda dengan sisi keuangan yang sejak tahun 1982 mengalami perubahan-perubahan yang konsisten, kebijakan industri dan perdagangan yang praktis mewakili dua sisi dari satu mata uang, pada dasarnya belum disesuaikan, terlepas dari pencabutan ratusan izin-izin investasi yang kedaluwarsa karena tidak kunjung digunakan oleh pemegangnya. Perumusan dari dua cabang kebijakan ini pada dasarnya tidak transparan dan karena itu tidak memancarkan signal-signal yang konsisten dan diperlukan oleh peserta pasar. Titik tolak utama dari kedua kebijakan ini adalah permintaan dalam negeri. Pemberian izin investasi dan proteksi sering ditarik sedemikian sehingga kelebihan penawaran dapat dihindari. Setiap kali kapasitas dianggap sudah cukup untuk melayani permintaan dalam negeri, pemerintah cenderung menutup industri yang bersangkutan terhadap pendatang baru. Dengan demikian, produk yang dapat diekspor pada dasarnya adalah terbatas pada yang tidak dapat diserap oleh permintaan dalam negeri dan investasi modernisasi pun dihambat.

Pendekatan "kejenuhan pasar" inilah yang kiranya harus dipertanyakan kalau dari sektor swasta dan koperasi diharapkan peran "kompensatoris" ketika pemerintah menghadapi kendala pembelanjaan dan manajerial. Berapa besar pun sumber finansial yang dapat dihimpun oleh sistem perbankan, investasi akan tetap terhambat selama pendekatan yang dipakai adalah pendekatan "kejenuhan pasar," lebih-lebih kalau tingkat bunga tetap



tinggi. Memang bidang-bidang investasi baru di industri yang lebih hulu masih tersedia. Tetapi bidang-bidang ini pada umumnya dihadapkan pada permintaan yang masih sangat terbatas di samping relatif padat modal dan karena itu lebih peka terhadap tingkat bunga. Dari sudut pandang ketenagakerjaan pun perlu dipertanyakan sejauh mana sumber finansial yang terbatas layak didorong untuk memasuki secara progresif industri hulu.

Alternatif bagi pemerintah adalah kebijakan industri dan perdagangan yang semakin netral terhadap alokasi sumber-sumber yang terbatas sebagaimana diupayakan oleh kebijakan perkreditan. Netralitas seperti itu tidak dengan sendirinya bermuara pada duplikasi investasi sebagaimana sering dikhawatirkan. Selama seorang calon penanam modal tidak melihat peluang perbaikan efisiensi yang memungkinkannya mengungguli peserta pasar yang sudah ada, selama itu dia akan mengurungkan niat untuk memasuki bidang yang menurut dugaan sudah jenuh. Namun demikian, yang diharapkan memang adalah investasi modernisasi. Sebagian dari peserta lama dapat kehilangan daya saingnya kalau mereka terperangkap dalam struktur yang sudah usang.

Netralitas kebijakan industri dan perdagangan juga akan berarti bahwa sumber-sumber yang terbatas akan semakin tertarik pada lapangan-lapangan usaha yang lebih sesuai dengan karunia faktor kita, yaitu yang lebih padat karya dan yang bertumpu pada bahan-bahan mentah di mana Indonesia relatif unggul dibanding negara-negara lain. Di lain pihak, investasi-investasi yang relatif padat modal, lebih-lebih yang menghadapi permintaan yang sangat terbatas akan semakin dijauhi.

Akhirnya, netralitas kebijakan industri dan perdagangan juga akan berarti birokrasi industri dan perdagangan yang lebih kecil. Perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang kecil-kecil dan dalam kenyataan merupakan tulang punggung ketenagakerjaan, sering mengeluh betapa administrasi menghalangi perkembangan mereka. Padahal, sistem keuangan sudah mengusahakan sejauh mungkin untuk menyediakan fasilitas-fasilitas pembelanjaan seperti KIK.

Kalau penyesuaian dalam kebijakan industri dan perdagangan dapat dilakukan - pencabutan izin-izin yang tidak kunjung digunakan adalah suatu langkah yang perlu, tetapi tidak cukup - kiranya investasi sektor swasta dalam negeri dan koperasi ditambah investasi asing langsung akan dapat menggantikan penciutan investasi pemerintah. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi yang bahkan lebih tinggi dari 5% akan dapat diraih. Kalaupun dampaknya belum akan terasa sedini tahun 1986, perubahan seperti itu diperlukan sedini mungkin, antara lain untuk sedapat mungkin menghimpun dana yang diperlukan untuk menghadapi dampak kebijakan yang dibuat selama tiga tahun terakhir seperti kewajiban bunga yang meningkat.

# **Bisnis Indonesia: Keadaan Sekarang dan Prospeknya**

J. PANGLAYKIM

## **PENDAHULUAN**

Tulisan ini menyoroti aspek bisnis dari perekonomian Indonesia. Pembahasan para ekonom dapat ditemukan pada jurnal-jurnal seperti *The Indonesian Quarterly* dan *The Economic Bulletin* oleh konsultan-konsultan dan juga pada surat-surat kabar lokal dan majalah bisnis. Masyarakat media massa juga mewawancarai para pengusaha untuk memperoleh persepsi mereka mengenai ekonomi Indonesia pada umumnya dan sektor bisnis pada khususnya.

Penulis bermaksud untuk menyoroti perkembangan bisnis di Indonesia sebagai bagian dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Dengan kata lain, tulisan ini lebih merupakan pandangan seorang pengusaha daripada seorang ekonom, walaupun mungkin sekali terdapat beberapa kesamaan dalam pendekatan.

## **KEADAAN BISNIS: REFLEKSI EKONOMI NASIONAL**

Keadaan bisnis selalu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional. Kita telah melihat bahwa sejak 1968 sektor bisnis telah mengalami pasang-surut tergantung pada kemampuan ekonomi nasional untuk menggerakkan pertumbuhan dan perkembangan.

''Standing'' kredit nasional Indonesia di kalangan masyarakat perbankan internasional telah memberi keuntungan bagi kelompok-kelompok masyarakat bisnis setempat yang memiliki akses sumber-sumber keuangan ini. Mereka telah menandatangani sejumlah transaksi keuangan yang memungkinkan mereka membiayai berbagai proyek nasional, sehingga dengan demikian



mereka mampu memulai<sup>1</sup> apa yang dikenal dalam sektor Penanaman Modal Asing sebagai "package deal."

Ketika pengusaha swasta mulai beroperasi pada 1968, mereka belum berada pada posisi modal yang diperlukan untuk beratus-ratus usaha patungan dengan pengusaha Jepang. Namun demikian, selama bertahun-tahun mereka tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keahlian tetapi juga kedudukan dalam masyarakat perbankan dan bisnis internasional, dan ini telah memungkinkan mereka untuk memulai memereteli "package deal."

Jika sekarang mereka masing-masing mulai mengadakan usaha patungan, katakanlah, suatu pabrik yang menghasilkan produk industri yang tidak terlalu canggih, ia akan dapat menyediakan modal, keahlian teknis (yang bisa disewa dari luar negeri), dan manajemen, jadi membuatnya lebih independen dan akhirnya menjadi partner yang sederajat dengan partner asing. Kemampuan yang telah dikembangkan lebih daripada 20 tahun ini mencerminkan kemampuan negara untuk mengembangkan ekonomi nasionalnya.

Setelah melewati semacam masa kejayaan, di mana banyak kelompok swasta telah mendirikan sejumlah usaha manufakturing dalam bentuk usaha patungan untuk kepentingan asing, atau sebagai usaha domestik nasional, pasaran nasional tampaknya telah mencapai kejenuhan. Lagipula, menurunnya daya beli telah mempengaruhi pertumbuhan sektor manufakturing sedemikian rupa di mana banyak dari mereka telah beroperasi di bawah kapasitas penuh.

## PERTUMBUHAN YANG LAMBAN

Tiga tahun pertama dari Repelita III telah menunjukkan tingkat pertumbuhan rata-rata antara 6,5% dan 7%. Selama tahun fiskal 1982/1983 ekonomi Indonesia menghadapi masalah-masalah seperti kelimpahan suplai minyak dunia yang mempengaruhi pendapatan negara dari sektor minyak. Sektor impor nasional tampaknya mencerminkan kenaikan, terutama karena komitmen tahun-tahun sebelumnya ada sejumlah besar proyek yang dirintis pemerintah dan membutuhkan pembiayaan valuta asing. Ini mempengaruhi posisi neraca pembayaran nasional, jadi membebani sumber-sumber keuangan negara. Menurut sejumlah sumber, tingkat pertumbuhan 1983 dianggap zero berdasarkan harga 1981. Dibandingkan dengan 6,5% selama tiga tahun pertama Repelita III, kelesuan mempengaruhi kegiatan-kegiatan bisnis.

---

<sup>1</sup>Usaha patungan antara partner nasional dan asing, dalam hal mana kontribusi partner asing berupa modal, manajemen, dan teknologi.



Menghadapi kemungkinan penurunan harga minyak lebih lanjut, penurunan pendapatan devisa Indonesia dan sumber-sumber anggaran diharapkan akan berlanjut selama beberapa tahun. Dirasakan perlu untuk mengambil keputusan kebijakan segera yang akan meletakkan dasar-dasar pemulihan. Di antara keputusan-keputusan penting yang diambil adalah devaluasi Rupiah 28% terhadap dollar AS yang mempengaruhi banyak perusahaan swasta, yang memiliki pinjaman besar dalam mata uang AS. Keadaan diperburuk dengan adanya semacam "run on bank."

Devaluasi 28% sangat mengejutkan sektor swasta sebab jika seseorang meminjam US\$10 juta dari luar dengan dasar dollar ia secara mendadak harus membayar 28% lebih, artinya menghapus segala kemungkinan untung. Lagipula, pemerintah juga mengatur kembali (rephase) sejumlah proyek besar, yang telah disetujui, jadi menempatkan mereka yang terlibat dalam suatu dilema. Ini diikuti oleh deregulasi industri perbankan untuk menarik lebih banyak dana dari masyarakat yang memungkinkan bank-bank milik pemerintah untuk menetapkan suku bunga pada deposito berjangka berdasarkan mekanisme pasar bebas, yang sekarang berkisar dari 16,5% hingga 18,5% pada deposito 3 bulan hingga 1 tahun. Suku bunga deposito-deposito yang ditetapkan oleh bank-bank swasta, baik asing maupun dalam negeri, bahkan lebih tinggi. Suku bunga yang baru ini memiliki efek yang merugikan pada pasar bursa yang menjamin pengembalian investasi atau deviden sekitar 15%. Deregulasi ini telah mengakibatkan hampir berakhirnya perusahaan-perusahaan yang mempunyai rencana untuk "go public."

Keputusan lain yang baru-baru ini diambil adalah pembaharuan perpajakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan dari pajak dan jumlah wajib pajak. Pembaharuan perpajakan yang mencakup sistem tarif baru dan Pajak Pertambahan Nilai ini telah diterima dengan berbagai perasaan oleh masyarakat pada umumnya. Akan tetapi pejabat pajak ditetapkan untuk melaksanakan undang-undang perpajakan yang baru mulai 1 April 1985.

Keputusan pemerintah untuk menyederhanakan peraturan dan prosedur merupakan usaha yang sudah pernah dilakukan beberapa waktu sebelumnya, tetapi pelaksanaannya umumnya kurang berhasil. Keputusan pemerintah akan ada, dan penyederhanaan prosedur akan dirumuskan, tetapi berbagai birokrat yang harus menafsirkan penyederhanaan tersebut akan memiliki versi dan waktu sendiri dan kerap kali tanpa suatu perasaan yang mendesak. Barangkali tidak banyak perubahan yang dapat diharapkan jika dari sudut pandangan struktural mereka yang melaksanakan undang-undang tersebut masih menganggap diri sebagai "penguasa" daripada pelayan masyarakat, sehingga sektor swasta hanya bisa menerima penafsiran tersebut. Kenyataan



bahwa sektor impor sendiri harus melewati 34 meja benar-benar bukan senda gurau tetapi kenyataan hidup yang harus dihadapi wirausaha swasta yang terlibat dalam bisnis impor. Bagi mereka yang berada di sektor ekspor, jumlah meja rupanya telah dikurangi menjadi 15 namun masih merupakan pekerjaan yang memakan waktu bagi negara yang sangat membutuhkan devisa dari ekspor non-minyak. Meja-meja di sini diartikan sebagai penandatanganan birokrat yang menangani berbagai bagian proses untuk melengkapi dokumentasi bagi impor dan ekspor.

## INDIKATOR-INDIKATOR EKONOMI MAKRO

Neraca pembayaran Indonesia pada 1984 menunjukkan surplus US\$943 juta pada tahun kalender 1984 dibandingkan dengan US\$654 juta pada 1983. Cadangan devisa Indonesia pada 31 Desember 1984 berjumlah US\$5.751 juta. Devisa di tangan bank-bank devisa diperkirakan sekitar US\$4,3 milyar, sehingga cadangan devisa nasional berjumlah sekitar US\$10 milyar. Terhadap jumlah ini dana dari sumber-sumber IGGI yang belum dikeluarkan dan diperkirakan sekitar US\$3 milyar bisa ditambahkan.

Jika informasi kami benar, Indonesia juga telah menandatangani semacam "standby agreement" dengan suatu konsorsium bank sejumlah US\$750 juta. Dari angka-angka ini dapat disimpulkan bahwa cadangan devisa Indonesia kelihatannya cukup memberi harapan.

Perbaikan neraca pembayaran diakibatkan oleh kenaikan pendapatan minyak sebesar 3% yang mencapai angka US\$11.752 juta pada 1984. Kenaikan 31,8% ekspor LNG berjumlah US\$3.014 juta dan kenaikan ekspor non minyak 19% berjumlah US\$5.943 juta. Jadi mengenai ekspor non minyak, angka US\$6 milyar pada 1980 belum terlampaui.<sup>2</sup> Sebaliknya impor komoditi non minyak menurun 10% dari US\$13.896 juta hingga US\$12.496 juta. Ini mengakibatkan defisit US\$3.056 juta dibandingkan dengan defisit 1983 sebesar US\$6.442 juta.

Pada bulan Juni 1984, utang luar negeri Indonesia berjumlah US\$23,2 milyar (sekarang sekitar US\$25 milyar yang sedikit melampaui ratio 20%), yang terdiri atas US\$21,6 milyar utang pemerintah dan US\$1,6 milyar utang perusahaan-perusahaan negara. Ini mungkin tidak mencakup utang-utang Garuda Indonesian Airways yang tidak dijamin pemerintah dan juga utang-utang perusahaan-perusahaan swasta terhadap masyarakat perbankan internasional. Kira-kira 75% utang pemerintah berasal dari pinjaman lunak dan

---

<sup>2</sup>Sadli, M., "Prospek Pemasaran Industri di Indonesia," yang diberikan di Fakultas Teknologi, Universitas Gadjah Mada, 26 Februari 1985.

setengah lunak (pinjaman konsesi) dan sisanya dari pinjaman-pinjaman komersial dari masyarakat perbankan internasional.

Kredit-kredit dari sektor perbankan meningkat 24% (Rp3.636 juta pada 1984) yang menunjukkan bahwa sektor perbankan telah berpartisipasi aktif dalam membiayai berbagai kegiatan sektor ekonomi dan bisnis.<sup>3</sup> Tingkat pertumbuhan yang diharapkan dalam Repelita IV diperkirakan sekitar 5% setiap tahun setelah mengalami tingkat pertumbuhan rata-rata 7% selama 15 tahun terakhir.

### ANGGARAN PEMERINTAH 1985/1986

Masyarakat bisnis bertanya-tanya apakah anggaran 1985/1986 akan meningkatkan bisnis yang akhir-akhir ini menurun. Namun demikian harus dicatat di sini bahwa salah satu sasaran anggaran adalah bahwa tindakan fiskal yang diambil seharusnya menjamin pertumbuhan dan kestabilan ekonomi negara. Digambarkan bahwa anggaran akan meningkat 23% untuk pengeluaran rutin dan 1,8% hingga 2,0% untuk pengeluaran pembangunan. Kenaikan 23% untuk pengeluaran rutin meliputi kenaikan gaji pegawai sipil dan personal militer, yang berkisar 35% dalam hal pensiunan dan 48,5% dalam hal subsidi kepada pegawai sipil di daerah otonom.

Terdapat 1,8 juta pegawai sipil dan personal militer pada tingkat pemerintah pusat dan 1,5 juta pada tingkat pemerintah daerah (*Tempo*, 12 Januari 1985). *Tempo* telah melakukan perhitungan sebagai berikut:

a. Pada tingkat pemerintah pusat, kenaikan	Rp 800 milyar
b. Pada tingkat pemerintah daerah, kenaikan	Rp 800 milyar
c. Bagi personal di daerah otonom, kenaikan	Rp 244 milyar
Total	Rp1.844 milyar

Jika kita memasukkan Rp1.844 milyar, kenaikan harga bagi padi para petani, jumlah yang diinjeksi ke dalam perekonomian kiranya lebih daripada Rp2.000 milyar. Jadi rata-rata antara Rp160 milyar dan Rp170 milyar sebulan. Lagipula, jika kita memasukkan proyek-proyek yang disebut SIAP dalam hal mana biaya yang masih harus dikeluarkan berjumlah Rp2.100 milyar, jumlah yang diinjeksi ke dalam perekonomian akan mampu meningkatkan perekonomian yang lesu. Ini berarti bahwa masyarakat bisnis bisa mengharapkan peningkatan kegiatan mereka. Namun demikian, ini hanya terbatas bagi barang-barang yang tidak mewah. Jadi mereka yang terlibat dalam industri pangan,

<sup>3</sup>Semua angka dan catatan diambil dari Pidato Gubernur Bank Indonesia, 1 Januari 1985.



tekstil (termasuk pakaian) dan sepeda, bisa memperoleh keuntungan dari kenaikan suplai uang ini, tetapi bukan bagi mereka yang terlibat dalam industri elektronik dan otomotif.

Kenaikan gaji pegawai negeri dan personal militer diharapkan akan berasal dari kenaikan dalam penghasilan dari pajak langsung. Dikatakan bahwa undang-undang perpajakan yang baru akan meningkatkan jumlah wajib pajak yang pada gilirannya akan meningkatkan penghasilan pemerintah.

Aspek lain yang diamati secara hati-hati oleh masyarakat bisnis adalah penerimaan minyak. Amat dipahami bahwa harga minyak sekarang ini tidak pasti. Jatuhnya harga US\$1 per barrel akan berarti penurunan pendapatan sekitar US\$330 juta. Jika situasi semakin buruk dan kejatuhan harga US\$3 per barrel tidak dapat dihindari, maka jatuhnya pendapatan sekitar US\$1 milyar tidak dapat dihindari. Tetapi dikatakan bahwa cadangan devisa nasional lebih dari US\$10 milyar, dana yang belum dikeluarkan dari sumber-sumber bantuan US\$3 milyar, dan persetujuan kredit yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu sebesar US\$750 juta bisa menutupi penurunan sementara pendapatan minyak. Barangkali suatu hal yang lebih tidak pasti adalah jumlah negara pengimpor minyak seperti Jepang yang baru-baru ini mulai mendiversifikasi sumber-sumber bagi kebutuhan minyak mereka. Penurunan ke sekitar 13% dari volume impor dan 15% hingga 16% dari seluruh impor minyak kiranya cukup berarti bagi Indonesia. Ketika Jepang sangat membutuhkan minyak, Indonesia dianggap sebagai suplai yang dipercaya dan diandalkan. Akan tetapi waktu telah berubah. "Kawan" yang baik dan membantu di masa lalu dengan "mudah" dilupakan. Jepang dan perusahaan-perusahaan perdagangannya yang besar telah menjadi pedagang minyak dunia, termasuk memasarkan minyak dari Cina. Penurunan permintaan dari konsumen yang begitu besar seperti Jepang mempengaruhi pendapatan minyak Indonesia, sehingga mengharuskan Indonesia mencari konsumen-konsumen minyak yang baru. Korea Selatan, yang juga pada saat lalu pernah dibantu Indonesia dalam hal kebutuhan minyak mereka, sekarang telah beralih ke Cina untuk suplai minyaknya. Negara ini harus meningkatkan pengambilan minyak dari Cina, baik untuk alasan politik maupun komersial.

Biasanya bila masyarakat bisnis memperkirakan penurunan harga minyak, desas-desus penyesuaian atau devaluasi rupiah mulai mengganggu kestabilan ekonomi nasional. Walaupun mungkin beberapa masih memperkirakan semacam devaluasi, mayoritas kelihatannya berkesimpulan bahwa untuk sesedikitnya enam bulan tidak akan ada tindakan moneter seperti itu (lihat tabel mengenai pembelian devisa melalui Bank Indonesia). Akan tetapi masyarakat bisnis mengetahui bahwa rupiah berada pada suatu basis yang mengambang secara terkendali. Mereka memperkirakan suatu penyesuaian rupiah secara



perlahan-lahan sebesar 5% hingga 10% dalam satu tahun, berdasarkan persentase yang dialami pada 1984.

Beberapa tabel anggaran 1985/1986 yang berkaitan dimasukkan pada bagian akhir tulisan ini.

## USAHA PEMERINTAH UNTUK MEMBANGKITKAN KEMBALI BISNIS?

Jika kita mengamati berbagai langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mempertahankan kestabilan ekonomi, seperti mengatur proyek-proyek yang menyerap banyak devisa, deregulasi industri perbankan dengan maksud untuk membuat industri perbankan lebih otonom dalam mengumpulkan dana dari masyarakat, penerapan undang-undang perpajakan yang baru sehingga kita harus mencari dana-dana baru melalui devaluasi untuk menciptakan sumber dana yang lebih sehat melalui pajak langsung, dan peningkatan pendapatan melalui perubahan-perubahan kebijakan industri pariwisata, serta pengurangan pengeluaran, penurunan jumlah impor komoditi yang tidak dibutuhkan, maupun peningkatan efisiensi melalui penyederhanaan prosedur-prosedur. Semua tindakan moneter dan fiskal tersebut tampaknya ditujukan untuk menjamin pertumbuhan dan kestabilan ekonomi.

Masyarakat bisnis sepakat bahwa kestabilan ekonomi Indonesia telah berhasil dipertahankan dengan tingkat inflasi di bawah dua digit, yakni sekitar 9,7% pada 1984. Akan tetapi beberapa kalangan masyarakat bisnis telah memberi komentar bahwa kestabilan ini telah dicapai dengan pengorbanan dalam bentuk stagnasi pada tingkat tertentu dalam kegiatan bisnis.

Jika kita mengamati indikator-indikator ekonomi dan agregat makro serta juga berbagai aspek anggaran 1985/1986, pemerintah benar-benar telah mencapai kestabilan ekonomi, walaupun masih tanda tanya apakah tingkat pertumbuhan 5% bisa dicapai jika kita memperhatikan menurunnya kegiatan bisnis. Jika kita memperhitungkan indikator-indikator makro, bisa disimpulkan bahwa terdapat kestabilan ekonomi di Indonesia pada 1984, tetapi sekali lagi sebagaimana disebut oleh beberapa kalangan adanya pengorbanan dalam bentuk stagnasi kegiatan bisnis. Tentu seseorang dapat mengatakan bahwa kebijakan pemerintah tidak memuaskan semua pihak dalam masyarakat. Akan tetapi masalahnya adalah bahwa sektor bisnis memberi pekerjaan kepada berjuta-juta tenaga kerja. Jika perusahaan harus memecat tenaga-tenaga kerja tersebut, akibatnya terjadi ketidakstabilan. Oleh karena itu menurunnya kegiatan bisnis bisa mengakibatkan efek yang merugikan bagi kestabilan ekonomi negara.



## MENGAMATI LESUNYA BISNIS

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, penulis menyoroti masyarakat bisnis swasta yang telah berkembang sebagai pemberi pekerjaan kepada berjuta-juta tenaga kerja.

Mayoritas industri seperti tekstil, pangan, elektronik, alat-alat berat, otomotif, semen, bahan-bahan bangunan, sepeda motor, ban, kosmetik, kayu lapis dan perjalanan tampaknya telah beroperasi di bawah kapasitas. Misalnya, beberapa perusahaan yang menghasilkan alat-alat berat, biayanya mencapai beratus-ratus juta dollar, dan telah meminjam banyak dari sumber-sumber dollar dan rupiah. Barangkali sedikit industri seperti pasar swalayan dan perusahaan rokok kretek tidak merasakan pengaruhnya. Misalnya, pasar-pasar swalayan tampaknya dapat mempertahankan posisi mereka oleh karena segmen konsumen tertentu. Mereka umumnya melayani konsumen berpendapatan tetap yang menjadi langganan mereka. Industri rokok kretek yang terbatas pada perusahaan-perusahaan besar seperti Gudang Garam, Jarum, dan Bentul, tampaknya mengelola dengan baik kegiatan industri mereka, khususnya dalam mengatasi kesulitan untuk memperoleh bahan-bahan mentah utama (cengkeh) yang semakin langka, sedang pabrik-pabrik berukuran menengah dan kecil menemui kesulitan untuk melakukan penyimpanan cengkeh karena kekurangan dana dan fasilitas-fasilitas penyimpanan. Jadi, hanya pabrik-pabrik rokok kretek besar yang "bebas resesi," pabrik-pabrik berukuran menengah mungkin dipaksa oleh keadaan untuk menghentikan operasi mereka.

## DAYA BELI KONSUMEN

Daya beli berjuta-juta konsumen menurun pada 1984. Konsumen yang biasanya memperoleh pendapatan mereka dari apa yang disebut hasil panen komersial di daerah-daerah pertanian dan petani-petani tampaknya telah mengalami penurunan pendapatan oleh karena menurunnya ekspor bahan-bahan mentah ini. Misalnya, petani di daerah-daerah tanaman tembakau telah bertahun-tahun menderita karena menurunnya pendapatan, sehingga apa pun yang masih mereka peroleh akan dibelanjakan pada tingkat pertama untuk makanan. Ini kiranya juga sama dengan sektor-sektor pertanian lainnya seperti tapioka, karet, teh, dan kopi. Barangkali di daerah-daerah pertanian karet dan lainnya beberapa perbaikan kelihatan nyata terutama oleh karena meningkatnya ekspor karet.

Dalam situasi ini banyak industri manufaktur tidak akan mampu memasarkan semua produk ke konsumen akhir. Hampir semua produk mereka akan tetap merupakan persediaan di gudang, karena *pengecer* dan *agen*

tidak akan mengambil risiko untuk memiliki stok produk yang tidak dapat dijual. Jadi, untuk bisa menyalurkan produk-produk mereka, perusahaan-perusahaan mungkin harus menggunakan metode-metode yang lebih agresif dengan memberi kredit tiga hingga enam bulan kepada agen dan pengecer, untuk mendorong produk-produk mereka. Beberapa dari mereka telah berhasil mendorong produk-produk melalui jalur-jalur yang relevan, tetapi beberapa mungkin tidak, dalam hal mana mereka harus memperpanjang kredit kadang-kadang sekitar satu tahun. Jika mereka meminjam dana dari bank-bank komersial dengan suku bunga tinggi, mereka harus membayar bunga dari 25% hingga 30% setiap tahun, jadi menghapus semua keuntungan yang diharapkan, belum lagi berbicara mengenai pengeluaran lain dalam menjalankan pabrik seperti pembayaran kembali dan bunga, pinjaman-pinjaman asing mereka untuk membiayai mesin, peralatan, biaya perijinan, dan lain-lain. Sehubungan dengan daya beli yang lemah banyak industri manufaktur harus mengurangi kapasitas produksi mereka, beberapa hanya 30%, 40%, atau 60%.

## DAMPAK KELAMBANAN

Menurunnya kapasitas akan memaksa mereka untuk mengurangi tenaga kerja. Semula mereka bisa bekerja setengah hari dan kemudian "merumahkan" jumlah tertentu tenaga kerja, tetapi tetap membayar gaji mereka. Jika keadaan semakin memburuk, mereka selanjutnya terpaksa melakukan PHK terhadap tenaga kerja dengan meminta ijin dari pihak yang berwenang. Pada dasarnya Departemen Tenaga Kerja berusaha mencegah hal ini, tetapi jika mereka menolak memberi ijin kepada pabrik-pabrik untuk mem-PHK-kan tenaga kerja perusahaan-perusahaan ini akan mengalami kebangkrutan yang tidak diinginkan pemerintah.

Dampak lainnya adalah menurunnya pembayaran kembali utang-utang ke bank yang sejauh ini mereka anggap sebagai modal operasi (*operating capital*) dan juga pembayaran kembali hutang luar negeri (*off shore debt*) ke bank-bank asing serta bank-bank komersial nasional. Oleh karena itu, bank-bank akan terpaksa menjadwalkan kembali (*reschedule*) beberapa pembayaran dan mungkin perlu bersabar dalam penanganan utang yang tertunggak.

Perusahaan-perusahaan asing perlu menunggu pembayaran royalty, tetapi banyak dari mereka akan menekan rekan domestik demi tercapainya sasaran mereka, yang berarti bahwa impor komponen dan produk-produk lain dari perusahaan asing perlu diteruskan, karena jika tidak partner asing akan mengancam untuk menarik lisensi pabrik mereka. Walaupun menurut peraturan-peraturan pemerintah, mereka tidak diijinkan untuk mengalihkan per-



wakilan utama (*sole agency*) ke pihak-pihak lain yang berminat, dalam kenyataan mereka banyak menekan agen-agen mereka, seperti menarik dukungan mereka ke bank-bank seperti *Bank of Tokyo* atau untuk hal tersebut, menghentikan fasilitas-fasilitas keuangan lainnya.

Sementara kelesuan masih berlangsung, peraturan perpajakan yang baru akan menambah ketegangan perusahaan-perusahaan karena Pajak Pertambahan Nilai atau pajak atas barang-barang mewah tentu akan meningkatkan harga jual yang lebih besar. Dengan pasar yang lesu, para industriawan bertanya-tanya apakah mereka dapat meningkatkan harga jual produk mereka.

Beberapa bulan mendatang akan ditunjukkan apakah ini mungkin atau tidak, walaupun harga jual yang ada telah turun. Beberapa industri kiranya lebih optimistik akan penjualan 1985. Begitu banyak industri sekarang ini sedang bersikap "menanti dan melihat." Namun demikian beberapa dari mereka kelihatannya bersikap lebih agresif.

## INJEKSI UANG DALAM PEREKONOMIAN

Harapan di kalangan industriawan adalah bahwa injeksi Rp2.000 milyar dan pengeluaran SIAP di tingkat pemerintah daerah akan mengakibatkan membaiknya kembali daya beli konsumen. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, ini hanya dimungkinkan bagi barang-barang konsumen, tetapi barang-barang bersifat tahan lama (*durable goods*) seperti mobil, pesawat televisi, video tape, tidak terpengaruh. Pengaruh ganda hanya dirasakan setelah April 1985. Jika pengeluaran SIAP dilakukan secara lebih efektif, banyak industri konstruksi, asbes, ubin, batu bata, dan lain-lain merasakan dampak dari peningkatan kegiatan. Dan jika dimulai pada tingkat pemerintah regional, kegiatan-kegiatan ini akan merangsang beberapa industri di tingkat daerah dan pusat.

## KELESUAN BISNIS DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Kelesuan bisnis akan mempengaruhi penanaman modal. Sebagaimana ditunjukkan sebelumnya, banyak industriawan beroperasi di bawah kapasitas. Dapat diperkirakan bahwa mereka tidak akan memikirkan perluasan usaha sekarang ini hingga merasa yakin bahwa mereka dapat beroperasi dengan kapasitas penuh atau mengharapkan dapat beroperasi dengan kapasitas penuh dalam jangka pendek. Akan tetapi banyak dari industriawan ini tidak memikirkan atau memulai usaha-usaha baru. Lebih jauh, mereka juga memiliki

utang yang besar hingga tidak mudah meminjam uang untuk investasi baru, karena sumber-sumber keuangan nasional dan asing tentu menolak permohonan tersebut. Dengan kata lain, sulit mengharapkan sektor swasta memulai usaha baru dalam tahun 1985 atau 1986. Sebaliknya dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi sebesar 5%, pemerintah mengharapkan investasi besar-besaran di sektor swasta dalam industri yang berorientasi ekspor dan menguntungkan. Dengan prospek yang suram ini, para ekonom tampaknya berpendapat bahwa sasaran pertumbuhan 5% terlalu tinggi. Akan tetapi kita masih berada dalam tahun kedua Repelita IV, dan masih terdapat sisa 3 tahun lagi.

## PENANAMAN MODAL ASING

Indonesia aktif meningkatkan penanaman modal asing, tetapi prospeknya masih sangat suram. Indonesia telah dianggap oleh banyak para calon investor tidak memiliki iklim yang menarik bagi penanaman modal asing. Beberapa faktor kendala dalam daftar mereka adalah risiko politik, ketidakkonsistenan peraturan, penanganan permohonan secara birokrasi, dan kesulitan lainnya sejauh menyangkut keinginan pihak asing. Di samping itu, banyak industri telah dianggap tertutup bagi penanaman modal asing dan kadang-kadang juga tidak tersedia bagi penanaman modal dalam negeri. Akan tetapi mungkin alasan yang lebih penting untuk tidak menanamkan modal di negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah beralihnya arah dan perhatian para investor asing.

Jika 10 hingga 15 tahun lalu banyak investor asing terutama Jepang, tertarik untuk menjamin suplai bahan mentah dari negara-negara berkembang, sekarang mereka mengalihkan perhatian ke negara-negara industri. Akhir-akhir ini terjadi kelimpahan persediaan dalam suplai bahan mentah. Dengan demikian mereka dengan mudah memperoleh setiap komoditi seperti karet, timah dan tembaga. Kebijakan dan arah penyesuaian industri mereka ke industri teknologi maju dan tinggi menyebabkan berkurangnya ketergantungan pada suplai energi dan bahan mentah.

Hal ini mendesak mereka untuk mengalihkan perhatian ke negara-negara industri maju seperti Jepang dan Amerika Serikat. Mereka tidak hanya menanamkan modal di Amerika Serikat tetapi juga berminat untuk memanfaatkan industri-industri teknologi maju di negara tersebut. Mereka juga berminat untuk mengembangkan dan melanjutkan akses ke riset dan teknologi di Amerika Serikat. Tidak hanya perusahaan-perusahaan Jepang, yang datang ke Amerika Serikat untuk investasi, tetapi banyak juga industriawan Eropa mengambil keuntungan. Untuk menunjang investasi mereka di negara-negara maju, banyak industri penunjang dan jasa Jepang, seperti perbankan, juga



telah melakukan investasi besar-besaran di negara tersebut dalam sektor jasa (atau perbankan) dan komersial. Perkembangan tersebut dapat dilihat di Tabel 4 yang menunjukkan penanaman modal asing Jepang. Di samping peralihan dari negara-negara industri seperti Jepang dan Eropa Barat, investor-investor Amerika Serikat juga telah mengalihkan perhatian ke Amerika Serikat. Banyak kesempatan dalam industri-industri maju dan banyak MNC Amerika telah menarik investasi mereka di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (seperti Georgia Pacific), untuk menanamkan modal mereka di industri maju dan tinggi di negara mereka sendiri.

Hasil-hasil investasi di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya masih menarik dan lebih-lebih hampir tidak memiliki risiko politik. Apa yang terjadi sekarang adalah bahwa Amerika Serikat telah menjadi negara pengimpor modal, sedangkan Jepang telah menjadi negara pengeksport modal yang matang. Surplus perdagangan Jepang tampaknya telah diinvestasi di negara-negara industri. Kecenderungan ini diperkirakan akan terus, karena negara-negara ini menganggap industri-industri maju sebagai motor penggerak baru bagi pertumbuhan.

Dengan adanya aspek domestik dan pengalihan perhatian para calon investor asing ke negara-negara industri serta peralihan dari negara yang mendasarkan diri pada sumberdaya alam, dalam benak kita akan memperkirakan bahwa di tahun-tahun mendatang penanaman modal asing di sektor-sektor manufaktur tradisional tidak akan datang jika kita mencoba menarik investasi asing dalam bentuk promosi di negara-negara industri.

## PENANAMAN MODAL ASING DAN PEMBANGUNAN MODAL DALAM NEGERI DI INDUSTRI-INDUSTRI YANG BERORIENTASI EKSPOR

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, penting sekali bagi kita memikirkan perumusan suatu program untuk menarik PMA dan PMDN dalam industri-industri berorientasi ekspor. Ini bukan merupakan tugas yang mudah, dan hanya dengan suatu perumusan program yang terperinci dengan banyak usaha kita bisa menarik para investor untuk industri-industri ini. Apabila kita menengok ke perusahaan-perusahaan multinasional, yang mungkin tertarik pada industri yang berorientasi pada ekspor, kita pertama-tama akan melihat dan mempertimbangkan perusahaan-perusahaan multinasional yang telah berkembang sebagai pedagang-pedagang internasional dan global.

Dari sudut pandangan perdagangan dunia, pilihan kita akan diarahkan pada Perusahaan-perusahaan Perdagangan Umum Jepang (Sogo Shosha).

Perusahaan-perusahaan ini telah mengembangkan keahlian dalam mengeksport produk dari Indonesia ke dunia internasional. Kami telah melakukan survei tentang Sogo Shosha dan sampai sejauh mana mereka telah berhasil dalam memasarkan produk-produk Indonesia di dunia internasional. Sejauh penilaian kami, mereka cukup berhasil. Jumlah yang diekspor berkisar dari US\$60 juta hingga sekitar US\$250 juta. Perusahaan-perusahaan perdagangan umum yang telah turut mengembangkan ekspor produk-produk non minyak dari Indonesia, kiranya merupakan kelompok yang paling memenuhi syarat untuk didekati agar menanamkan modal di industri-industri yang berorientasi ekspor. Selain perusahaan-perusahaan perdagangan umum Jepang, perusahaan-perusahaan perdagangan umum Korea (Chaebol) kiranya merupakan kelompok berikut yang perlu didekati, tetapi sekarang perusahaan-perusahaan ini kiranya memiliki banyak kesulitan dengan pemerintah mereka sendiri, sehubungan dengan status dan pemusatan kekuatan mereka dalam bisnis. Mereka masih menghadapi sejumlah kebijakan yang mungkin memiliki dampak terhadap kemampuan operasi mereka di dunia internasional. Mungkin terdapat kelompok-kelompok lain seperti toko-toko serba ada yang beroperasi di Amerika Serikat, Jepang dan Eropa Barat, tetapi mereka sendiri kiranya tidak mampu membangun industri yang berorientasi ekspor di Indonesia karena mereka telah memiliki suplai di Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Hongkong. Gabungan perusahaan-perusahaan perdagangan umum Jepang/toko-toko serba ada dan partner-partner nasional mungkin tertarik untuk memulai industri yang berorientasi ekspor. Akan tetapi program industri berorientasi ekspor dan formulasinya sebaiknya menjadi bagian strategi ekspor nasional negara. Namun demikian salah satu kendala yang paling utama di tahun-tahun mendatang adalah meningkatnya kecenderungan ke arah proteksionisme khususnya undang-undang perdagangan Amerika baru yang mungkin maksudnya serupa dengan *American Incorporation*.

## KESIMPULAN

Tulisan ini merupakan pandangan seorang pengusaha. Pertumbuhan bisnis selalu mencerminkan kekuatan dan kelemahan ekonomi nasional. "Credit standing" yang diperoleh pemerintah Indonesia telah membantu pengusaha-pengusaha swasta di Indonesia untuk mengembangkan kapasitas dan kemampuan mereka.

Setelah masa pertumbuhan pesat dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7% dalam 15 tahun, tingkat pertumbuhan 1983 hampir nol berdasarkan harga 1981, sementara dalam Repelita IV diperkirakan tingkat pertumbuhan rata-rata 5%. Menurunnya pertumbuhan ekonomi mempengaruhi masyarakat bisnis Indonesia.



Kebijakan-kebijakan yang tepat telah dirumuskan dan dilaksanakan, yakni pengaturan (rephasing) beratur-ratus proyek yang menyerap banyak devisa, deregulasi industri perbankan, pembebanan undang-undang perpajakan yang baru, dan pengawasan pengeluaran. Indikator-indikator ekonomi nasional, seperti cadangan devisa Indonesia, yang telah melampaui angka US\$10 milyar, "standby credit," dan jenis cadangan-cadangan lain, bersamaan dengan tingkat inflasi yang rendah di bawah dua digit (9,7%) dan utang pemerintah yang berjumlah US\$23,2 milyar yang 70% nya adalah pinjaman konsesi dan semi konsesi, menunjukkan telah dicapainya suatu kestabilan ekonomi.

Anggaran pemerintah ditujukan antara lain untuk meningkatkan kestabilan dan pertumbuhan negara yang meliputi usaha untuk menaikkan kemunduran sektor bisnis. Injeksi sekitar Rp2.000 milyar dan peningkatan pengeluaran proyek-proyek SIAP yang diperkirakan sekitar Rp2.108 milyar diharapkan akan meningkatkan sektor bisnis. Akan tetapi tidak semua industri akan memperoleh keuntungan dari injeksi ini. Industri barang-barang konsumen dan bahan konstruksi mungkin akan memperoleh keuntungan, tetapi tidak bagi industri konsumen yang tahan lama (*durable*) seperti industri otomotif.

Kelesuan bisnis telah mempengaruhi ketenagakerjaan. Beberapa tenaga kerja telah di-PHK karena industri-industri beroperasi di bawah kapasitas. Akan tetapi pasar-pasar swalayan dan pabrik-pabrik rokok kretek Gudang Garam, Jarum, dan Bentul mungkin kekecualian, karena mereka beroperasi dengan kapasitas penuh. Alasan utama kemunduran bisnis ini, yang tidak hanya mempengaruhi tenaga kerja tetapi juga bank-bank, adalah lemahnya daya beli berjuta-juta konsumen. Menurunnya kegiatan bisnis dan berkurangnya daya beli konsumen telah menciutkan arus barang dan uang. Diharapkan bahwa injeksi bertrilyun-trilyun dollar bisa membuat arus tersebut kembali normal. Walaupun demikian masih terdapat beberapa kendala seperti undang-undang perpajakan yang baru yang terdiri atas PPn dan Pajak atas barang mewah. Ini bisa meningkatkan harga komoditi sehingga kenaikan harga penjualan dapat mempengaruhi kemampuan industri untuk keluar dari situasi bisnis yang buruk.

Kelesuan bisnis yang mengakibatkan rendahnya utilisasi kapasitas produksi terpasang bisa terbukti sebagai kendala terbesar bagi para industriawan untuk memperluas atau menambah investasi baru. Mereka akan menunggu hingga keadaan menjadi lebih jelas dan hingga pada saat ini pabrik-pabrik mereka tidak beroperasi dengan kapasitas penuh.

Perubahan PMA dari industri berdasarkan sumber daya alam ke industri teknologi lebih maju dan tinggi di negara-negara industri mempengaruhi sikap

Tabel 1

ARUS DEvisa  
SELAMA DESEMBER 1984

Tanggal	Kurs Tengah (Rp)	Jumlah (US\$)
1.	1.068	7.282.809,47
2	—	—
3	1.068	9.300.000,00
4	1.068	12.700.000,00
5	—	—
6	1.068	7.000.000,00
7	1.068	9.953.821,17
8	1.069	6.210.536,07
9	—	—
10	1.069	17.500.000,00
11	1.069	57.850.000,00
12	1.069	45.950.000,00
13	1.069	33.300.000,00
14	1.069	40.400.000,00
15	1.069	6.098.555,01
16	—	—
17	1.069	19.150.000,00
18	1.069	3.909.092,81
19	1.069	6.600.000,00
20	1.070	4.648.459,94
21	1.071	6.543.783,45
22	1.071	7.801.148,85
23	—	—
24	1.071	—
25	—	—
26	1.072	7.623.108,99
27	1.072	14.300.000,00
28	1.073	44.495.000,00
29	1.074	11.900.000,00
30	—	—
31	—	—
Jumlah		380.516.315,76

JUMLAH ARUS DEvisa  
DAN KURS TENGAH

1984	Jumlah (US\$)	Kurs Tengah (Rp)
Januari	696.871.587,38	993 - 995
Februari	279.916.435,16	992 - 995
Maret	399.939.129,17	992 - 1.000
April	480.000.000,00	1.000 - 1.009
Mei	322.097.572,90	1.005 - 1.009
Juni	351.302.631,91	1.009 - 1.015
Juli	827.316.301,89	1.015 - 1.027
Agustus	830.294.150,50	1.029 - 1.048
September	717.719.567,95	1.050 - 1.059
Oktober	576.446.727,36	1.059 - 1.061
November	480.094.112,98	1.061 - 1.067

Sumber: *Business News*, 2 Januari 1985



Tabel 1 (lanjutan)

ARUS DEvisa SELAMA JANUARI 1985			ARUS DEvisa SELAMA FEBRUARI 1985		
Tanggal	Kurs Tengah (Rp)	Jumlah (US\$)	Tanggal	Kurs Tengah (Rp)	Jumlah (US\$)
1	—	—	1	1.082	5.304.696,43
2	1.075	25.550.000,00	2	1.083	3.293.367,35
3	1.075	32.100.000,00	3	—	—
4	1.075	57.450.000,00	4	1.083	40.554.155,24
5	1.076	43.650.000,00	5	1.084	49.792.220,70
6	—	—	6	1.084	6.950.000,00
7	1.076	59.000.000,00	7	1.085	11.050.000,00
8	1.077	42.100.000,00	8	1.085	20.850.000,00
9	1.078	30.950.000,00	9	1.086	3.905.218,15
10	1.078	32.100.000,00	10	—	—
11	1.079	18.300.000,00	11	1.086	29.125.000,00
12	1.080	4.976.745,61	12	1.087	12.400.000,00
13	—	—	13	1.088	48.550.000,00
14	1.080	46.800.000,00	14	1.088	43.100.000,00
15	1.081	20.000.000,00	15	1.087	39.805.000,00
16	1.081	11.100.000,00	16	1.087	3.743.703,93
17	1.081	8.050.104,51	17	—	—
18	1.081	25.750.000,00	18	1.087	9.600.000,00
19	1.080	2.915.508,62	19	1.088	38.700.000,00
20	—	—	20	1.089	29.850.000,00
21	1.080	16.650.000,00	21	1.090	7.200.000,00
22	1.081	36.550.000,00	22	1.091	5.245.039,64
23	1.081	32.500.000,00	23	1.092	4.386.982,70
24	1.081	24.400.000,00	24	—	—
25	1.081	14.450.000,00	25	1.092	6.450.000,00
26	1.082	3.831.615,73	26	1.093	57.400.000,00
27	—	—	27	1.093	8.720.000,00
28	1.082	14.765.000,00	28	1.092	34.700.000,00
29	1.082	24.300.000,00			
30	1.082	18.770.000,00			
31	1.082	7.125.000,00			
Jumlah		654.133.974,47	Jumlah		521.070.384,14

Sumber: *Business News*, 1 Februari 1985Sumber: *Business News*, 1 Maret 1985

Tabel 2

1984/85 BUDGET AND 1985/86 DRAFT BUDGET  
(Rp billion)

Revenues	1984/85	1985/86	% Change	Expenditures	1984/85	1985/86	% Change
A Internal revenues	16,149.4	18,677.9	15.7	A Routine expenditures	10,101.1	12,399.0	22.7
I Oil and natural	10,366.6	11,159.7	7.7	1 Civil service:	3,189.5	4,117.3	29.1
- Oil	(8,895.1)	(9,479.6)	(6.6)	1 Rice allowance	415.7	482.5	16.1
- Natural gas (liqu)	(1,471.5)	(1,680.1)	(14.2)	2 Salaries/pension	2,307.9	3,115.8	35.0
II Non oil and non gas	5,782.8	7,518.2	30.0	3 Meal allowance	286.6	313.3	9.3
1 Income tax				4 Other benefits domestic	99.9	116.6	16.7
2 Corporate tax				5 Diplomatic service	79.4	89.1	12.2
3 MPO tax	2,451.1	3,074.0	25.4	II Goods procurement	1,263.9	1,529.9	21.1
4 PBRD tax				1 Domestic	1,207.8	1,451.8	20.2
5 Sales tax				2 Foreign	56.1	78.1	39.2
Value added tax on goods and services				III Subsidies for			
and sales tax on luxury goods	958.2	1,686.4	73.9	autonomous regions	1,784.6	2,590.4	45.1
6 Import sales	—	—	—	1 Civil service	1,581.4	2,349.0	48.5
7 Import duty	681.4	717.1	5.2	2 Non civil service	203.2	241.4	18.8
8 Excise tax	727.5	963.3	32.4	IV Debt interest & instalment	2,686.1	3,559.1	32.5
9 Export tax	123.6	101.7	-17.7	1 Domestic	30.0	30.0	—
10 Other taxes	150.6	167.4	11.2	2 Foreign	2,656.1	3,529.1	32.9
11 Regional development	75.4	96.4	27.9	V Other expenditures	1,177.0	602.3	-48.8
12 Non tax revenues	615.0	731.9	19.0	1 Oil fuel subsidies	1,147.0	532.3	-53.6
B Development revenues (foreign aid):	4,411.0	4,368.1	-1.0	2 Others	30.0	70.0	133.3
I Program aid	39.5	70.9	79.5	B Development expenditures	10,459.3	10,647.0	1.8
II Project aid	4,371.5	4,297.2	-1.7	1 Rupiah financing	6,097.8	6,349.8	4.3
				II Project aid	4,371.5	4,297.2	-1.7
Total	20,560.4	23,046.0	12.1	Total	20,560.4	23,016.0	12.1

Sumber: Jakarta Post, 8 Januari 1985



Tabel 3

## GOVERNMENT'S PROJECTIONS OF BALANCE OF PAYMENTS (US\$ million)

	1983/84 (Actual)	1984/85 (Estimate)	1985/86 (Projection)
I Goods & services:			
1 Exports FOB	19,816	19,779	21,327
- Oil & natural gas	14,449	13,729	14,318
- Non oil & non gas	5,367	6,050	7,009
2 Imports FOB	-16,304	-15,438	-16,634
- Oil & natural gas	-3,489	-3,269	-3,292
- Non oil & non gas	-12,815	-12,169	-13,342
3 Services	-7,663	-7,587	-8,102
- Oil & natural gas	-3,589	-3,411	-3,727
- Non oil & non gas	-4,074	-4,176	-4,375
4 Current account	-4,151	-3,246	-3,409
- Oil & natural gas	7,371	7,049	7,299
- Without oil & gas	-11,522	-10,295	-10,708
II Official loans	5,793	4,359	4,974
1 Program aid	84	58	65
2 Project aid & others	5,709	4,301	4,909
IV Miscellaneous capital	1,191	341	406
V Official debt repayment*	-1,010	-1,509	-1,698
VI Errors & omissions	247	698	—
VII Balance of payments	2,070	643	273

Note: \*Principal payments only

Source: 1985/86 draft state budget

(mood) investor asing di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Calon-calun investor Jepang, Amerika, dan Eropa sekarang ini memusatkan perhatian pada industri teknologi maju dan tinggi yang dianggap sebagai motor penggerak pertumbuhan. Investasi tampaknya terpusat di Amerika Serikat. Negara ini telah menjadi negara pengimpor modal sementara Jepang telah menjadi negara pengeksport modal yang matang. Ini tampaknya akan tetap merupakan kecenderungan di tahun-tahun mendatang.

Satu-satunya daya tarik yang mungkin adalah bahwa kita sebaiknya memusatkan perhatian pada pengembangan suatu program terinci dan benar-benar dipikirkan mengenai cara menarik para investor untuk industri-industri nasional yang berorientasi ekspor. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa hanya perusahaan-perusahaan multinasional yang telah beroperasi sebagai pedagang-pedagang dunia mungkin berminat terhadap kemungkinan-

kemungkinan dan kesempatan-kesempatan yang akan diberikan oleh program-program investasi di industri-industri yang berorientasi ekspor. Calon-calon yang tampaknya masuk akal adalah perusahaan-perusahaan perdagangan umum (Sogo Shosha dan Chaebol) yang telah berhasil mengembangkan suatu keahlian dalam perdagangan dunia, toko-toko serba ada yang memiliki jaringan suplair internasional, atau kombinasi perusahaan-perusahaan perdagangan umum dan toko-toko serba ada.

Walaupun dewasa ini gambaran tidak terlalu cerah, dunia bisnis yang penuh dengan tantangan dan dinamisme wiraswasta akan mampu mengatasi segala hambatan dan resesi sementara yang dialami Indonesia. Sekali lagi walaupun dalam 1 atau 2 tahun dunia bisnis akan menghadapi sejumlah kendala, antara lain peraturan-peraturan perdagangan Amerika yang baru, kita yakin bahwa semuanya akan dilihat sebagai tantangan. Kesempatan-kesempatan baru akan muncul jika Indonesia berhasil melaksanakan program industri berorientasi ekspor. Akan tetapi kerja keras dan perubahan sikap akan membantu Indonesia berhasil dalam percaturan bisnis internasional. Sekali sasaran ekspor US\$30 milyar ditetapkan, dalam 15-20 tahun mendatang sektor swasta memiliki banyak ruang untuk beroperasi.



# **Prospek Perusahaan Dagang di Indonesia**

Djukardi ODANG

## **PENDAHULUAN**

Prospek Perusahaan-perusahaan Dagang di Indonesia, adalah suatu masalah yang sangat tepat untuk dibahas dewasa ini terutama karena negara-negara berkembang seperti Indonesia berada di dalam percaturan perdagangan modern yang ditandai dengan sengitnya persaingan internasional.

Dari bermacam-macam faktor yang mempengaruhi perkembangan perdagangan suatu negara, baik pengaruh luar maupun dalam negeri, kami berpendapat bahwa keadaan ekonomi, tingkat kemajuan teknologi, budaya dan politik pemerintah suatu negara akan merupakan faktor lingkungan perdagangan yang dominan, sehingga perlu dibahas. Tetapi sebelum sampai ke bagian pembahasan, kita perlu mempunyai persepsi yang sama dahulu, mengenai fungsi dan sejauh mana Perusahaan Dagang itu berperan dalam Pembangunan Nasional.

Tulisan ini menyajikan beberapa hal yang mungkin berbeda dari teori-teori ekonomi yang sempurna. Namun kami yakin generasi penerus yang akan mengisi kemerdekaan dan melanjutkan pembangunan bangsa perlu mempelajari sejarah dan pengalaman-pengalaman pendahulu, yang mengkaji dan memahami masalah Perusahaan Dagang di Indonesia dalam kerangka konsep nasional Ekonomi Pancasila yang sedang mencari bentuk dan mekanismenya di dalam kancah percaturan perdagangan internasional yang banyak diwarnai dengan Perusahaan-perusahaan Multinasional (MNC) dewasa ini.

Sebagai perbandingan sesama negara Asia, kita perlu mempelajari pengalaman-pengalaman Jepang, yang sudah tergolong negara yang Perusahaan-perusahaan Dagangnya termaju di dunia. Negara Sakura terdiri dari

kepulauan dan berpenduduk hampir sama dengan Indonesia, tetapi di dalam banyak segi berbeda jauh dengan negara kita. Walaupun Indonesia mempunyai sumber-sumber alam yang lebih kaya dari Jepang, tetapi kenyataan pendapatan nasional per kapita Jepang jauh lebih tinggi, "Sogo Shosha"-nya lebih maju dari kita. "Sogo Shosha" merupakan raksasa-raksasa Perusahaan Dagang yang sangat dominan di dalam percaturan Perusahaan Multinasional di dunia perdagangan internasional dewasa ini. Dari mereka kita perlu belajar, tetapi bukan berarti kita dapat menjiplak sepenuhnya sistem mereka karena belum tentu sesuai dengan alam Pancasila, yang merupakan landasan dari semua sistem dan paham negara Indonesia.

## FUNGSI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAGANG

Perusahaan Dagang yang dimaksudkan dalam tulisan ini, bukan perusahaan yang hanya mendapatkan keuntungan dari jasa mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen, tetapi yang mampu menciptakan efisiensi secara luas, sehingga dapat berkembang menjadi asset nasional yang riil dan mampu menghadapi persaingan internasional. Peranan Perusahaan Dagang dalam perekonomian bangsa adalah kira-kira sebagai berikut:

### Menjembatani Kepentingan-kepentingan Dagang

Karena Perusahaan Dagang mempunyai jaringan-jaringan informasi yang luas di seluruh dunia, dia mampu memperkirakan produksi, teknologi dan "mode" dunia pada masa yang akan datang. Berdasarkan pengamatan yang cermat atas cuaca dan pasar, Perusahaan Dagang akan segera dapat bertindak untuk:

- Menutup kontrak pembelian dengan jumlah yang menguntungkan
- Menutup kontrak pengangkutan dan asuransi yang tepat untuk jumlah tersebut
- Menegakkan keinginan pemerintah, karena telah mempunyai daya saing yang kuat.
- Mengkoordinasi kepentingan produsen dan konsumen sehingga kedua pihak sama-sama menikmati efisiensi.

Kegiatan tersebut sulit dilaksanakan pabrikan yang melakukan transaksi sendiri-sendiri, karena dalam skalanya relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan kemampuan Perusahaan Dagang.



### **Pengembangan Aktivitas-aktivitas Baru**

Perusahaan Dagang dapat mengembangkan perdagangan-perdagangan baru karena menguasai informasi-informasi dunia. Misalnya, Perusahaan Dagang dapat mengorganisasikan fasilitas industri baru untuk menghasilkan bahan-bahan baru dari sumber yang sama sekali baru, karena dapat menciptakan arus perdagangan yang baru dan sanggup memasarkan barang baru tersebut. Sebagai contoh adalah Proyek Asahan yang mengorganisasikan industri penghasil listrik dan dapat menjual hasilnya untuk industri bahan baku aluminium.

### **Sumber Keuangan**

Walaupun Perusahaan Dagang bukan merupakan institusi keuangan yang resmi, namun dalam banyak hal dapat menolong produsen dalam bidang keuangan, misalnya dalam hal:

- Mempercepat kegiatan industri, dengan cara membeli lebih dahulu hasil produksinya.
- Menyediakan bahan-bahan baku untuk jangka panjang sehingga industri tidak akan memikul biaya penyediaan bahan yang tinggi
- Mengadakan kerjasama maakloon/upah kerja saja dengan Perusahaan Dagang sehingga industri tidak memakai modal kerja yang banyak.

### **Mengambil Alih Risiko**

Dengan berdagang bermacam-macam komoditi dengan berbagai negara, dengan modal menguasai segala macam informasi di seluruh dunia, Perusahaan Dagang dapat menghindarkan dan mengalihkan risiko dari satu jenis transaksi komoditi yang telah ditutup dengan transaksi ke lain negara, agar tidak menjadi risiko yang fatal, karena perubahan musim atau keadaan paceklik misalnya. Juga melalui "hedging operation" Perusahaan Dagang dapat menghindarkan perbedaan-perbedaan kurs, dengan cara membeli dan menjual dalam beragam-ragam mata uang internasional yang dominan.

### **Pengembangan Potensi-potensi Baru**

Untuk menghindarkan fluktuasi harga-harga bahan baku, Perusahaan Dagang mampu mengadakan investasi guna menjamin kesinambungan suplai bahan baku dengan cara membiayai lebih dahulu proyek-proyek raksasa baru. Karena pengalaman yang luas Perusahaan Dagang dapat menjamin pemasaran hasilnya kelak. Contohnya Proyek Sumber Energi Matahari guna menjamin stabilitas sumber energi minyak bumi yang terbatas.

## **Perdagangan Lepas Pantai**

Yang dimaksud dengan Perdagangan Lepas Pantai adalah berdagang antar negara tanpa melibatkan negeri sendiri. Jadi mempertemukan kepentingan suatu negara produsen dengan negara konsumen dengan jasa baik negara ketiga. Sebagai contoh Jepang membeli bulu domba mentah Australia dan menjualnya dengan bentuk yang sama ke negara Inggris. Dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan tersebut di atas Perusahaan Dagang adalah salah satu asset potensial nasional yang perlu diorganisasi dan dikembangkan terutama di bidang manajemennya, sehingga dapat mengubah tenaga beli dari calon pembeli menjadi permintaan efektif atas produksi atau jasa tertentu serta memperlancar gerakan produksi atas jasa kepada pemakai akhir. Hal ini penting sekali pada waktu ini terutama dalam usaha menggerakkan atau mengubah perilaku konsumen dari "import-minded" menjadi "cinta barang produksi dalam negeri."

## **FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RUANG GERAK PERUSAHAAN DAGANG**

### **Keadaan Perekonomian**

Perekonomian Indonesia masih tergolong perekonomian yang agraris, karena pendapatan nasional di luar minyak bumi masih sebagian besar diperoleh dari sektor pertanian. Indonesia yang terdiri dari puluhan ribu pulau terbentang dari Sabang sampai Irian Jaya, kaya dengan sumber-sumber alam, indah pemandangannya, dihubungkan dengan laut dan selat yang dalam, merupakan suatu hal yang spesifik dalam mengkaji perdagangannya dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia ini. Indonesia yang berpenduduk  $\pm 165$  juta jiwa pada awal Pelita IV dan dengan pendapatan per kapita rata-rata US\$400/tahun, merupakan pasar yang sangat diperhitungkan di Asia disamping RRC dan India. Tidak mengherankan ketika terbuka kesempatan penanaman modal asing pada Pelita I sampai Pelita III, industri dalam negeri tumbuh seperti jamur di musim hujan, baik dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pada umumnya industri tersebut mencari pasar yang tersedia dan gampang dimasuki, sebagai landasan utama pendiriannya. Sehingga lahirlah segala macam industri di Indonesia yang berorientasi substitusi barang-barang impor, yang merupakan jalan termudah untuk mendirikan industri dengan dalih penghematan devisa negara.

Untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan internasional, beberapa fasilitas dan proteksi berupa "tax holiday," bunga yang rendah dan pembebasan biaya impor atas bahan-bahan penolong, larangan impor ba-



rang-barang tertentu dan penunjukan importir-importir khusus atas beberapa jenis barang impor diberlakukan guna mengatur pasar dalam negeri. Masa itu merupakan jaman keemasan bagi industri dalam negeri karena didukung oleh daya beli masyarakat Indonesia yang tinggi yang disebabkan kenaikan harga minyak bumi, dan sukses pertumbuhan di setiap sektor yang dicapai lebih dari yang diperkirakan semula. Tetapi sayang, maksud pemerintah memberikan proteksi agar industri-industri Indonesia dapat tumbuh bersaing dengan negara-negara yang lebih dahulu maju tidak berhasil sepenuhnya dan kenyataannya, dampak negatifnya yang lebih menonjol. Industri dalam negeri lupa daratan, bukan memanfaatkan keadaan yang baik tersebut, untuk terus mengadakan efisiensi, memperbaiki manajemen dan meningkatkan kemampuan bersaing, malah sebaliknya. Perekonomian malah menjurus ke arah serba mahal, baik industri hulu apalagi industri hilir yang menggunakan bahan baku dari industri hulu yang diproteksi tersebut.

Beban pemerintah dan konsumen makin berat akibat proteksi, sehingga pada beberapa sektor industri, nilai tambah jasa dan tenaga dalam negeri sudah menjadi negatif dibanding dengan barang impor. Dalam kondisi industri semacam inilah kita memasuki resesi dunia, dan krisis minyak bumi. Sehingga pada awal Pelita IV, kita memasuki tahap yang paling krisis baik dari segi persaingan dunia maupun restrukturalisasi dari industri dalam negeri.

Perdagangan dunia dewasa ini penuh proteksi, baik secara langsung maupun terselubung sebagai akibat resesi dunia yang berkepanjangan, sehingga mekanisme perdagangan internasional yang diatur oleh "comparative advantage" suatu negara seakan-akan tidak mampu bekerja lagi. Perubahan orientasi industri dari substitusi impor ke arah "outward looking" atau orientasi ekspor sudah suatu hal yang bukan hanya masalah industri itu sendiri lagi, tetapi merupakan masalah nasional secara keseluruhan, yang penanggulangannya harus dikoordinasikan.

Pada akhir abad ke-20 ini dunia ditandai dengan kekacauan perdagangan luar negeri dengan macam-macam proteksi dan peraturan-peraturan regional yang seakan-akan menghapus prinsip perdagangan bebas. Setiap negara melindungi perekonomiannya dari kehancuran. Berusaha keras mengurangi impor dan memacu ekspor baik secara terang-terangan, maupun terselubung agar terhindar dari defisit neraca pembayaran. Ditambah pula dengan tingkat suku bunga internasional yang tinggi.

Sampai berapa jauh OPEC dapat mengatasi persoalan harga maupun kuota produksi minyak adalah faktor ketidakpastian perekonomian Indonesia di masa depan. Rendahnya tingkat pemulihan perekonomian negara maju akan mempengaruhi ekspor Indonesia. Mudah-mudahan Inpres No. 4 tahun 1985 dapat menolong kelancaran ekspor Indonesia.



## Tingkat Kemajuan Teknologi

Tingkat kemajuan teknologi di Indonesia, masih jauh ketinggalan dari negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura, maupun dari negara MEE. Hal ini jelas terbukti dari penggunaan tenaga asing di sektor industri, terutama industri-industri yang menggunakan teknologi madya, apalagi di sektor industri yang mempergunakan teknologi canggih. Industri otomotif misalnya, masih bersifat assembling, mengimpor peralatan dalam bentuk CKD dan dirakit di Indonesia. Hanya beberapa bagian yang tidak memerlukan teknik tinggi, diproduksi di Indonesia. Di dalam industri farmasi juga masih banyak PMA atau usaha patungan yang menggunakan tenaga asing, atau mengimpor sebagian besar bahan-bahan penting dari luar negeri.

Di dalam negeri masih lebih banyak pekerjaan kemasan saja. Walaupun dalam izin pendiriannya dicantumkan usaha pengalihan tenaga ahli asing secara berangsur-angsur ke tenaga Indonesia, di hampir semua sektor industri hal itu relatif hanya aplikasi teknik tingkat madya saja. Teknik tinggi yang merupakan "patent" atau kunci pemasaran, masih harus diimpor dari negara asal "patent" tersebut. Jadi pada kakikatnya industri dalam negeri baru merupakan hasil penetrasi pasar domestik dari industri patungan agar dapat menembus rintangan-rintangan ekspor yang banyak dilakukan untuk melindungi pasar dalam negeri. Pada bagian lain dalam sektor industri ini, malah ada yang menggunakan peralatan-peralatan bekas yang telah "out of mode," sebagai investasi dalam industri dengan orientasi pemasaran ekspor. Dapat diperkirakan selanjutnya, sampai seberapa jauh daya saing kita di pasaran internasional, walaupun industri-industri sejenis Indonesia mempunyai "comparative advantage," karena mempunyai bahan baku, tenaga kerja yang lebih besar bila dibandingkan dengan negara lain. Tetapi semuanya itu kurang berarti, disebabkan tingkat teknologi yang kurang memadai baik di bidang manusia, peralatan, maupun manajemennya.

## Budaya

Budaya suatu negara merupakan modal besar yang tidak dapat dinilai dalam pembangunan. Cara berpikir "import-minded" tentunya dapat melemahkan perjuangan bangsa. Mencintai produksi dalam negeri, merupakan kekuatan besar dalam memajukan industri dalam negeri. Tidak heran bila kita menggalakkan pemakaian produksi dalam negeri, dan berusaha menumbuhkan budaya yang lebih mencintai hasil prestasi bangsa sendiri, daripada barang-barang canggih hasil produksi orang asing. Disiplin pribadi dan nasional merupakan modal yang tak ternilai harganya dalam pembangunan nasional. Sebagai negara bekas jajahan Belanda selama 350 tahun atau hampir 15



generasi, tentunya dapat dipahami, betapa rusaknya budaya bangsa Indonesia pada tahun-tahun permulaan kemerdekaan 1945. Akibat politik pecah belah Belanda, suku-suku diadudomba, dan perbedaan-perbedaan antara suku dipertajam sedang kesamaannya dihilangkan, bangsa Indonesia pada saat itu menjadi mudah curiga pada bangsa sendiri, dan mengagung-agungkan yang berbau Belanda. Hal ini berbekas hingga generasi sekarang ini, di mana yang berbau Barat (impor) dianggap lebih baik. Diharapkan "import-minded" ini akan berkurang sesuai dengan perkembangan teknologi Indonesia di generasi kedua setelah kemerdekaan pada akhir abad ke-20 ini, atau sebagai hasil pembangunan utama, yaitu hasil sistem pendidikan nasional yang terarah. Dalam hal ini keberhasilan akan banyak tergantung pada kemampuan para ahli di bidang "marketing management" dalam mengelola Perusahaan Dagang.

## Politik Pemerintah

Garis-garis Besar Haluan Negara menyatakan antara lain:

"Untuk meningkatkan pembangunan nasional partisipasi masyarakat perlu lebih ditingkatkan. Dalam hubungan ini dilanjutkan dengan usaha pemerintah dalam mengembangkan dunia usaha nasional, kerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selanjutnya didorong pemerataan kesempatan berusaha serta kerjasama yang serasi antara usaha negara, koperasi dan usaha swasta."

"Usaha-usaha untuk meningkatkan kewiraswastaan, keahlian dan kemampuan dunia usaha nasional perlu dilanjutkan agar usaha nasional makin meningkat kekuatan dan daya saingnya, sehingga pengalihan usaha swasta asing ke swasta nasional dapat makin dipercepat."

Dengan sendirinya pernyataan-pernyataan politik yang dikutip di atas disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang senantiasa berkembang. Perdagangan bebas, kiranya tidak bertentangan dengan konsep ekonomi Pancasila dan ini terlihat dari sistem ekonomi terbuka, di mana kontribusi perdagangan internasional terhadap pendapatan nasional cukup besar di Indonesia. Oleh karena itu dapat dimengerti kalau tekanan dalam pembangunan nasional kita di masa mendatang, cukup berat pada pengembangan ekspor non-migas terutama komoditi hasil industri manufaktur.

Kenyataan bahwa di dalam pasar internasional kita harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan multinasional (MNC) yang mewakili organisasi, teknologi finansial, kemampuan ekonomi serta informasi pasar yang luas, komprehensif dan up-to-date. Oleh karena itu, kita perlu membentuk konsep yang dapat menghimpun semua potensi dari swasta, koperasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), agar benar-benar dapat merupakan asset nasional yang tangguh dan efektif. Keinginan pemerintah untuk itu jelas terlihat dari Keppres dan Inpres yang lahir untuk menghilangkan segala hambatan dan birokratis yang melestarikan daya saing kita di pasaran internasional.

Peraturan perundang-undangan meminta perdagangan dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan Pancasila, di mana prinsip Wawasan Nusantara harus dipertahankan. Selain mengejar prinsip pertumbuhan yang tinggi, segi pemerataan tidak dapat diabaikan. Seluruh penduduk yang tersebar dari Pulau Sabang sampai Irian Jaya harus dapat menikmati pelayanan dan harga-harga yang tidak terlalu berbeda, dan Kepulauan Indonesia harus merupakan satu kesatuan wilayah perdagangan.

Stabilitas yang mantap, juga merupakan pendorong pertumbuhan perdagangan antar negara, sehingga keragu-raguan atas keamanan investor asing dapat dihindarkan. Mantapnya politik dan keamanan nasional memberikan kepastian berusaha dan gairah pertumbuhan yang dinamis di segala sektor. Hubungan luar negeri dengan semua bangsa-bangsa di dunia ini yang terpelihara baik, memungkinkan lancarnya perdagangan luar negeri. Dibukanya hubungan perdagangan langsung dengan RRC memberi suatu harapan makin luasnya pasaran internasional bagi hasil produksi dalam negeri.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Trilogi Pembangunan serta keselarasan pertumbuhan yang saling menunjang antara usaha negara, koperasi dan usaha swasta merupakan landasan pemikiran dalam memajukan pembangunan di segala bidang, tidak terkecuali di sektor perdagangan. Selain itu, semakin besar pula peranan Tim Keppres 10, sebagai salah satu mekanisme pemerintah untuk memajukan pengusaha nasional, khususnya dari kalangan ekonomi lemah. Pengusaha asing dan pengusaha nasional memberikan tanggapan yang bertolak belakang mengenai dampak peranan Tim Keppres 10 ini. Banyak pengusaha swasta asing, terutama yang sudah lama berusaha di Indonesia, menerima keadaan ini sebagai suatu yang wajar mengingat meluasnya gelombang nasionalisme ekonomi di seluruh dunia dewasa ini, baik di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang.

Undang-undang Perpajakan yang baru masih akan mempengaruhi prospek Perusahaan Dagang dalam masa penyesuaian tahun-tahun yang akan datang.

Faktor penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran mendapat tekanan khusus dalam pertimbangan jenis-jenis investasi yang diprioritaskan dan hal ini sangat mewarnai industri-industri dan Perusahaan Dagang di masa depan.

## ANALISA

Dari uraian-uraian di atas, dapat dibuat inventarisasi apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita.



## **Keadaan Perekonomian**

Hal-hal yang menguntungkan ialah:

- Sumber daya alam yang sangat kaya, hasil tambang, laut, hutan, gas alam, sinar matahari dan tanah yang subur.
- Pemandangan alam yang indah-indah.
- Penduduk yang melimpah.

Beberapa hal yang kurang menguntungkan dilihat dari keadaan perekonomian kita:

- Pendapatan nasional dan tabungan nasional yang masih rendah, mengakibatkan biaya modal sangat mahal.
- Adanya proteksi-proteksi dan subsidi pemerintah, mengakibatkan keadaan perekonomian Indonesia menuju biaya tinggi. Sangat dirasakan industri hulu yang tidak efisien.
- Biaya yang tinggi juga terasa dalam bidang pemasaran.
- Merajalelanya Perusahaan Multinasional di Indonesia.

## **Tingkat Teknologi**

Hal-hal yang menunjang perkembangan dan kemajuan teknologi di Indonesia belum ada yang dapat dikemukakan secara menonjol. Namun negara kita sudah dapat digolongkan negara yang menggunakan teknologi maju di bidang komunikasi. Hal ini sangat penting untuk kelancaran informasi.

Kelemahan-kelemahan yang kita jumpai berkenaan dengan tingkat teknologi antara lain:

- Rendahnya kemampuan tenaga kerja, mengakibatkan produktivitas yang rendah di setiap sektor.
- Peralatan; teknologi serta ketrampilan teknis yang masih ketinggalan di samping relatif "economy of scale" yang belum tercapai.
- Manajemen, khususnya dalam proses produksi komoditi-komoditi ekspor tertentu masih belum cukup efektif.
- Kekurangan kemampuan mengumpulkan data pasar internasional serta menganalisisnya untuk mengetahui trend pasar internasional.

## **Budaya**

Faktor-faktor yang menguntungkan dari budaya kita antara lain tingginya rasa kekeluargaan yang memberikan rasa kebersamaan dan semangat gotong

royong yang tinggi. Adanya kesatuan bahasa pengantar di seluruh wilayah Nusantara mengakibatkan komunikasi antar penduduk lancar.

Faktor-faktor yang kurang menggembirakan dari budaya kita antara lain: masih tebalnya "import minded" di kalangan orang-orang mampu Indonesia; disiplin yang masih sangat rendah, hampir di setiap bidang; manajemen keluarga yang kurang dapat menerapkan "profesionalisme," sehingga sulit menerapkannya dalam lingkup usaha yang lebih luas dalam skala internasional.

### **Politik Pemerintah**

Hal-hal yang menggembirakan dari politik pemerintah antara lain:

- Stabilitas nasional yang mantap di seluruh wilayah Nusantara.
- Hubungan luar negeri yang baik untuk setiap negara.
- Politik Ekonomi Terbuka
- Konsep Ekonomi Pancasila dapat diterima setiap lapisan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan paham perdagangan internasional.

Sedangkan hal-hal yang merupakan kendala antara lain:

- Sifat birokratis, peraturan dan kepastian hukum yang tidak menentu merupakan sumber tindakan spekulatif yang tidak menguntungkan dunia usaha.
- Sifat ketergantungan pengusaha kepada pemerintah.
- Kemampuan untuk melakukan promosi yang kreatif dan konseptual sangat terbatas oleh pandangan yang kurang strategis dari pengusaha dan pemerintah, di samping diperlukannya komitmen finansial yang cukup besar.

Setelah melihat kekuatan-kekuatan kita, serta mempertimbangkan faktor-faktor kelemahan daya saing kita di pasaran internasional dan mengingat pentingnya hasil devisa untuk pembangunan maka mau tidak mau kita harus segera mengubah kebijaksanaan kita ke arah outward looking. Mengenai kebijaksanaan outward looking, saya mensitir pendapat Tanri Abeng yang dikemukakan dalam seminar mengenai proteksi yang diselenggarakan *Sinar Harapan*. Tanri Abeng antara lain mengemukakan, bahwa yang perlu kita renungkan adalah sebagai berikut:

"Outward Looking harus dilihat sebagai suatu issue yang strategis dan oleh karenanya pendekatannya pun harus konseptual strategis dengan pengarah yang didasari oleh pertimbangan-pertimbangan kepentingan essential jangka panjang. Sifat strategis ini melibatkan kebijaksanaan nasional serta penentuan prioritas yang tepat. Misalnya: apakah prioritas utama ditujukan kepada penanganan pemasaran melalui pembentukan lembaga ekspor nasional, ataukah prioritas utama justru perlu membenahan sektor produksi yang melibatkan restrukturisasi industri pengelolaan komoditi-komoditi ekspor.



Pemilihan prioritas yang mana pun, strategi pengembangannya harus berorientasi kepada konsep pembentukan kekuatan ekonomi nasional jangka panjang yang mantap, karena *short cut approach* tidak akan menyelesaikan permasalahan. Mungkin suatu studi ataupun penelitian masih diperlukan untuk menunjang pengembangan kebijaksanaan yang strategis tetapi cukup pragmatis-realistis dipandang dari sudut penerapannya secara mikro. Masalah yang timbul sebagai konsekuensi dari pendekatan strategis ini adalah komitmen dana untuk investasi serta kemungkinan pengorbanan hasil-hasil jangka pendek untuk mencapai sasaran-sasaran jangka panjang yang mantap. Konsekuensi semacam ini terkadang kurang populer dari kacamata birokrat yang condong berorientasi taktis jangka pendek. Melihat faktor-faktor yang melemahkan daya saing internasional kita, tampaknya harapan yang lebih cerah akan tampak kalau kita dapat mengembangkan produksi/industri yang dapat memanfaatkan kekayaan alam dan yang dapat dimobilisasi dengan biaya relatif lebih murah. Ini dapat berarti bahwa prioritas pengembangan industri untuk ekspor harus berorientasi kepada sektor industri pertanian dan pengolahannya maupun sektor jasa pariwisata. Mengingat potensi nasional yang kita miliki, yang menjadi masalah dalam hal ini adalah: bagaimana kita dapat merealisasi dan memanfaatkan "potensi" ini, mengingat adanya beberapa *business constraints*.

Pertama, investasi di sektor pertanian dan industri pertanian memerlukan modal yang relatif besar di samping jangka waktu pengembalian modal serta resiko yang relatif besar. Kedua, sebagaimana halnya dengan industri manufaktur, agribisnis industri pun memerlukan "manajemen" yang spesifik yang belum kita kuasai. *Plantation management* pun baru terdapat pada perusahaan-perusahaan negara yang efisiensinya masih perlu dipertanyakan. Dalam hubungan ini kiranya kebijaksanaan penanaman modal dapat diarahkan untuk merangsang modal maupun manajemen software asing untuk memilih Indonesia yang sekaligus dapat membuka jalur pemasaran internasional.

Adalah sangat penting disadari bahwa di dalam pemasaran internasional kita harus bersaing dengan Perusahaan Multinasional (MNC) yang besar yang memiliki keunggulan organisasi, teknologi, finansial, *economy of scale*, serta *market information* yang luas, komprehensif dan up-to-date. Oleh karena itu kita perlu memikirkan pembentukan lembaga pengembangan ekspor yang dapat menggabungkan kekuatan di bidang produksi dan jasa pada satu organisasi pengambilan keputusan, seperti halnya dengan konglomerasi perusahaan besar di Jepang. Ini berarti bahwa sektor produksi harus bersatu dengan sektor jasa, seperti asuransi, perbankan, pengangkutan dengan lembaga pemasarannya yaitu Perusahaan Dagang. Hal ini sangat penting karena dalam perdagangan internasional sangat dibutuhkan fleksibilitas di bidang pricing yang banyak ditentukan oleh kebijaksanaan pengambilan keuntungan (*profit-policy*) dari setiap komponen dalam mata rantai organisasi konglomerasi ini (contoh, Jepang dengan *penetration pricing policy*). Konsep ini kedengarannya tidak sulit untuk dilaksanakan, akan tetapi pada prakteknya diperlukan pengelolaan ataupun manajemen yang berorientasi kepada pandangan-pandangan "profesionalisme." Kalau pada unit-unit usaha yang lebih kecil dan sederhana pun efisiensi belum dapat dicapai, maka pada organisasi yang besar jelas diperlukan kemampuan manajemen yang cukup baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Belum lagi diperlukannya keputusan politik yang menyangkut pembagian porsi antara negara (BUMN). Koperasi dan swasta di dalam peranannya masing-masing dalam menunjang pembangunan ekonomi sesuai dengan konsep Ekonomi Pancasila kita. Dari segi pandangan manajemen, isu sentral sesungguhnya tidak terletak pada pembagian porsi, tetapi bagaimana sektor-sektor usaha ini (BUMN), koperasi dan perusahaan-perusahaan swasta diatur dikelola melalui mobilisasi dana dan daya (*resources*) secara efektif sehingga "potensi" yang kita miliki benar-benar dapat dikembangkan menjadi asset nasional yang riil dan mampu menghadapi persaingan internasional."



Sekarang bagaimana dengan lembaga-lembaga dagang kita. Dapatkah lembaga-lembaga itu menunjang keinginan kita untuk bisa melaksanakan tugas memperbesar volume ekspor? Dengan terus terang penulis berpendapat: belum, walaupun sudah ada embrio ke arah itu. Kita telah mempunyai kelompok usaha yang cukup tangguh seperti: Bogasari, Dharmala, Gunung Sewu, Bakrie Brothers, Astra, Tiga Raksa, dan kita boleh berbangga dengan adanya mereka itu. Grup tersebut masih mempunyai ciri khas yaitu perusahaan keluarga. Memang sudah ada usaha memisahkan antara pemilikan dan manajemen. Namun mereka belum bisa menyaingi Perusahaan Multinasional terutama Jepang yang mempunyai puluhan bahkan ratusan cabang di seluruh dunia. Tindakan ke arah itu sudah ada dengan mendirikan cabang di luar negeri melalui pembelian perusahaan-perusahaan di negeri tertentu. Ini memang merupakan jalan pintas yang bijaksana. Maka prospek untuk Perusahaan Dagang di Indonesia masih cukup cerah. Yang perlu keterpaduan pemerintah dan swasta harus benar-benar terasa hingga terbentuk "Indonesia Incorporated."

Hal lain yang perlu dipikirkan ialah sistem pendidikan. Penulis setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa: siapa yang menguasai teknologi, maka ialah yang menguasai dunia. Maka kiranya kita bersama harus dapat memikirkan sistem apa yang terbaik bagi Indonesia bila tidak ingin ketinggalan dengan negara-negara lain.

Akhirnya penulis berpendapat, rata-rata tidak ada pengusaha yang berani mengemukakan bahwa pada tahun 1985, keadaan perekonomian akan membaik. Bahkan ada yang merasakan bahwa keadaan akan tetap lesu hingga tahun 1986 dan 1987. Sementara itu tertekannya keadaan ekonomi, terbatasnya kesempatan kerja, dengan segala dampak sosial ekonominya, tidak akan mengubah perasaan khawatir dunia usaha menjadi optimis.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan dan uraian-uraian di atas dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Perusahaan Dagang itu adalah asset potensial nasional yang berdaya guna dalam memajukan perekonomian Indonesia.
2. Bahwa prospek Perusahaan Dagang di Indonesia tidak hanya dipengaruhi tingkat teknologi dan sumber daya alam, tetapi semua faktor-faktor lingkungan perdagangan itu baik budaya maupun politik pemerintah mempunyai pengaruh yang tidak terpisahkan demi kemajuan Perusahaan Dagang.



3. Bahwa prospek Perusahaan Dagang di Indonesia tidak dapat dikatakan cerah, mengingat situasi perdagangan masih simpang-siur, dan sengitnya persaingan-persaingan dari perusahaan-perusahaan multinasional yang telah lebih dahulu menguasai pasar, dan diperkirakan keadaan seperti ini akan berlanjut hingga tahun 1986 dan 1987.
4. Bahwa struktur dan pola perindustrian dari "inward looking" perlu berubah menjadi "outward looking" guna memperluas pasaran Perusahaan Dagang itu sendiri.
5. Bahwa perlu juga diadakan refungsionalisasi dari lembaga-lembaga yang ada, agar ditujukan kepada kemampuan daya saing yang optimal baik Perusahaan Dagang yang ada, lembaga-lembaga keuangan, asuransi, pendapatan, tidak terkecuali lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk politik luar dan dalam negeri.
6. Kemantapan stabilitas nasional yang dinamis, merupakan faktor yang sangat menguntungkan di dalam sejarah pertumbuhan perekonomian negara.
7. Harapan lebih cerah dengan menggalakkan industri/produksi yang memanfaatkan kekayaan alam yaitu sektor pertanian dan jasa pariwisata.
8. Prospek Perusahaan Dagang di Indonesia sangat tergantung juga atas sukses tidaknya sistem pendidikan nasional yang akan melahirkan generasi-generasi penerus yang berdisiplin tinggi, trampil, yang pada gilirannya kelak melahirkan kader-kader profesional yang tangguh di segala bidang.
9. Bahwa prospek Perusahaan Dagang di Indonesia pada periode Pelita IV ini, sangat tergantung kepada berhasil tidaknya suatu "Indonesia Incorporated" dibentuk, guna menggalakkan perdagangan, ekspor, sehingga tidak terdapat kesimpangsiuran dan birokrasi yang merupakan kendala dalam rangka menggalakkan ekspor non-migas. Sebab dari kenyataan pengalaman PT Pantja Niaga, salah satu Perusahaan Dagang di Indonesia, kemajuan di bidang perindustrian, belum tentu memajukan pihak Perusahaan Dagang bila tanpa koordinasi yang baik.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Dwyono Chandradhy, *Marketing Strategies in Indonesia. A Comparative Study*.
- Djukardi Odang, *Prospek Dunia Bisnis Indonesia Dekade 80'an*, Jakarta, 10 Februari 1982.
- Djukardi Odang, *Bantuan Pemasaran Untuk Pengusaha Kecil*, Jakarta, 1985.
- Jetro Marketing Series, "The Role of Trading Companies in International Commerce 1983."
- Redaksi Ekonomi Harian Kompas, "Mencari Bentuk Ekonomi Indonesia," *Perkembangan Pemikiran 1965-1981*, PT. Gramedia, Jakarta.

# **Singapura Menghadapi Masa Peralihan dari Pertumbuhan Ekonomi Pesat ke Ekonomi Lambat**

J. PANGLAYKIM

## **PENGANTAR**

Pada waktu impor Amerika dalam tahun 1984 meningkat, banyak negara industri, termasuk negara-negara industri baru (NICs) dan negara-negara sedang berkembang, memetik manfaat dari peningkatan tersebut. Peningkatan impor Amerika itu menurut pendapat beberapa analis dapat mengakibatkan negara-negara industri baru (NICs) dan Eropa Barat menjadi tawanan (hostage) dari turun-naiknya perekonomian Amerika. Tetapi tampaknya negara-negara tersebut tidak melihat pilihan lain karena sulitnya mencari pasar demikian besar seperti Amerika. Jepang sejak beberapa tahun terakhir telah melakukan investasi dalam jumlah yang cukup besar antara lain untuk mempertahankan bagian pasarnya di negara tersebut serta menarik manfaat dari adanya teknologi canggih. Mereka "terpaksa" melakukan investasi dan beroperasi di Amerika karena melihat kecenderungan penerapan langkah-langkah proteksionisme. Jepang dewasa ini sudah menjadi negara pengeksport modal.

Di antara NICs, mungkin Singapura yang paling besar memetik manfaat dari peningkatan impor Amerika tersebut yakni peningkatan sebesar 17-20%. Tetapi dewasa ini, perekonomian Singapura berada dalam kesulitan karena harus menyesuaikan diri dari pertumbuhan pesat (lebih dari 10% GNP) ke pertumbuhan lambat (antara 3-5%). Beberapa sektor kegiatan perekonomiannya bukan saja akan mengalami pertumbuhan zero, mungkin juga minus.

Tulisan ini akan berusaha mengupas beberapa aspek perkembangan perekonomian Singapura yang sudah harus mengurangi "kecepatan" pertumbuhannya.



## SINGAPURA: DARI SUDUT RISIKO

*Asian Business* (September 1985) membuat suatu analisa mengenai risiko negara-negara yang dilihat dari berbagai sudut. Majalah itu memberikan 5 bintang kepada suatu negara yang tergolong sebagai hampir tidak ada risiko dan Singapura "diberi" 4 bintang.

Alasan memberikan negara ini 4 bintang ialah:

1. Tidak adanya ancaman dari luar terhadap pertahanan dan keamanan negara ini.
2. Hubungan dengan negara-negara ASEAN, seperti Indonesia dan Malaysia baik sekali.
3. Diperkirakan hubungan dengan RRC akan terus meningkat, meskipun hubungan diplomatik belum mungkin terwujud dalam waktu dekat.
4. Di dalam negeri, terlihat keserasian antara kelompok-kelompok etnik dan agama.
5. Ketegangan politik yang timbul pada waktu pemilihan umum tahun 1984, tampak telah mereda.
6. Sikap pemerintah terhadap partai-partai oposisi tampak "mendua" (ambivalen) dan ini dapat menimbulkan insiden ... yang dapat mengancam kestabilan politik di dalam negeri bila perekonomian mulai melambat. Karena bila mereka yang diberhentikan dari pekerjaan dan tidak mempunyai pekerjaan lagi dan turun ke jalan, maka ini dapat menimbulkan guncangan. Penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup drastis itu memaksa Pemerintah Singapura mengambil kebijaksanaan yang bertujuan menimbulkan iklim bisnis yang lebih baik. Langkah-langkah penurunan/pengurangan tingkat upah seperti ditetapkan oleh NWC (badan nasional untuk menentukan upah) dengan melepaskan bimbingannya dan menyerahkannya kepada kekuatan mekanisme pasar, dan pajak-pajak antara pajak latihan ketrampilan yang ditujukan sebagai dana pengembangan ketrampilan, penurunan tarif telekomunikasi dan ongkos-ongkos lain, diharapkan dapat membantu menurunkan harga pokok. Pajak perseroan belum diturunkan dari 40%. Diperkirakan Pemerintah Singapura, dalam waktu dekat, akan mengeluarkan laporan ekonomi yang dibuat oleh suatu satuan tugas yang diketuai oleh B.G. Lee Hsien Loong, Menteri Negara Urusan Perdagangan dan industri.

## POLA PERDAGANGAN SINGAPURA

Impor negara ini dalam tahun 1984 yang berjumlah S\$61.133,6 juta itu terdiri dari:

1. Mesin dan alat angkut	31,7%
2. Bahan bakar	27,7%
3. Barang-barang manufaktur	13,1%
4. Barang-barang manufaktur lain	6,8%
5. Bahan makanan	6,8%
6. Bahan kimia	5,0%

Pensuplai barang-barang tersebut ialah:

1. Jepang	18,3%
2. Amerika	14,6%
3. Malaysia	12,3%
4. RRC	4,7%
5. Jerman Barat	2,7%

Dalam angka-angka tersebut tidak dimasukkan impor dari Indonesia dalam bentuk produk-produk yang diekspor kembali seperti karet dan lada sehingga Indonesia tidak termasuk sebagai salah satu pensuplai penting bagi Singapura. Demikian juga dalam angka ekspor negara tersebut yang berjumlah S\$51.340 juta dalam tahun yang sama yang terdiri dari:

1. Mesin dan alat angkut	32,8%
2. Bahan bakar	25,6%
3. Barang-barang manufaktur	7,0%
4. Bahan-bahan mentah	6,6%
5. Barang-barang manufaktur lain	6,6%
6. Bahan makanan	5,6%

Pasar terpenting bagi ekspor tersebut ialah:

1. Amerika	20,0%
2. Malaysia	14,1%
3. Jepang	9,3%
4. Hongkong	6,2%
5. Muangthai	4,7%

(Sumber: *Asian Business*, September 1985).

Sebagai perbandingan kami ajukan juga angka-angka ekspor Singapura yang dikumpulkan oleh *Far Eastern Economic Review*, 26 September 1985:

	1975		1984	
	S\$ milyar	%	S\$ milyar	%
1. Amerika	1,8	13,9	10,3	20,0
2. Malaysia	2,2	17,1	8,3	16,2
3. EEC	1,8	14,0	5,0	9,7
4. Jepang	1,1	8,7	4,8	9,4
5. Negara Asia Barat	0,7	5,0	3,4	6,6
6. Negara lain	5,3	41,3	19,5	38,0



Dari angka-angka ekspor mesin dan alat angkut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hampir seluruhnya berasal dari impor negara tersebut dan diekspor kembali ke Indonesia dan Malaysia.

Untuk tahun 1985 diperkirakan impor dan ekspor Singapura akan berjumlah S\$66.600 juta dan S\$56.600 juta, tetapi angka-angka tersebut mungkin harus disesuaikan kembali melihat turunnya impor dari Amerika dan tindakan pemerintah negara tersebut dalam rangka menggalakkan ekspornya.

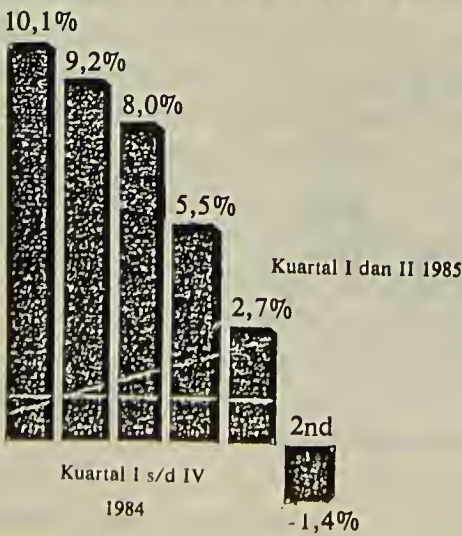
Yang termasuk komoditi-komoditi ekspor utama Singapura ialah:

	1975	1984
1. Bahan bakar mineral	27,0%	25,7%
2. Bahan-bahan kimia	3,7%	4,8%
3. Barang-barang manufaktur	8,5%	7,0%
4. Mesin dan alat angkut	22,7%	32,8%
5. Barang-barang manufaktur lain	6,9%	6,6%

(Sumber: Far Eastern Economic Review, 26 September 1985).

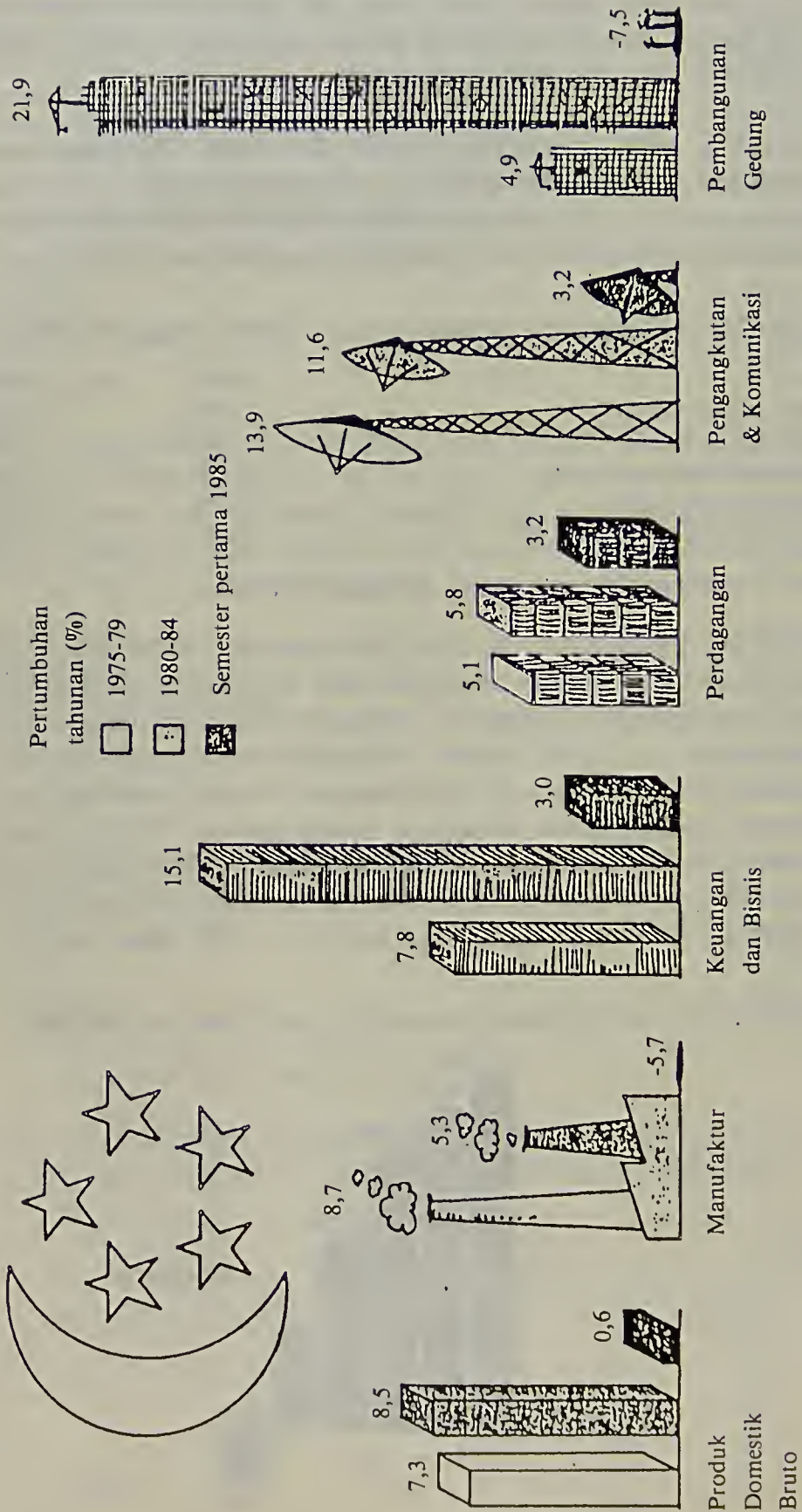
Dari pola perdagangan di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa perdagangan (ekspor dan impor) Singapura dan Amerika telah mencapai 35% dari jumlah perdagangan Singapura, sehingga tidak mengherankan bila perekonomian negara tersebut sangat terpengaruh oleh naik dan turunnya perekonomian Amerika. Dalam kuartal pertama tahun 1984 misalnya, tingkat pertumbuhan perekonomian Singapura masih sekitar 10,1%, tetapi dalam kuartal-kuartal berikutnya turun sampai mencapai 5,5%. Dalam kuartal pertama tahun 1985 persentase pertumbuhan itu semakin kecil yakni 2,7% dan bahkan pada kuartal kedua turun lagi menjadi -1,4% (lihat tabel di bawah ini).

PERTUMBUHAN EKONOMI SINGAPURA PER KUARTAL 1984-1985



Sumber: Asian Finance, 15 September 1985.

ANATOMI MENURUNNYA EKONOMI SINGAPURA



Sumber: Asia Week, 23 Agustus 1985.



Penurunan tingkat pertumbuhan perekonomian negara ini dapat pula dibaca dalam analisa yang dibuat oleh *Asia Week* (23 Agustus 1985) yang berjudul "Anatomi Penurunan Berbagai Sektor Ekonomi 1975-1985."

Pertumbuhan dalam tahun-tahun 1975-1979 adalah 7,3%, dalam tahun-tahun 1980-1984 naik 8,5%, sedangkan dalam tahun 1985 0,6%. Bila diperhitungkan secara rata-rata, pertumbuhan perekonomian Singapura, selama tahun-tahun 1965-1983 ialah 7,8%. Enam bulan yang lalu, Perdana Menteri Singapura bahkan masih memperkirakan bahwa pertumbuhan perekonomian negaranya antara 5-7%. Ternyata perkiraan tersebut meleset dan ini disebabkan perekonomian Amerika tidak membantu perekonomian Singapura sebagai akibat penurunan kegiatan-kegiatan di negara Paman Sam itu sendiri. Proyek-proyek bangunan baru hampir tidak ada, sektor pembuatan dan reparasi kapal mengalami kelesuan, dan penurunan kegiatan juga dialami oleh sektor-sektor pengeboran minyak, penyulingan minyak, dan petrokimia. Perdana Menteri Singapura menyatakan bahwa Singapura mengalami kelebihan kapasitas dalam tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu sektor ini harus direstrukturisasi, demikian Perdana Menteri Singapura.

## PESIMISME

Melambannya pertumbuhan perekonomian Singapura telah menimbulkan sikap pesimis terhadap perekonomian dan bisnis di negara tersebut. Keluh kesah terdengar dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari supir taksi, sampai ke penjual di pasar-pasar dan di toko-toko misalnya. Hotel-hotel sudah memutuskan untuk menutup 30% daripada kamar-kamar. Suatu survei yang dilakukan *Asian Finance* memperlihatkan bahwa kalangan pengusaha dan bisnis berpendapat bahwa kelesuan ini masih akan harus dihadapi dalam tahun-tahun mendatang. Kegiatan-kegiatan dalam pemrosesan rotan, penggergajian kayu, pembuatan/penjualan bahan-bahan bangunan, penjualan mesin-mesin elektrik dan elektronik, tekstil, sepatu/sandal, pakaian jadi, sangat menurun. Sektor manufaktur misalnya turun 2,4%, bahkan sektor barang-barang elektronik dapat dikatakan hampir berhenti. Ini disebabkan permintaan dari Amerika sangat berkurang. Tidak usah disinggung lagi sektor-sektor kegiatan lain seperti perkapalan, alat-alat angkut, bahan bakar, produk-produk logam, karena sektor-sektor ini pun mengalami kelesuan. Sektor pembuatan kapal dan penyulingan minyak yang dianggap sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian Singapura, dewasa ini ikut berada dalam keadaan "ciut." Bahkan suatu studi yang dilakukan oleh para konsultan menyatakan bahwa kapasitas pembuatan kapal (perusahaan galangan kapal) sebaiknya dihapus setengah. Pasar surat-surat berharga pun, tidak urung, berada di ambang keruntuhan sedangkan uang yang tertanam dalam

sektor kegiatan tersebut cukup banyak. Sektor pembiayaan tidak lepas dari penurunan kegiatan dari 11,9% (dalam tahun 1984) menjadi hanya 3,8% dalam tahun 1985.

Faktor-faktor yang menyebabkan kelesuan dan penurunan kegiatan itu bersifat eksternal, internal, struktural dan "siklikal." Faktor-faktor yang kami ajukan di atas bersifat eksternal yakni pasar internasional yang sedang berada dalam proses perubahan.

Dalam karya Kenichi Ohmae, "Triad Power, The Coming Shape of Global Competitions," (*The Free Press*, 1985), kita membaca bahwa pasar internasional sedang terpusat pada tiga kekuatan ekonomi yakni perekonomian Jepang, Amerika, dan negara-negara MEE. Konsumen di tiga negara itu tampak sedang beralih dan bersama-sama menuju ke suatu selera yang sama yakni ke produk-produk berteknologi tinggi/canggih. Tidaklah mengherankan bila produk-produk tiga kelompok negara itu saling memasuki pasar-pasar mereka dan ini pula yang menyebabkan produk-produk Singapura yang juga telah berteknologi tinggi itu kurang dapat bersaing dengan produk-produk tiga negara tersebut dalam menembus pasar negara-negara tersebut. Tampaknya faktor-faktor eksternal merupakan kendala cukup serius bagi produk-produk Singapura walaupun produk negara ini pun tidak kalah memiliki teknologi yang tinggi/canggih.

Selain faktor-faktor eksternal, faktor-faktor internal tidak kecil pengaruhnya bagi penurunan tingkat pertumbuhan perekonomian negara Singapura. Ini sangat dirasakan oleh para perusahaan/industrialis Singapura. Tidak adanya sumber-sumber alam menyebabkan para pengusaha/industrialis harus menciptakan keunggulan-keunggulan komparatif yang tergolong buatan manusia. Tetapi proses penciptaan keunggulan komparatif itu tidaklah mudah karena faktor biaya di sini memainkan peranan sangat penting. Pemakaian tenaga-tenaga ahli menyebabkan tingginya biaya penciptaan keunggulan komparatif itu dan biaya itu, mau atau tidak mau, harus dipikul oleh masyarakat. Dana Pengembangan Ketrampilan misalnya diperoleh dari pajak sebesar 2% dari gaji. Bagi pekerja yang tingkat gajinya rendah pemotongan pajak sebesar 2% sudah sangat terasa.

Potongan 25% untuk sumbangan "Central Provident Funds" dianggap cukup berat oleh pengusaha. Potongan ini berbentuk tabungan paksaan karena CPF baru dapat diambil oleh para pekerja setelah ia mencapai umur tertentu (kalau tidak salah setelah 55-60 tahun).

Pajak perusahaan sebesar 40% dan tarif sewa rumah dan sewa kantor yang tinggi menjadikan Singapura tergolong sebagai tempat usaha dengan biaya



yang tinggi. Kendala-kendala ini masih ditambah dengan kendala yang bersifat non-ekonomis dan tidak terlihat, seperti perilaku para petugas di sektor perbankan yang oleh kalangan tertentu dianggap kurang simpatik bahkan masih terlihat congkak. Kelompok teknokrat yang dibesarkan dalam lingkungan yang serba ada, memperoleh pendidikan di luar negeri, dan dalam usia yang relatif muda telah menduduki jabatan cukup tinggi ini tampaknya belum memperlihatkan sikap dewasa dalam tingkah lakunya.

### PEMERINTAH DALAM BISNIS: SINGAPURA INCORPORATION

Faktor lain yang juga merupakan kendala ialah ikut sertanya sektor pemerintah dalam sektor kegiatan swasta sehingga dilihat menjadi pesaing sektor swasta. Dalam tabel yang diambil dari *Asian Banking*, September 1985, terlihat perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Pemerintah Singapura melalui berbagai "holding." Tiga holding terbesar ialah Temasek, Shengli dan MND. Melalui "holding" itu Pemerintah Singapura giat di sektor-sektor manufaktur, petrokimia, perdagangan, jasa keuangan (dengan Development Bank of Singapore/DBS yang terbesar), perkapalan, pelayaran, penerbangan (Singapore Airlines) misalnya. Perusahaan-perusahaan milik pemerintah ini sering menjadi pesaing/penghambat sektor usaha misalnya dalam usaha memenangkan suatu "tender."

Tetapi beberapa di antara perusahaan-perusahaan pemerintah tadi seperti Keppel Shipyard yang pernah mengalami masa jaya, dewasa ini berada dalam keadaan sulit bahkan suatu konsultan luar negeri mengusulkan agar sebagian besar perusahaan galangan kapalnya ditutup. Kerugian yang diderita oleh perusahaan galangan kapal ini dalam tahun 1984 sekitar S\$118 juta padahal dalam tahun 1983 masih mendapat keuntungan sebesar S\$54 juta.

Dalam situasi seperti ini, para perencana dan penentu kebijaksanaan ekonomi belum mencapai kata sepakat mengenai penswastaan perusahaan-perusahaan milik negara. Para bankir dan pengelola dana ingin melihat lebih banyak usaha milik negara masuk ke dalam bursa sehingga ini dapat meningkatkan kegiatan. Tetapi di pihak lain ada yang berpendapat bahwa hal itu dapat lebih menyulitkan bursa dan pasar uang dan modal nasional yang memang sudah lesu.

Pemerintah Singapura telah menyinggung penswastaan tersebut seperti tercermin dalam kata-katanya (*Asian Banking*, September 1985):

1. Menjadikan perusahaan-perusahaan negara sebagai perusahaan yang terdaftar di bursa bila keadaan telah memungkinkan.

2. Menjual saham perusahaan yang tidak dikontrol secara efektif oleh pemerintah.
3. Mendaftarkan perusahaan-perusahaan besar untuk kepentingan negara dengan pemerintah tetap memegang saham mayoritasnya.

Pemerintah Singapura memiliki lebih dari 450 perusahaan, 60.000 pegawai, modal yang dibayar sekitar S\$2,4 milyar (1983), aktiva tetap sebesar S\$18 milyar, dan volume penjualan secara keseluruhan sebesar S\$8 milyar. Dengan demikian usaha-usaha sektor pemerintah dapat dikatakan sebagai konglomerat. Singapore Airlines misalnya sedang menyiapkan pemasukan saham-sahamnya sebesar lebih kurang S\$500 juta ke dalam bursa. Tampaknya respons tidak terlalu antusias.

## USAHA-USAHA SEMENTARA MEMBANTU SEKTOR BISNIS

Usaha-usaha menurunkan tarif-tarif listrik, teleks, dan di bidang komunikasi lain, anjuran agar bank-bank lebih luwes dalam penanganan perusahaan yang sedang dalam kesulitan, melepaskan NWC kepada mekanisme pasar, menyediakan dana untuk usaha-usaha menengah dan kecil, meniadakan 2% dana untuk skill development, kemungkinan menurunkan pajak-pajak seperti pajak perusahaan, membuktikan bahwa Pemerintah Singapura sedang berada dalam proses deregulasi untuk menekan biaya yang tinggi yang menjadi salah satu penyebab turunnya daya-saing mereka di pasar internasional.

## PARIWISATA DAN HOTEL

Dalam waktu dekat, jumlah kamar hotel yang tersedia di persemakmuran itu akan bertambah dari 18.000 menjadi 20.000 bila proyek Marina Mandarin Hotel selesai. Jumlah itu akan terus membesar menjadi 30.000 pada akhir tahun 1986 dan 34.000 pada akhir tahun 1987. Proyek-proyek itu tidak dapat dihentikan setengah jalan karena ini tentu akan menyulitkan para pembangun gedung (developer) dan bankir. Padahal pemakaian kamar hotel terus turun dari 74% (1983) menjadi 67% (1984).

Sekitar 2,5 juta wisatawan mengunjungi Singapura yang dilihatnya sebagai "regional stopover," dengan harapan mereka dapat membeli barang-barang dengan harga yang "miring." Tetapi akhir-akhir ini harga-harga di sana tidak lagi menarik mereka karena tidak bisa ditawar lagi dan telah meningkat. Usaha untuk menjadikan Singapura sebagai kota konvensi belum tentu berhasil karena Manila tetap lebih menarik.



## KERAJAAN BISNIS SINGAPURA

Perusahaan	Modal Yang Dibayar (\$ ribu)	Persentase Pemilikan Saham Pemerintah (%)
1	2	3
<i>Perusahaan-perusahaan Induk</i>		
Temasek Holdings	76.443	100,0
Sheng-Li Holding	29.549	100,0
MND Holdings	31.000	100,0
<i>Manufaktur</i>		
Acma Electrical Industries	240.166	12,2
Cerebos	8.800	45,0
Chemical Industries	15.120	22,9
Hitachi Electronic Devices	30.000	30,0
National Iron & Steel Mills	42.565	19,7
Singapore National Printers	6.003	100,0
Singapore Textiles Industries	28.200	6,7
Sugar Industry of Singapore	8.000	40,0
Tata Elxsi	6.300	15,0
United Industrial Corporation	70.875	16,5
Allied Ordnance Company of Singapore	4.000	60,0
Chartered Industries of Singapore	105.650	100,0
Ordnance Development & Engineering Company of Singapore	9.068	100,0
<i>Petrokimia</i>		
Denka (Singapore)	10.000	10,0
Ethylene Glycols (Singapore)	96.500	50,0
Petrochemical Corporation of Singapore	182.520	47,5
Phillips Petroleum Singapore Chemical	111.000	25,0
The Polyolefin Company (Singapore)	94.900	25,0
<i>Perdagangan</i>		
Fullerton	330.000	100,0
Intraco	40.000	26,7
National Grain Elevator	5.000	37,0
Singapore Airport Duty Free Emporium	1.500	20,0
Singapore National Oil Company	1.000	100,0
Singapore Offshore Petroleum Services	900	33,3
Singapore Pools	1.000	100,0
Van Ommeren Terminal	50.276	8,0
Yaohan Singapore	9.000	12,5
SAF Enterprises	2.000	100,0
Singapore Food Industries	1.000	100,0
Unicorn International	1.700	100,0

1	2	3
<i>Jasa Keuangan</i>		
DBS Bank	228.567	48,7
Export Credit Insurance Corporation of Singapore	63.795	49,2
Singmanëx Government of Singapore Investment Corporation	1.820	100,0
	2.000	100,0
<i>Perbaikan &amp; Pembuatan Kapal</i>		
Jurong Holding	35.763	44,5
Jurong Shipyard	95.979	15,0
Keppel Shipyard	150.641	68,3
Mitsubishi Singapore Heavy Industries	180.000	44,0
Sembawang Holdings	40.000	100,0
Singapore Shipbuilding & Engineering	25.258	86,8
<i>Perkapalan</i>		
Neptune Orient Lines		
<i>Penerbangan</i>		
Singapore Airlines	240.808	90,5
Singapore General Aviation Service Company	2.000	20,0
Singapore Aircraft Industries	8.464	100,0
<i>Teknik (Engineering)</i>		
Singapore Automotive Engineering	4.000	100,0
<i>Pariwisata</i>		
Hotel Premier	2.821	100,0
Jurong Bird Park	5.000	100,0
Singapore Zoological Gardens	9.257	100,0
Parkland Golf Driving Range	750	60,0
<i>"Properties"</i>		
Raffles Holdings	110.000	49,0
Singapore Treasury Building	200.000	75,0
Loyang Valley	20.000	20,0
<i>Perumahan &amp; Konstruksi</i>		
Construction Technology Development & Construction Company	2.000	100,0
15.000		100,0
International Development & Consultancy Corporation	1.500	100,0
Resources Development Corporation	9.000	100,0
Urban Development & Management Company	22.500	100,0
<i>Pertanian</i>		
Primary Industries Enterprises	9.825	100,0

Sumber: Asian Banking, September 1985.



## BRAIN-POWER DAN FINANCIAL CENTRES?

Beberapa analis menyatakan bahwa Singapura tampaknya telah memutuskan untuk menjadi "pusat para ahli" (brain-power centre) dengan fokus pada teknologi tinggi dengan tujuan mengembangkan diri menjadi "pusat teknologi regional" (regional technology centre) bagi robot-robot, komputer, dan barang-barang berteknologi tinggi lain.

Menurut *Asian Finance*,<sup>1</sup> Singapura sebenarnya telah memiliki masyarakat berteknologi tinggi. Barang-barang mulai mahal, segala sesuatu dilakukan/diusahakan seefisien dan seteratur mungkin, dan secara otomatis, dan perilaku masyarakat pun sudah hampir seperti robot. Setidaknya demikian ungkapan yang diberikan oleh seorang bankir luar negeri tentang Singapura dan masyarakatnya. Tetapi kemudian timbul pertanyaan: apakah negara-negara industri bersedia masuk ke Singapura bila lingkungan sekitarnya masih berteknologi rendah? Bila mereka harus masuk ke Singapura dengan biayanya yang tinggi, bukankah lebih baik bagi negara-negara industri itu untuk berdiam di pusat-pusat mereka sendiri?

Dalam bukunya "Triad Power," Ohmae menyatakan bahwa pasar barang-barang berteknologi tinggi ialah negara-negara Eropa Barat, Jepang dan Amerika. Perkembangan teknologi tinggi menyebabkan "umur suatu produk" (product life cycle) menjadi demikian singkat. Ini sangat mengandung risiko bila barang tersebut tidak mendapatkan pasar seperti pasar negara-negara industri dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya Ohmae menyatakan bahwa pasar tersebut sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan raksasa. Untuk menembus pasar tersebut bukanlah hal yang mudah, lebih-lebih bila barang berteknologi tinggi yang diproduksi di Singapura itu belum dipasarkan oleh "general trading firm" yang telah memanfaatkan keunggulan komparatif buatan manusia dengan mengkombinasikan dan memobilisasikannya.

Ada yang mengatakan bahwa mungkin untuk tahap pertama, produk tersebut dapat diperkenalkan ke pasar-pasar di sekitarnya. Tetapi ini pun belum tentu akan berhasil karena negara-negara di sekitarnya mungkin akan berpendapat bahwa mereka lebih baik mendatangkan investor-investor dari negara-negara industri langsung untuk menciptakan industri-industri berteknologi tinggi yang berorientasi ke ekspor misalnya. Bila demikian, maka pasar satu-satunya ialah negara-negara industri tadi (Triad Power). Oleh karena itu menurut beberapa pengamat lain, sektor jasa keuangan akan lebih menarik dibandingkan dengan kemungkinan keberhasilan penciptaan pusat teknologi regional tersebut.

---

<sup>1</sup>*Asian Finance*, 15 September 1985.

Tabel berikut memperlihatkan Empat Besar OCBC, UOB, OUB, DBS. Persaingan empat bank besar ini untuk menarik nasabah cukup ketat dan ini pada gilirannya telah membuat fasilitas yang tersedia untuk para nasabah menjadi lebih besar. Dari komposisi pemberian kredit ke berbagai sektor kegiatan di Singapura, kita dapat melihat bahwa bank-bank tersebut dewasa ini sedang berada dalam kesulitan. Pemberian tambahan kredit adalah untuk: (a) gedung dan konstruksi 58,3%; (b) lembaga keuangan 24,1%; dan (c) perdagangan 7,7%. Dapat dibayangkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh "developer" dan bank bilamana harga "property" menurun 50% di tahun 1984/1985.

Dari komposisi ini tampak bahwa bank-bank tidak mempunyai pilihan lain daripada terus mendukung usaha-usaha yang bergiat di pasar "property." Pasar ini memang paling banyak menyerap dana. Bila harga "property" (rumah, kantor-kantor) katakan, turun 50% maka pinjaman dengan kolateral tidak lagi seimbang sehingga tidak heran bila bank meminta tambahan kolateral.

Dengan turunnya bisnis "property" ini, bank ikut mengalami kelesuan walaupun mereka berusaha mempertahankan diri dengan melebarkan sayap usahanya ke bisnis internasional. Empat bank besar Singapura ini pun sedang giat memperlebar jaringan usaha mereka ke Beijing, Australia, dan Jakarta misalnya. UOB yang pada mulanya "ragu-ragu," akhirnya membuka juga kantor perwakilannya di Jakarta. Bank ini tergolong bank yang sejak dahulu terkenal kuat dalam pembiayaan di bidang perdagangan dan pembiayaan mereka di bidang tersebut dengan Indonesia cukup besar.

Keluhan juga datang dari lembaga-lembaga keuangan lain seperti "merchant bank, finance companies." Bahkan menurut karangan *Asian Finance* (15 September 1985) "tidak cukup bisnis untuk para merchant bank."

Walaupun demikian menurut para analis Singapura, sebagai pusat keuangan regional, mungkin mempunyai viabilitas yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bila menjadikan dirinya sebagai pusat para atau teknologi regional.

## IKHTISAR

Dalam karangan singkat ini kami berusaha memberikan gambaran mengenai perekonomian Singapura. Singapura tampak sedang berusaha melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dapat meringankan beban yang dahulunya harus dipikul oleh para pengusaha seperti CPF, dana untuk ketrampilan



EMPAT BESAR (Dalam S\$ ribu, disusun menurut jumlah asset)

Bank/Item	1984	1983	Bank/Item	1984	1983
<i>DBS Bank</i>			<i>Oversea-Chinese</i>		
Assets	12,831.8	12,120.9	Assets	8,304.8	7,233.7
Loans & advances	6,340.8	6,239.2	Advances	4,140.5	3,086.9
Deposits (incl. CDs/FRN's)	7,135.3	6,615.6	Deposits	6,538.4	5,614.5
Shareholders' funds	1,681.3	1,341.8	Shareholders' funds	1,277.1	1,207.6
Pre-tax profit	181.9	231.9	Net profit	121.0	114.0
<i>United Overseas</i>			<i>Overseas Union</i>		
Assets	10,669.5	10,411.1	Assets	7,109.4	6,367.9
Loans & advances	6,585.3	6,530.3	Loans & advances	4,383.4	3,992.4
Deposits (incl. CDs/FRN's)	8,281.7	7,688.3	Deposits (incl. CDs)	5,917.2	5,247.2
Shareholders' funds	1,281.2	1,182.7	Shareholders' funds	570.1	548.8
Net profit	137.3	153.7	Net profit	47.2	52.1

Note: Assets exclude contra accounts.

ASSETS & LIABILITIES OF SINGAPORE BANKS  
(in S\$ million)

Item	1982	1983	1984	1985 Mar
Cash	247.9	275.4	291.4	306.5
Due from banks	9,823.6	11,904.4	17,087.8	15,792.7
Balances with MAS	1,417.5	1,557.6	1,742.3	1,843.6
Money at call with discount houses	1,917.9	2,049.9	2,387.2	2,223.4
Securities/equities	3,686.3	4,390.3	4,378.9	4,617.5
Loans & advances (incl. bills)	29,442.9	34,045.8	36,867.5	36,748.4
Other assets	2,001.0	2,314.3	2,952.0	2,815.8
Total assets/liabilities	48,537.2	56,537.8	65,707.2	64,347.9
Non-bank deposits	23,408.7	26,265.5	28,026.3	27,171.9
Due to banks	14,426.4	18,803.7	25,403.9	24,782.9
Other liabilities	10,702.0	11,468.6	12,277.0	12,393.2

Source: Monetary Authority of Singapore

ASSETS OF ASIAN CURRENCY UNITS  
(in US\$ million)

Item	1981	1982	1983	1984	1985 Mar
Loans to non-bank customers	19,452.2	27,606.3	30,348.6	33,766.1	33,855.4
Inter-bank funds					
In Singapore	1,495.2	1,738.5	2,791.4	3,832.1	3,591.4
Inter-ACU	15,522.3	19,213.9	19,690.0	21,862.5	24,364.6
Outside Sing.	45,155.6	48,612.0	51,965.4	59,634.4	64,156.0
Total	62,173.1	69,564.4	74,446.8	85,329.0	92,112.0
Other assets	4,149.9	6,125.1	7,029.5	8,959.7	9,729.3
Total assets	85,775.2	103,295.7	111,860.9	128,054.7	135,696.6

Source: Monetary Authority of Singapore.

Source: Asian Finance, 15 September 1985.

pilan, tarif telepon, teleks, listrik. Secara singkat mereka sedang mengusahakan melaksanakan permulaan dari rentetan deregulasi.

Suatu satuan tugas yang diketuai oleh B.G. Lee, telah mengadakan dialog dengan para tokoh usaha Singapura dan dalam waktu yang singkat akan mengajukan usul-usul kepada pemerintah agar dapat bimbingan/petunjuk untuk dapat keluar dari kesulitan dan kelesuan perekonomian dewasa ini. Ini merupakan salah satu langkah intern yang nantinya mungkin akan mengarah ke berbagai bentuk deregulasi. Peranan yang diberikan kepada sektor swasta mungkin akan semakin prominen, walaupun Pemerintah Singapura mungkin tidak dapat melepaskan peranannya yang penting dalam berbagai usaha seperti industri perbankan misalnya.

Ada sekelompok analis yang berpendapat bahwa Singapura dapat menjadi: (a) pusat teknologi regional atau (b) pusat keuangan regional. Dari dua alternatif itu, menurut para analis tersebut, kemungkinan yang kedua lebih besar. Persoalannya ialah apakah negara-negara industri bersedia menginvestasikan modalnya di Singapura? Karena pasar barang-barang berteknologi tinggi tetap adalah negara-negara industri (menurut Ohmae dalam "Triad Power" yakni Amerika, Jepang, dan negara-negara Eropa Barat. Belum tentu harga pokok barang-barang yang diproduksi di Singapura akan lebih rendah, mempertimbangkan biaya pengangkutan, risiko misalnya. Oleh karena itu gagasan menjadikan Singapura sebagai pusat teknologi regional masih harus dibuktikan.

Mungkin akan lebih realistis bila Singapura menjadi pusat keuangan regional, karena setidaknya sudah terdapat bukti-bukti keberhasilannya.

Singapura dapat dikatakan sedang berada dalam suatu dilema. Mereka mungkin belum siap sepenuhnya menjadi pusat teknologi regional. Resesi yang berkepanjangan bagaimanapun turut mempengaruhi pertumbuhan perekonomian negara ini. Dari pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, dalam waktu singkat Singapura harus memasuki masa pertumbuhan ekonomi lambat bahkan ada yang berpendapat zero, dan beberapa sektor kegiatan tertentu memang telah memperlihatkan pertumbuhan zero.

Generasi lama yang dikenal sebagai pengusaha Boat Quay (yang mempunyai hubungan bisnis dengan kelompok pengusaha di Pasar Pagi/Pintu Kecil) berusaha atas dasar kepercayaan. Komoditi-komoditi seperti karet, kopi, lada, uang misalnya berputar di antara mereka. Generasi sekarang yang tidak mengenal pengusaha Boat Quay dan Pintu Kecil/Pasar Pagi, berusaha dengan memakai dasi, duduk di ruang kantor modern, menggunakan sarana telekomunikasi modern, berusaha dengan "counterpart"-nya di Indonesia atas



dasar bisnis modern. Mereka tidak mengenal sejarah bisnis yang pernah terjalin antara Indonesia-Singapura. Mereka mencari pasar secara global. Mereka mungkin belum/tidak menyadari bahwa pasar global sedang berada dalam proses perubahan. Pasar global seolah-olah hanya diperuntukkan bagi pengusaha yang berhasil melaksanakan kombinasi dan mobilisasi keunggulan-keunggulan komparatif buatan manusia. Ini berarti modal jiwa wirausaha dan keberhasilan di pasar nasional saja tidak akan berhasil bersaing di pasar internasional/global bila tidak didukung oleh organisasi yang mampu menciptakan keunggulan komparatif buatan manusia tadi. Ini merupakan kenyataan yang harus dihadapi oleh para orang bisnis/pengusaha dewasa ini!

# Sumberdaya Laut Perairan Maluku dan Masalah Pengembangannya\*

Atjep SUWARTANA\*\*

## PENDAHULUAN

Propinsi Maluku memiliki luas sekitar 851.000 km<sup>2</sup> atau  $\pm$  10% luas wilayah Indonesia, di mana 90% dari wilayah propinsi itu berupa lautan (765.272 km<sup>2</sup>). Perairan wilayah tersebut meliputi Laut Banda, Laut Seram, Laut Halmahera, Laut Maluku dan Laut Arafura. Perairan ini sudah dikenal kaya akan sumberdaya hayati laut yang bersifat ekonomis penting seperti cakalang, tuna, udang, teripang, mutiara, lola, batulaga dan rumput laut yang merupakan komoditi ekspor. Hal ini sebenarnya ditunjang pertama oleh banyaknya pulau-pulau karang yang tersebar sekitar  $\pm$  997 pulau di perairan tersebut. Kedua adanya "upwelling" di Laut Banda dan Laut Arafura yang terjadi antara bulan Mei sampai Agustus di Musim Timur akibat pengaruh angin Muson Tenggara. Ketiga disebabkan adanya massa air yang bersifat oseanis dari Samudra Pasifik yang mengisi perairan Maluku setiap tahunnya (Wyrski, 1961). Di samping sumber daya perikanan laut, perairan Maluku memiliki terumbu karang beserta goba-goba yang cantik dan indah sehingga perairan ini memiliki potensi sumberdaya wisata bahari.

Kekayaan flora-fauna Maluku ternyata telah banyak mengundang para ahli ilmu kelautan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk mengungkapkan masalah biologis, oseanografis, ekologis dan potensinya. Penelitian flora-fauna di perairan Maluku pertama kali dilakukan oleh Georgius Everhardus Rumphius pada pertengahan abad ke-17 (1653-1702). Kemudian menyusul Peter Bleeker pada abad ke-19 (1852-1873) selama 21

---

\*Makalah disajikan kepada Dewan Riset Nasional Kelompok II tanggal 24 April 1985 di Ambon.

\*\*Kepala Stasiun Penelitian Ambon, LON-LIPI.



tahun mengadakan inventarisasi berbagai jenis ikan laut yang menghasilkan 90 karya tulis mengenai jenis ikan di perairan Maluku dan 26 di antaranya mengenai jenis ikan dari Ambon. Berbagai ekspedisi ilmiah dilakukan di perairan Maluku seperti ekspedisi Challenger (1872-1876) sebuah ekspedisi oseanografis, bekerja di perairan Maluku pada tahun 1874 dan di antaranya taksonomi plankton mulai dipelajari. Ekspedisi Siboga (1899-1900) menghasilkan data tentang zoologi, botani, geologi dan hidrologi. Ekspedisi Snellius I (1929-1930) menghasilkan data fauna laut. Dalam tahun 1964 untuk pertama kali Indonesia menyelenggarakan ekspedisi ilmu kelautan bertaraf nasional yang dinamakan Operasi Baruna (9 Mei - 27 Juli 1964). Penelitian yang dilakukan meliputi bidang-bidang oseanografi, biologi laut dan geologi. Dua tahun berikutnya menyusul Operasi Baruna II (21 November 1966 - 18 Februari 1967). Dalam ekspedisi ini tidak dilakukan inventarisasi biota laut. Tiga tahun kemudian dilakukan Ekspedisi Baruna III (18 Maret - 8 Mei 1970) di Laut Banda dan Tanimbar, tetapi tidak dilakukan inventarisasi biota laut. Sepuluh hari kemudian "Mariel King Memorial Expedition" dengan menggunakan kapal "Pele" melakukan inventarisasi moluska di Kepulauan Tanimbar untuk mencari adanya bentuk-bentuk peralihan antara fauna moluska Australia dan Filipina. Bulan September 1970 para peneliti LON-LIPI melakukan kegiatannya yang dinamakan "Ambon Survey" di antaranya dilakukan inventarisasi kepiting dan ikan di Teluk Ambon.

Kegiatan SPA, LON-LIPI secara praktis dimulai pada tahun 1973, dengan diadakannya Ekspedisi Rumphius I (6 Januari - 1 Februari 1973). Yang dikumpulkan adalah karang, krustasea, moluska, ekinodermata dan ikan di daerah Maluku Tengah. Ikut dalam ekspedisi ini beberapa biologiwan asing. Ekspedisi Rumphius II (5 Januari - 8 Februari 1975) dan ekspedisi Rumphius III (3 Oktober - 15 November 1977). Penelitian-penelitian laut selanjutnya adalah Alfa Helix I tahun 1975, Alfa Helix II tahun 1979, Rumphius IV tahun 1980 dan yang paling akhir adalah Ekspedisi Snellius II pada tahun 1984-1985. Selain penelitian biologi laut yang dikerjakan pada rentetan penelitian-penelitian di atas dikerjakan pula penelitian terhadap kondisi hidrologis pada seluruh perairan Indonesia bagian timur, khususnya di perairan Maluku.

Dalam makalah ini akan disajikan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan sumberdaya laut (hayati dan non-hayati) serta masalah yang menyangkut pengembangannya. Seluruh data yang dipergunakan diambil dari hasil pengamatan oleh peneliti-peneliti nasional (terutama yang dikerjakan oleh Stasiun Penelitian Ambon LON-LIPI), maupun oleh hasil penelitian bersama dengan peneliti-peneliti asing. Selain dari pembahasan mengenai hasil-hasil penelitian akan disajikan pula beberapa gagasan tentang penginderaan jarak jauh dan tentang sumberdaya mineral di dasar laut.

## KONDISI GEOGRAFIS PROPINSI MALUKU

### Letak, Luas, Batas dan Pemerintahan

Secara astronomis Propinsi Maluku terletak pada  $2^{\circ}40'$  LU sampai  $8^{\circ}10'$  LS dan  $124^{\circ}30'$  BT sampai  $136^{\circ}20'$  BT. Propinsi Maluku semuanya termasuk daerah tropis yang terdiri hampir 1.000 pulau besar dan kecil. Dari Utara ke Selatan, Pulau Morotai dengan luas  $1.800 \text{ km}^2$ , Pulau Halmahera  $18.000 \text{ km}^2$ , Kepulauan Bacan  $5.700 \text{ km}^2$ , Pulau Obi  $3.700 \text{ km}^2$ , Pulau Buru  $9.000 \text{ km}^2$ , Pulau Ambon  $761 \text{ km}^2$ , Pulau Seram  $18.625 \text{ km}^2$ , Pulau Aru  $6.325 \text{ km}^2$ , Pulau Jamdena  $5.085 \text{ km}^2$  dan lain-lain. Luas daerah Maluku keseluruhan  $\pm 851.000 \text{ km}^2$ , yang terdiri dari daratan  $85.728 \text{ km}^2$  dan luas perairannya  $765.272 \text{ km}^2$  atau 90% merupakan lautan.

Propinsi Maluku pada bagian utara dibatasi oleh Samudra Pasifik, sedangkan bagian timur laut berbatasan dengan lepas pantai, pantai barat dan barat laut Irian Jaya. Pada bagian timur dan sebelah selatan dibatasi oleh Laut Timor dan Laut Arafura. Agak ke barat Pulau Lirang merupakan batas baratnya, batas barat laut adalah Laut Maluku dan bagian barat daya oleh Kepulauan Tukang Besi.

Pemerintahan Propinsi Maluku dibagi atas 5 daerah Tingkat II, 51 kecamatan dan 1.605 desa. Daerah-daerah Tingkat II adalah: Maluku Utara, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, daerah administratif Halmahera Tengah dan Kotamadya Ambon. Penyebaran penduduk tidak merata, konsentrasi penduduk hanya pada daerah-daerah perkotaan dan industri, seperti kota Ambon, Ternate, Amahai, Tual dan sebagainya. Jumlah penduduk Propinsi Maluku  $\pm 1,3$  juta jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 2,45% per tahun.

### Iklim

Iklim di daerah Maluku sangat dipengaruhi oleh lautannya. Di bagian tenggara Laut Banda, Musim Tenggara Timur mulai pada bulan April - Oktober dengan Angin Tenggara. Musim Barat mulai bulan Desember hingga Maret. Hujan deras pada bulan Januari dan Februari, sedangkan pancaroba bulan Maret, April dan November, kadang-kadang Oktober. Daerah timur laut Laut Banda, Musim Timur pada bulan Juni, Juli dan Agustus. Bulan Mei sampai Agustus banyak turun hujan, terutama pada bagian selatan Pulau Seram dan Buru, Ambon, Haruku dan Saparua. Tebal curah hujan dapat mencapai  $3.000 \text{ mm/tahun}$ . Musim Barat mulai Desember, sedangkan Pancaroba sekitar bulan April dan Oktober/November. Daerah barat laut, Laut



Banda, Musim Tenggara bulan Mei-Oktober. Di bagian selatan Laut Maluku hampir sepanjang tahun turun hujan. Musim Utara mulai bulan Desember hingga April, Musim Selatan bulan Juni - November, sedangkan Pancaroba pada bulan Mei dan November. Daerah lautan Arafura Musim Tenggara pada bulan Maret-Oktober, Musim Barat pada bulan Desember-Februari, sedangkan pancaroba pada bulan April dan November.. Di Laut Seram dan Laut Halmahera, keadaan musimnya tidak teratur, hampir setiap bulan terjadi hujan. Musim Tenggara pada bulan Mei-Oktober dengan Angin Selatan, Musim Barat pada bulan Desember-Maret dengan Angin Barat Laut, sedangkan Pancaroba pada bulan April dan November. Curah hujan bervariasi antara 1.000 - 3.000 mm/tahun. Curah hujan kurang 1.000 mm/tahun terdapat di daerah Pulau Wetar. Pulau Seram, Morotai dan Halmahera curah hujannya berkisar 2.000 - 3.000 mm/tahun, sedangkan curah hujan yang lebih dari 3.000 mm/tahun terjadi di daerah Pulau Ambon, Lease dan Kei Besar. Hujan maksimal terdapat di Pulau Saparua sebesar 3.575 mm/tahun. Untuk lebih jelasnya beberapa contoh tipe iklim di daerah Maluku menurut sistem Koppen dan Schmidt-Ferguson disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1  
TIPE-TIPE IKLIM MENURUT SCHMIDT-FERGUSON DAN KOPPEN

Nomor	Nama Tempat	Bulan Kering	Bulan Basah	Tipe Iklim		Rata-rata Curah Hujan (mm/tahun)
				Schmidt Ferguson	Koppen	
1.	Banda	4	12	B	Afa	2.656
2.	Geser	6	12	B	Afa	1.979
3.	Wahai	5	11	B	Afa	1.281
4.	Amahai	2	11	A	Afa	2.821
5.	Piru	4	12	B	Afa	2.764
6.	Saparua	3	12	A	Afa	3.575
7.	Ambon	4	12	B	Afa	3.475
8.	Namlea	7	10	B	Awa	1.388
9.	Sanana	5	10	B	Afa	1.720
10.	Ternate	5	12	A	Afa	2.211
11.	Tobelo	3	12	A	Afa	2.121
12.	Tual	5	10	C	Awa	2.437

Fisiografi

Daerah Maluku merupakan daerah yang beraneka-ragam dengan basin-basin dan punggung-punggungan, proses pegunungan berlangsung sangat

aktif. Maluku Utara sebagian berhubungan dengan rangkaian pulau-pulau Asia Timur dan sebagian berhubungan dengan Kepulauan Melanesia. Sedangkan Maluku Tengah dan Tenggara dan Busur Banda berhubungan dengan sistem Pegunungan Sunda. Maluku Utara sisi-sisinya dibatasi oleh palung-palung dalam yaitu palung Pilipina (6.000-9.000 m) sepanjang sisi timur, Laut Seram (5.319 m), Banda Barat (5.800 m) dan Basin Sulawesi (6.220 m) sisi barat lautnya. Ada dua depresi yang terletak di sebelah selatan Pulau Talaut dan di antara Basin Gorontalo dan Basin Bacan. Maluku Utara dibentuk oleh dua sistem pegunungan yang memusat, yang satu membatasi Basin Sulawesi yang cembung ke Timur yang lain cembung ke Barat. Maluku Selatan, yang utama adalah daerah Banda, yang dibatasi oleh dua Busur sejajar, Busur Dalamnya ditumbuhi oleh vulkan-vulkan aktif, sedangkan Busur Luarnya bebas dari vulkan muda. Basin Banda Selatan terbagi menjadi bagian barat dan timur oleh vulkan api yang terletak ditengah-tengahnya. Basin Banda Tengah memiliki garis tengah kurang lebih 400 km. di antara Pulau Damar dan Pulau Buru. Terdapat Punggungan Luymes dan Siboga yang tidak mencapai permukaan laut, hanya beberapa pulau saja yang muncul di permukaan laut seperti Pulau Lucipara. Di antara Punggungan Luymes dan Buru kedalaman rata-rata 3.330 m, dasar bagian selatan 5.000 m. Busur Banda Utara memiliki garis tengah 400 km dengan kedalaman maksimal 5.800 m. Di antara Busur Dalam dan Busur Luar dari Busur Banda ditemukan palung yang berbentuk sabit cembung ke arah timur disebut Palung Weber dengan kedalaman maksimal 7.440 m lebar maksimal 150 km. Palung Weber ini dipisahkan dari Basin Wetar oleh ambang yang dalamnya 1.480 m. Busur Luar Banda adalah sebuah pengangkatan geoantiklinal dari kulit bumi lebarnya 100-200 m. Endapan-endapan geosinklinal telah diangkat menjadi rangkaian pegunungan dengan struktur berlebihan tanpa vulkanisme aktif.

## Geologi

Pulau Halmahera dan Pulau Morotai dibentuk oleh formasi batuan aluvium, undak dan terumbu koral, batuan basa dan sedikit batuan neogin. Sebelah barat Halmahera, seperti Ternate sampai Makian dibentuk oleh batuan permo-karbon, terumbu koral dan formasi batuan aluvium. Kepulauan Bacan, Pulau Obi, Kepulauan Sula umumnya dijumpai batuan aluvium sebagai unsur pembentuk pulau tersebut dan di daerah pantai-pantai dijumpai undak dan terumbu koral, sedikit batuan basa dan skis hablur. Batuan neogin dan kapur ditemui di Pulau Buru, sedangkan dibagian barat daya pulau ini tersusun oleh batuan aluvium dan terumbu koral.

Pulau Seram merupakan pulau terbesar di Maluku disusun oleh batuan neogin yang berselang seling dengan batuan aluvium. Undak dan terumbu



korall dijumpai pada daerah pantainya. Pada bagian tengah Pulau Seram tersusun oleh skis hablur Grauweacke dan serpih. Kepulauan Banda umumnya dibentuk oleh batuan basa menengah. Pulau-pulau Kei, Aru, dibentuk oleh batuan paleogen, sedikit aluvium, undak dan terumbu korall. Kepulauan Tanimbar batuan aluvium mendominasi dan sedikit undak dan terumbu korall. Pulau Wetar, Romang, Damar dibentuk oleh batuan basa menengah, sedangkan Pulau Kisar disusun oleh skis hablur.

## Tanah

Luas tanah datar di Propinsi Maluku adalah  $12.516 \text{ km}^2$  (14,6%), tanah berombak  $24.175 \text{ km}^2$  (28,2%), sedangkan selebihnya merupakan tanah perbukitan dan pegunungan. Jenis tanah Mediteran ditemui di Kepulauan Kei, Kepulauan Tanimbar, pulau-pulau Kisar, Pulau Halmahera dan pulau-pulau Lease. Sedangkan jenis tanah latoso ditemukan di pulau-pulau Bacan, Buru dan Halmahera. Pada daerah-daerah Pulau Ambon, Lease, Obi, Dobo dijumpai tanah jenis brown forest soil. Tanah kompleks mendominasi Pulau Seram, juga ditemukan pada daerah Pulau Buru, Morotai, Obi dan Halmahera Tengah. Tanah renzina dijumpai pada Kepulauan Kei, Kepulauan Tanimbar dan Pulau Morotai.

## SUMBERDAYA HAYATI

### Produktivitas dan Plankton

Produktivitas suatu perairan erat hubungannya dengan kepadatan plankton di perairan tersebut. Data produktivitas, plankton dan oseanografi merupakan keterangan yang sangat berharga bagi negara yang sudah maju perikanannya.

Produktivitas primer di laut adalah kecepatan perubahan benda-benda organik di dalam proses fotosintesa yang dilakukan oleh fitoplankton.

Stasiun penelitian Ambon LON - LIPI memulai penelitian produktivitas baru pada bulan September 1983 pada penelitian di Selat Haruku dan dilanjutkan pada lokasi lingkungan industri pada tiga tempat yakni Teluk Baguala, Teluk Waisarisa dan Teluk Ambon. Selain dari pada itu juga dilakukan penelitian di Laut Arafura dan Laut Banda yang dilaksanakan dalam Ekspedisi Snellius II, yang data-datanya masih dalam proses analisa.

Tentang klorofil di Laut Banda dan Laut Seram Nontji (1974) menyatakan bahwa pada umumnya kandungan klorofil di Laut Banda dan Laut Seram

lebih tinggi dari pada tempat lain di Indonesia. Yusuf & Praseno (1978) menulis tentang keadaan fitoplankton di Teluk Piru. Mereka menyatakan bahwa kepadatan fitoplankton di Teluk Piru pada bulan Oktober dan November dua kali lebih besar daripada kepadatan bulan Mei. Sutomo (1978) meneliti sebaran vertikal dan migrasi vertikal harian zooplankton di Laut Banda. Dia menyatakan bahwa dalam sehari semalam zooplankton terutama berkonsentrasi pada lapisan 25 - 50 meter. Sutomo (1980) menulis tentang variasi musiman dan komposisi zooplankton di Teluk Ambon dan menyatakan bahwa pada bulan September kepadatannya jauh lebih besar bila dibandingkan pada bulan Januari. Dari keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada Musim Timur kandungan plankton jauh lebih besar bila dibandingkan pada Musim Barat. Menurut Motoda dalam Sutomo (1980) variasi kepadatan plankton disebabkan karena dua hal, yaitu disebabkan oleh curah hujan atau disebabkan adanya proses penaikan air (upwelling). Tingginya kandungan fitoplankton dan zooplankton pada Musim Timur disebabkan karena adanya curah hujan yang tinggi sehingga banyak zat hara dari darat menuju ke laut melalui sungai. Pengaruh ini terlihat jelas pada perairan dekat pantai atau pada teluk. Sedangkan proses penaikan air pada September Nontji (1974) didapatkan pengaruh terbesar dari upwelling di Laut Banda. Tulisan-tulisan yang menjelaskan tentang adanya hubungan antara upwelling dan plankton masih sangat sedikit. Seperti diketahui daerah-daerah perikanan penting di dunia ini erat hubungannya dengan upwelling di mana biasanya pada daerah tersebut kandungan planktonnya tinggi.

## Ikan

Potensi (MSY) perikanan laut di perairan Maluku diperkirakan sebesar 950.000 ton/tahun yang meliputi 425.000 ton/tahun ikan pelagik dan 525.000 ton/tahun ikan demersal (Dinas Perikanan Dati I Maluku, 1982a). Pada tahun 1983 produksi perikanan laut dicapai sebesar 85.920 ton dan dari produksi ini sebesar 14.391,3 ton atau sebesar 16,75% berupa ikan cakalang (*Katsuwonus pelamis*). Ekspor ikan cakalang selama tahun 1979-1981 menunjukkan kenaikan, namun mulai tahun 1982-1984 mengalami penurunan sampai mencapai 53,3%. Nilai ekspor rata-rata per tahun sebesar 3.736,2 ton seharga US\$2.401.195,15. Perikanan cakalang ini menggunakan alat pancing "pole and line" yang memakai ikan umpan hidup. Alat penangkapan "pole and line" sejak tahun 1979-1983 mengalami penurunan berturut-turut jumlahnya sebanyak 453 unit, 462 unit, 269 unit, 270 unit dan 164 unit; dengan kapal motor rata-rata sekitar 206 buah.

Ikan pelagis lainnya yang bersifat ekonomis penting adalah ikan tatihi atau mandidihang (*Thunnus albacares*), komu (*Auxis thazard*), putilai



(*Euthynnus affinis*) tertangkap oleh pancing "pole and line" dan pancing tonda. Ikan pelagis tersebut di atas sebenarnya termasuk ikan tuna tetapi ikan tuna yang ditangkap dengan pancing rawai (long-line) di perairan Maluku tampaknya belum ada, walaupun ada pada saat ini jumlahnya sedikit dan sebagian besar masih dikelola oleh perusahaan asing. Perikanan tuna long line ini sebenarnya memiliki potensi yang cukup tinggi di perairan Maluku terutama di Laut Banda dengan nilai "hook rate" 3,34 berarti tiap 100 mata pancing dapat ditangkap 3,34 ekor tuna (Ayodhyoa, 1966).

Menurut data dari Balai Penelitian Perikanan Laut Ryuku, Jepang di Laut Banda dan Laut Sulawesi, ternyata dari jenis-jenis ikan yang tertangkap "long line" diketemukan ikan tatihu sebanyak 60-80%, mata besar (*Thunnus obesus*)  $\pm$  10%, albakora (*T. alalunga*) 0 - 10%, dan jenis-jenis ikan setuhuk (*Makaira* spp. *Tatrapturus audax*) serta ikan layar (*Istiophorus orientalis*) sekitar 5-14%. Selanjutnya dikatakan bahwa untuk setahun penuh daerah Laut Banda dan Laut Maluku merupakan fishing ground ikan tuna long line karena terdapat migrasinya yang teratur bergerak berlawanan dengan arah jarum jam (Kedel & Ayodhyoa, 1967). Umumnya jenis ikan tuna long line ini termasuk jenis-jenis ukuran besar seperti tatihu berukuran 50 - 80 kg, mata besar sekitar 70-100 kg, dan ikan-ikan lainnya lebih dari 50 kg. Ikan umpan mati yang dipakai biasanya ikan belanak, kembung, julung-julung, layang dan lain-lain. Umumnya kapal yang dipakai di atas 350 ton yang dilengkapi dengan "quick freezer." Kapal ukuran kecil biasanya berukuran 30-100 ton berupa kapal kayu.

Ikan pelagis penting di dalam menunjang perikanan ikan tuna ini ialah ikan umpan, terutama ikan umpan hidup bagi perikanan pole and line. Seperti ikan puri atau teri (*Stolephorus* spp.), make (*Sardinella* spp.), lompas (*Thrissina baelama*), gosau (*Spratelloides delicatulus*), kembung (*Rastrelliger* spp.), momar atau layang (*Decapterus* spp.), dan kaluna (*Praneseus* spp.). Dari sekian banyak ikan umpan ini ikan umpan yang paling baik adalah ikan puri. Di perairan Maluku daerah penangkapan dan penyebarannya antara lain di Kepulauan Banda, Pulau Ambon, Pulau Seram, Pulau Saparua, Pulau Buru, Kepulauan Bacan, Pulau Ternate, Pulau Tidore dan Pulau Halmahera. Daerah penangkapan ikan umpan tersebut pada umumnya terletak di perairan pantai yang dangkal, terlindung dan banyak menerima sejumlah besar air tawar, contohnya Teluk Ambon.

Pada akhir-akhir ini hasil penangkapan ikan umpan tersebut berkurang, terutama di daerah penangkapan yang berada di pemukiman padat. Hal ini diduga karena adanya "over fishing" dan pencemaran sampah dan sediment.

Ikan pelagis lainnya yang tertangkap jaring insang, giob (purse seine), bagan dan redi (beach seine) ialah ikan bubara (*Caranx* spp.), palala (*Caranx*



sp.), tenggiri (*Scomberomerus* spp.), lema atau kembung (*Restrelliger* spp.), julung-julung (*Hemiramphus* spp.), momar (*Decapterus* spp.), kawalnya dan selar (*Caranx* spp.), dan tuing-tuing atau ikan terbang (*Cypsilurus* spp.).

Jenis-jenis ikan demersal yang banyak terdapat di perairan Maluku antara lain ikan samandar atau beronang (*Siganus* spp.), kakap (*Lates* spp.), ikan merah (*Lutjanus* spp.), lalosi atau ikan ekor kuning (*Caesio* spp.), geropa atau kerapu (*Ephinephelus* spp.), gulamah (*Johnius* spp.), bloso (*Saurida* spp.), kapas-kapas (*Gerres* spp.) dan lain-lain. Penangkapan ikan tersebut terutama dengan jaring trawl dasar di Laut Arafura.

## Moluska

Moluska adalah golongan binatang lunak, tidak bertulang belakang tetapi mempunyai satu keping cangkang atau lebih. Umumnya hidup menetap (sesil), membenam atau melekat pada substrat di perairan dangkal (perairan pantai). Dari berbagai jenis moluska, hanya sebagian yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, perhiasan atau sumber zat kapur.

Meskipun sebagian besar perairan Maluku merupakan laut dalam akan tetapi potensi moluska di Maluku cukup besar. Berdasarkan habitatnya moluska dapat dibagi atas tiga golongan yaitu: moluska yang hidup di daerah mangrove, di padang sea grass dan daerah terumbu karang. Dari daerah-daerah yang sudah diamati beberapa di antaranya mempunyai potensi seperti padang sea grass Teluk Ambon, Teluk Kotania (Seram Barat) dan Kampung Pia (Pulau Saparua); daerah mangrove Pelita Jaya, Kampung Talaga dan Wailale (Seram Barat); daerah terumbu karang Ihamahu dan Pia (Pulau Saparua), Pulau Jamdena bagian timur (Kepulauan Tanimbar). Sedangkan kerang mutiara banyak didapatkan di Dobo, Kepulauan Aru (Dinas Perikanan Dati I Maluku, 1982 b).

Di antara jenis-jenis tersebut, sebagian besar baru dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan diperjualbelikan oleh penduduk di sekitarnya. Jenis-jenis yang sudah dimanfaatkan sebagai komoditi ekspor adalah lola (*Trochus niloticus*), batu laga (*Turbo marmoratus*), japing-japing (*Pinctada margaritifera*) dan mutiara (*Pinctada maxima*). Jenis-jenis moluska yang bernilai ekonomis tetapi belum dikembangkan adalah *Anadara* spp., *Pinna* spp., *Crassostrea*, *Tridacna*, *Strombus* spp., *Cyprea* spp., *Oliva* dan lain-lain.

## Ekhinodermata

Di antara berbagai jenis ekhinodermata, hanya jenis-jenis tripang yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan telur beberapa jenis bulu babi



(*Diadema* sp.) dimanfaatkan oleh penduduk setempat sebagai bahan makanan. Dalam perdagangan jenis tripang susu (*Holothuria scabra*) merupakan jenis yang paling mahal. Di samping itu tertangkap pula tripang gosok (*Muelleria lecanora*) yang lebih rendah harganya. Pada tahun 1980 tripang diekspor dari Maluku sebanyak 29,9 ton. Sedangkan pada tahun 1981 hanya diekspor 14,2 ton. Terlihat terjadinya penurunan ekspor 50%. Duri babi terdapat banyak di Maluku tetapi belum diperdagangkan.

## Krustasea

Kelompok krustasea terdiri dari berbagai jenis udang dan kepiting. Krustasea umumnya hidup di dasar perairan yang berpasir dan berlumpur, kecuali udang-udang karang yang hidup di terumbu karang. Udang-udang yang mempunyai nilai ekonomis antara lain Penaidae (udang windu, udang putih), udang barong (Panuliridae) dan udang ronggeng (Stomatopoda), sedangkan kepiting yang mempunyai nilai ekonomi penting adalah kepiting dari keluarga Portunidae. Di Laut Arafura, hasil utama terdiri dari *Penaeus merguinesis*, yaitu sebesar 90%. Selanjutnya *P. monodon*, dan *P. semisulcatus* merupakan hasil yang kedua di perairan ini. Potensi udang di perairan Maluku diperkirakan sebesar 1.100 ton/tahun.

## Cacing

Penduduk nelayan Maluku telah memanfaatkan sumberdaya hayati perairan laut berupa cacing yang bernama "laor." Cacing ini termasuk kedalam Filum Annelida yaitu yang memiliki tubuh terdiri dari cincin-cincin yang bersegmen. Cacing laor atau "palolo" termasuk kelas Polychaeta. Cacing ini dimanfaatkan oleh para nelayan sebagai sumber protein hewani setelah difermentasikan berupa "bakasang" semacam petis yang berbentuk pasta. Di samping itu bakasang ini mengandung vitamin A dan B12 yang sangat berguna bagi kesehatan tubuh. Salah satu jenis dari cacing laor adalah *Nereis* sp., mereka mengubur diri dalam pasir atau batu karang di perairan pantai. Di daerah Maluku hampir di semua pulau-pulainya ditemukan dalam jumlah yang banyak yang ditangkap setahun sekali diwaktu mereka memijah pada malam hari dengan mempergunakan tonggak dan obor atau lampu petromaks sehingga nampak seperti pasar malam di pantai.

Waktu pemijahan cacing laor sebenarnya berlangsung hanya sekitar dua jam setiap tahun dan di Maluku biasanya terjadi antara pukul 20.00-22.00 WIT, pada bulan Maret di minggu terakhir pada saat surut terendah.

## Karang

Terumbu karang merupakan suatu ekosistem yang unik, yang hanya terdapat di perairan tropik dan umumnya ditandai dengan menonjolnya ke kaya-an jenis biota yang hidup di dalamnya. Terumbu karang juga merupakan komunitas yang berproduktivitas tinggi dengan keanekaragaman yang tinggi dan dilihat dari sudut estetika indah sekali. Terumbu karang hanya dapat tumbuh pada perairan yang bersuhu antara 20-28°C, salinitas 27-40‰, cukup matahari, air jernih, pergerakan air (arus) untuk tersedianya makanan jasad renik dan oksigen, serta substrat sebagai tempat melekatnya larva/planula.

Penelitian terumbu karang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti Indonesia yang bekerjasama dengan para peneliti asing. Di perairan Maluku, penelitian terumbu karang dilakukan pada waktu Ekspedisi Rumphius I, II, III dan IV, Ekspedisi Snellius I dan II. Di samping itu peneliti Indonesia sendiri juga melakukan penelitian terumbu karang. Pulau-pulau yang telah diteliti antara lain Kepulauan Aru, Pulau Seram bagian timur dan barat, Pulau Ambon dan sekitarnya, Pulau Buru serta Kepulauan Tanimbar. Terumbu karang di Maluku Tenggara (Kepulauan Aru) kurang baik karena perairannya agak keruh. Sedangkan di Pulau Banda agak baik dengan keanekaragaman jenis cukup tinggi dan didominasi oleh marga *Acropora*, *Favia* dan *Fungia*. Terumbu karang di Pulau Ambon (Pulau Pombo) didominasi oleh jenis dari suku Acroporidae (*Acropora humilis*, *A. cerealis*) dan suku Faviidae (*Favia pallida*, *F. spesiosa*, *Favites abdita*) dan marga *Porites*. Di Teluk Tuhaha (Pulau Saparua) yang dominan adalah marga *Fungia*, sedangkan Tanimbar Selatan didominasi oleh *Acropora humilis*, *A. devaricata*, *A. cerealis*, *Porites* spp., *Favia* spp. dan *Fungia* spp.. Terumbu karang di Pulau Buru banyak dijumpai jenis-jenis *Fungia*, *Acropora* dan suku Faviidae.

Terumbu karang mempunyai beberapa fungsi antara lain:

- a. Tempat hidup dan mencari makan beberapa jenis ikan, moluska, krustasea, ekhinodermata dan sebagai habitat rumput laut. Ikan hias terumbu karang yang mempunyai nilai ekonomis antara lain *Acanthurus celebicus*, *A. glaucoprieus*, *Calloplelesioptis altivelis*, *Chaetodontoplus melanotoma*, *Euxiphipops navarchus*, *Zebrasoma veliferum* dan sebagainya.
- b. Sebagai pelindung pantai
- c. Sebagai sumberdaya hayati
- d. Sebagai obyek wisata bahari, karena keanekaragaman jenis, bentuk dan warna karang. Di samping itu pantai yang berpasir putih dan air yang hangat menambah daya tarik bagi pengunjung.



Potensi terumbu karang yang tinggi menarik para nelayan untuk memanfaatkan biota-biota yang ada di dalamnya. Dalam pemanfaatannya sering kali dijumpai tindakan yang merusak seperti peledakan terumbu karang, meracuni biota dan sebagainya. Di samping itu kerusakan terumbu karang juga dapat terjadi secara alami yaitu oleh *Acanthaster planci* seperti yang terjadi di Pulau Pombo dan Pulau Rak (Maluku Utara).

## Rumput Laut

Perairan Maluku yang terdiri dari kurang lebih 1.000 pulau, hampir seluruhnya merupakan daerah pertumbuhan rumput laut. Secara umum rumput laut hidup di daerah litoral atau sub-litoral sampai kedalaman  $\pm 200$  meter. Rumput laut tumbuh pada substrat karang mati atau batu karang masif berpasir, keadaan air jernih dengan salinitas di atas 32 ‰.

Jenis-jenis rumput laut yang ditemukan di perairan Maluku lebih dari 75 jenis. Jenis yang dapat dimanfaatkan antara lain *Liagopora*, *Hypnea*, *Gracilaria*, *Celidium*, *Celidiopsis*, *Eucheuma*, *Caulerpa*, *Ulva*, *Bodlea*, *Padina*, *Dictyosphaeria*, *Microcoleus*, *Dictyota* dan *Sargassum*. Tetapi di Maluku yang dimanfaatkan baru marga *Eucheuma*, *Gracilaria* dan *Hypnea*.

Rumput laut dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, obat-obatan, bahan baku industri, makanan ternak dan pupuk. Rumput laut bermanfaat bagi industri karena menghasilkan algin, karaginan dan agar-agar.

Daerah penyebaran dan produsen rumput laut di perairan Maluku antara lain Maluku Utara terutama di Pulau Limbo, Pulau Doi, Ngele-ngele (Halmahera Utara), Jorongan (Halmahera Selatan). Dari Pulau Limbo dapat dihasilkan 60 ton *Eucheuma* kering setiap kali panen. Maluku Tengah merupakan penghasil *Eucheuma*, *Gracilaria* dan *Hypnea* terutama daerah Seram Timur yaitu Pulau Geser, Pulau Seram, Rei, Pulau Kefing, Pulau Kifar, Pulau Kidang, Pulau Nukus dan Pulau Grogos. Sedangkan di Seram Barat adalah Pulau Ose dan di Seram Utara adalah Pulau Tujuh. Pulau Nusalaut terutama desa Ameth merupakan penghasil *Hypnea* dan *Gracilaria*. Maluku Tenggara merupakan penghasil *Eucheuma* terutama Kepulauan Aru yang dapat menghasilkan  $\pm 600$  ton per tahun. Di daerah ini ada 4 daerah penghasil rumput laut utama yaitu Krei Baru, Karanwaira, Warialau dan Mohangsel. Selain itu di Kepulauan Tanimbar bagian utara yaitu di Metirotan, Watidal, pulau-pulau Nuslima dan kampung Nurhat, di mana dalam setiap kali panen dapat dihasilkan 50 ton, sedangkan Kepulauan Tanimbar Selatan dapat menghasilkan 60 ton setahun.

Pengambilan hasil rumput laut, pada umumnya diperoleh dari alam dan bukan dari hasil budidaya. Pemanenan umumnya diatur melalui "Sasi" yaitu pelarangan pengambilan hasil sampai saat yang ditentukan. Sasi ini biasanya diatur oleh Kepala Desa, Gereja atau Masjid. Ekspor rata-rata tahunan dari Propinsi Maluku adalah sebesar 1750 ton. Ekspor rumput laut ini, sejak tahun 1974 terus menurun, hal ini disebabkan produksinya yang semakin menurun. Penurunan produksi ini berkaitan erat dengan cara panen para nelayan yang mengambil rumput laut berikut substratnya. Sehingga pada masa panen berikutnya, banyak substrat yang hilang atau rusak.

### Hutan Mangrove

Hutan mangrove di Propinsi Maluku tersebar hampir di seluruh pulau terutama pada pulau-pulau besar seperti Pulau Halmahera, Pulau Bacan, Pulau Seram, Pulau Yamdena, Kepulauan Aru dan pulau besar lainnya. Penelitian hutan mangrove di wilayah ini dilaksanakan melalui kerjasama antara SPA LON-LIPI dan LBN-LIPI antara lain di pulau-pulau Ambon, Seram (Teluk Latal, Teluk Elpaputih, Teluk Piru dan Teluk Kotania), Saparua, Halmahera (Teluk Kao dan Kecamatan Jailolo), Kepulauan Aru dan Pulau Yamdena. Hasil penelitian menunjukkan terdapatnya 24 jenis tumbuhan mangrove yang terdiri dari 10 suku. Ketebalan hutan yang pernah diukur tegak lurus pantai berkisar antara 100-1500 meter, sedangkan diameter pohon mencapai 150 centimeter. Sementara itu tinggi pohon maksimum dapat mencapai 50 meter. Jenis-jenis yang dominan antara lain dari suku Rhizophoraceae (*Rhizophora stylosa*, *R. apiculata*), Verbenaceae (*Avicenia marina*, *A. alba*), Sonneratiaceae (*Sonneratia alba*, *S. ovata*). Pada umumnya di seluruh daerah yang telah diteliti terlihat adanya kerusakan hutan mangrove yang disebabkan terutama oleh penggunaannya sebagai kayu bakar dan bahan bangunan. Jenis yang biasa digunakan sebagai bahan bangunan adalah *R. spiculata* dan *R. stylosa*, sedangkan yang sebagai kayu bakar antara lain dari jenis *A. marina*, *Bruguiera gymnorhiza* dan *Cariops tagal*.

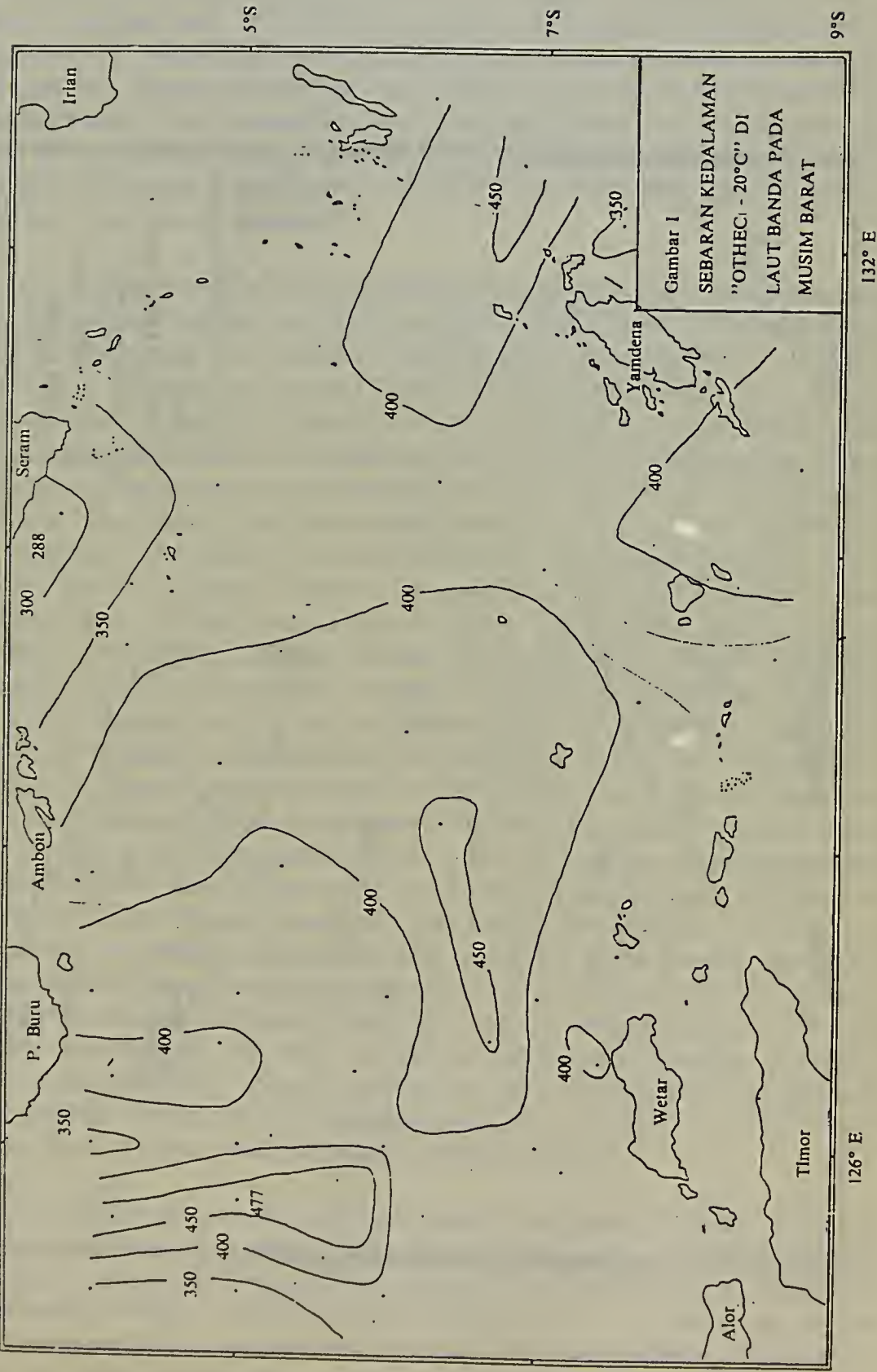
### SUMBERDAYA NON-HAYATI

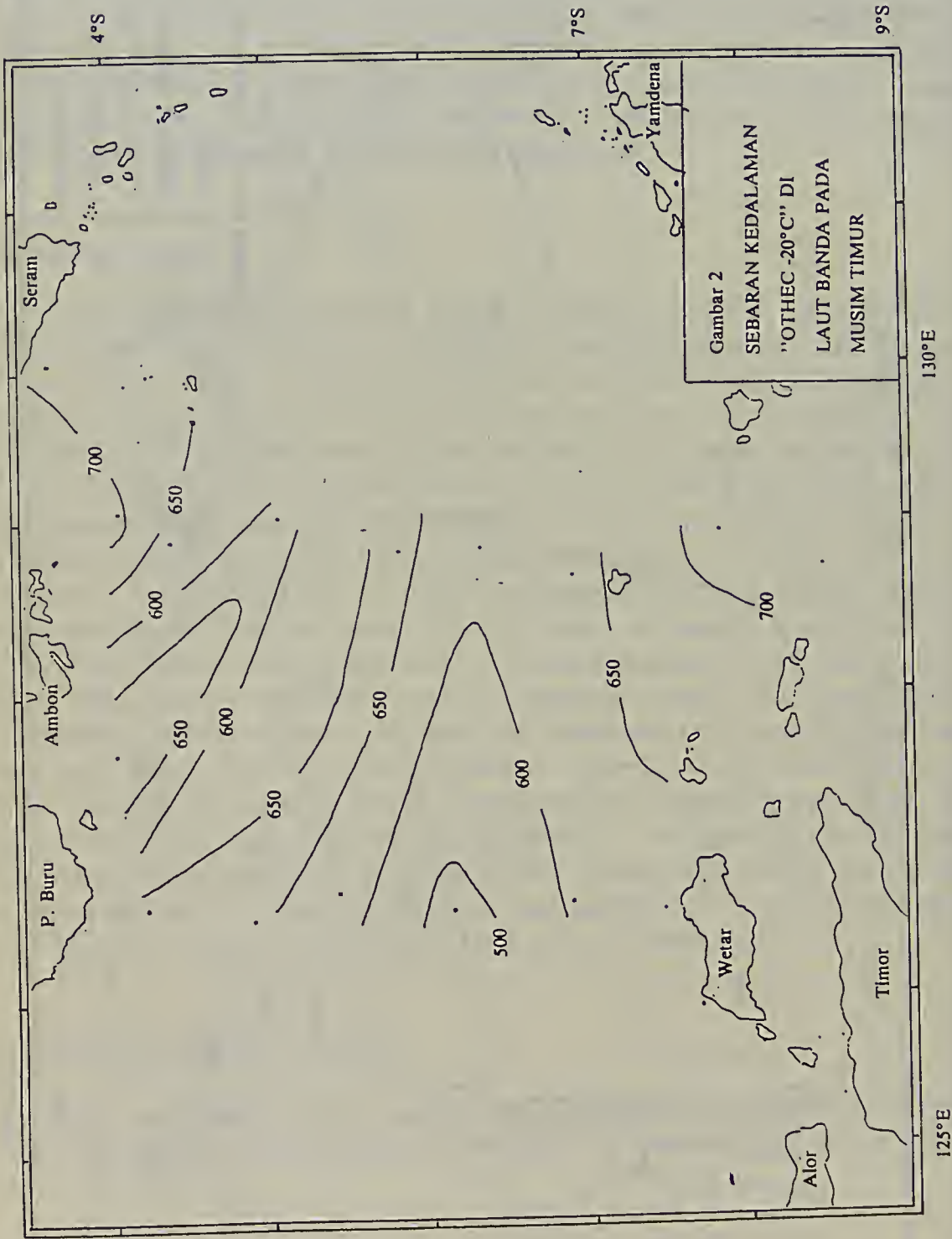
Dalam membahas potensi sumberdaya non-hayati hanya dititikberatkan pada suhu air, arus dan pasang surut berdasarkan hasil penelitian yang ada.

#### Suhu Air

Perkembangan teknologi pada dasawarsa terakhir telah memungkinkan manusia-manusia mengolah sumberdaya energi dari perbedaan suhu air an-





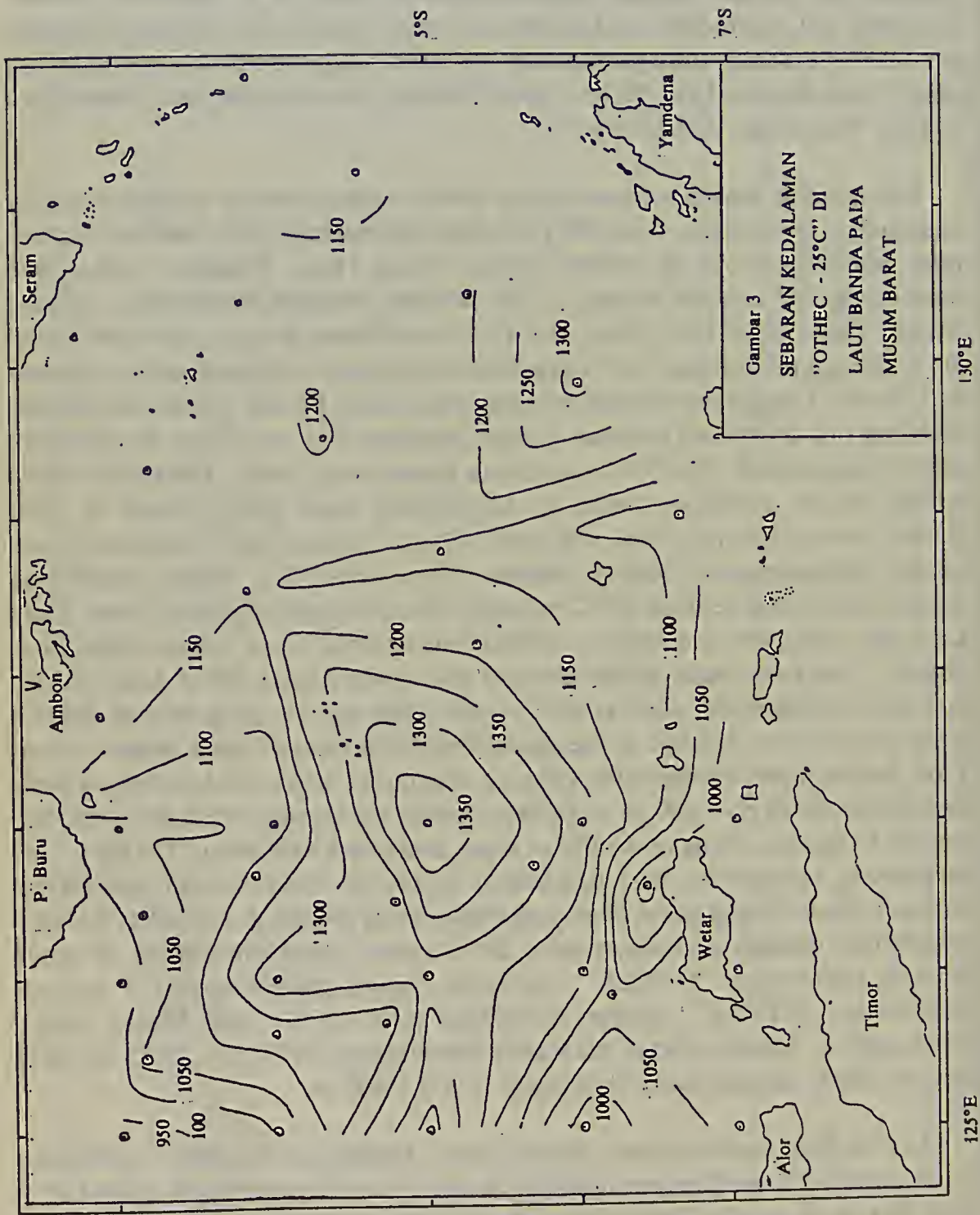




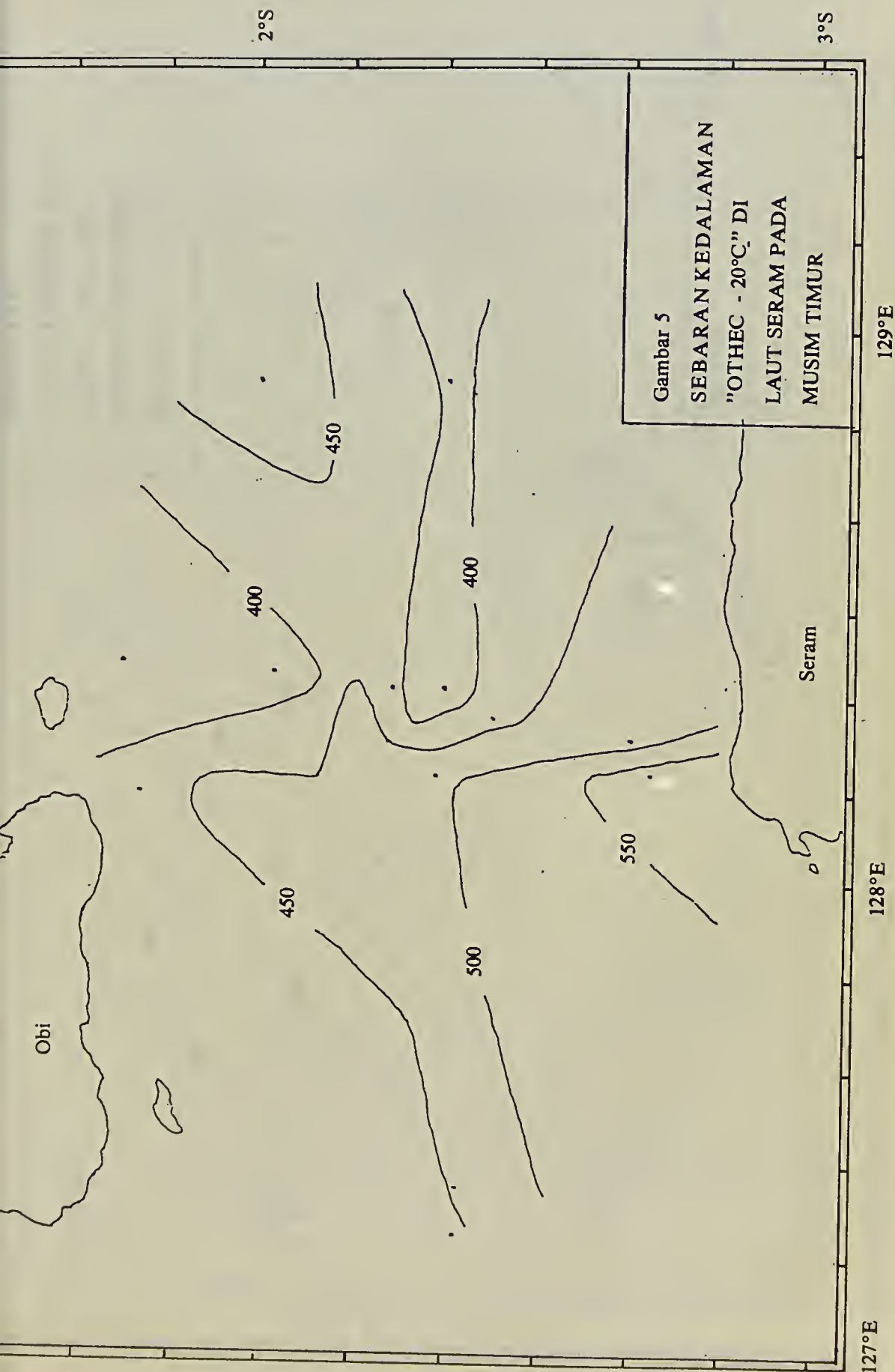
tara permukaan laut dengan kedalaman tertentu. Sumberdaya energi ini dikenal dengan nama OTHEC (Ocean Thermal Energy Conversion). Perbedaan suhu air yang dapat membangkitkan energi non-minyak ini antara permukaan laut dengan lapisan tertentu minimal harus  $20^{\circ}\text{C}$ . Dari hasil penelitian yang ada, telah dihitung kedalaman lapisan-lapisan air dengan perbedaan suhu  $20^{\circ}\text{C}$  terhadap suhu permukaan air. Perhitungan-perhitungan dilakukan untuk Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku dan sebagian Laut Halmahera (sekitar Pulau Gag dan Gebe).

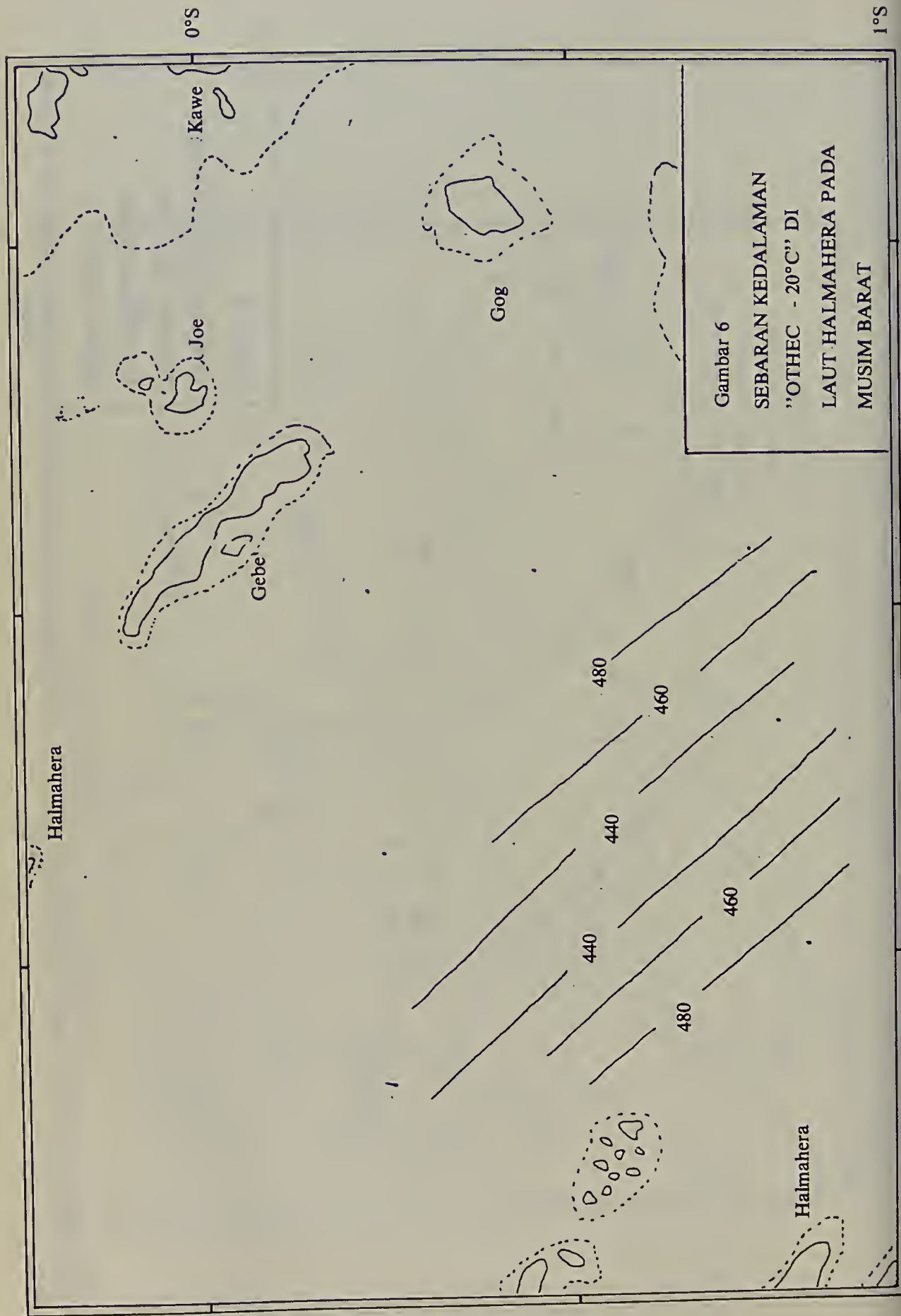
Untuk Laut Banda selama Musim Barat tampak bahwa kedalaman yang mempunyai perbedaan suhu  $20^{\circ}\text{C}$  dengan permukaan laut berkisar antara nilai minimum 288 m di sebelah selatan Seram Timur (Gambar 1) dan nilai maksimum 477 m pada lintang  $5^{\circ}\text{S}$  di sebelah tenggara Pulau Buru. Selama Musim Timur (Gambar 2) tampak bahwa kedalaman dengan perbedaan suhu  $20^{\circ}\text{C}$  dengan permukaan laut tenggelam makin jauh ke bawah sampai dengan 500-700 m. Tenggelamnya lapisan yang dicari pada Musim Timur disebabkan oleh dua hal. Penyebab pertama adalah pengaruh Musim Timur dengan suhu udara yang rendah ( $23\text{-}25^{\circ}\text{C}$ ) dan curah hujan yang tinggi. Penyebab kedua adalah proses penaikan massa air (upwelling) yang selalu terjadi di Laut Banda selama Musim Timur (Wyrtki, 1961). Karena suhu permukaan laut rendah dibandingkan dengan Musim Barat ( $29\text{-}30^{\circ}\text{C}$ ), maka kedalaman dengan suhu yang berbeda  $20^{\circ}\text{C}$  terhadap suhu permukaan makin besar. Pada Gambar 2 tampak pola sebaran kedalaman tersebut pada bagian barat Laut Banda. Pola yang sama diduga tercatat pula pada bagian timur Laut Banda. Asumsi ini didasarkan pada kondisi musim yang merata pada seluruh permukaan Laut Banda, bahkan proses upwelling lebih intensif pada bagian timur Laut Banda. Hasil pengamatan suhu air selama ini menunjukkan bahwa pada kedalaman lebih dari 600 m stratifikasi massa air hampir tidak berubah dari musim ke musim. Dengan demikian besar kecilnya kedalaman "OTHEC" ini tergantung sepenuhnya dari stratifikasi massa air pada lapisan permukaan sangat peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di atmosfer. Apabila kedalaman dengan perbedaan suhu  $20^{\circ}\text{C}$  seperti yang diutarakan di muka disebut kedalaman "OTHEC" minimum, maka pada Gambar 3 sebaran kedalaman "OTHEC" dengan perbedaan suhu  $25^{\circ}\text{C}$  untuk Musim Barat. Dari gambar tersebut dapat dikatakan kedalaman OTHEC -  $25^{\circ}\text{C}$  ini pada Musim Barat tercatat pada kedalaman 1.000-1.400 m.

Untuk Laut Seram selama Musim Barat kedalaman OTHEC -  $20^{\circ}\text{C}$  tercatat antara 397 m di perairan pesisir Seram Utara bagian tengah (Gambar 5) dan 564 m di pesisir Seram Utara bagian barat. Pada perairan Pulau Obi kedalaman OTHEC -  $20^{\circ}\text{C}$  ini tercatat sekitar 400 m. Hal yang sama tampak pula pada perairan Laut Halmahera, antara Pulau Halmahera dengan Pulau Gag dan Gebe (Gambar 6).

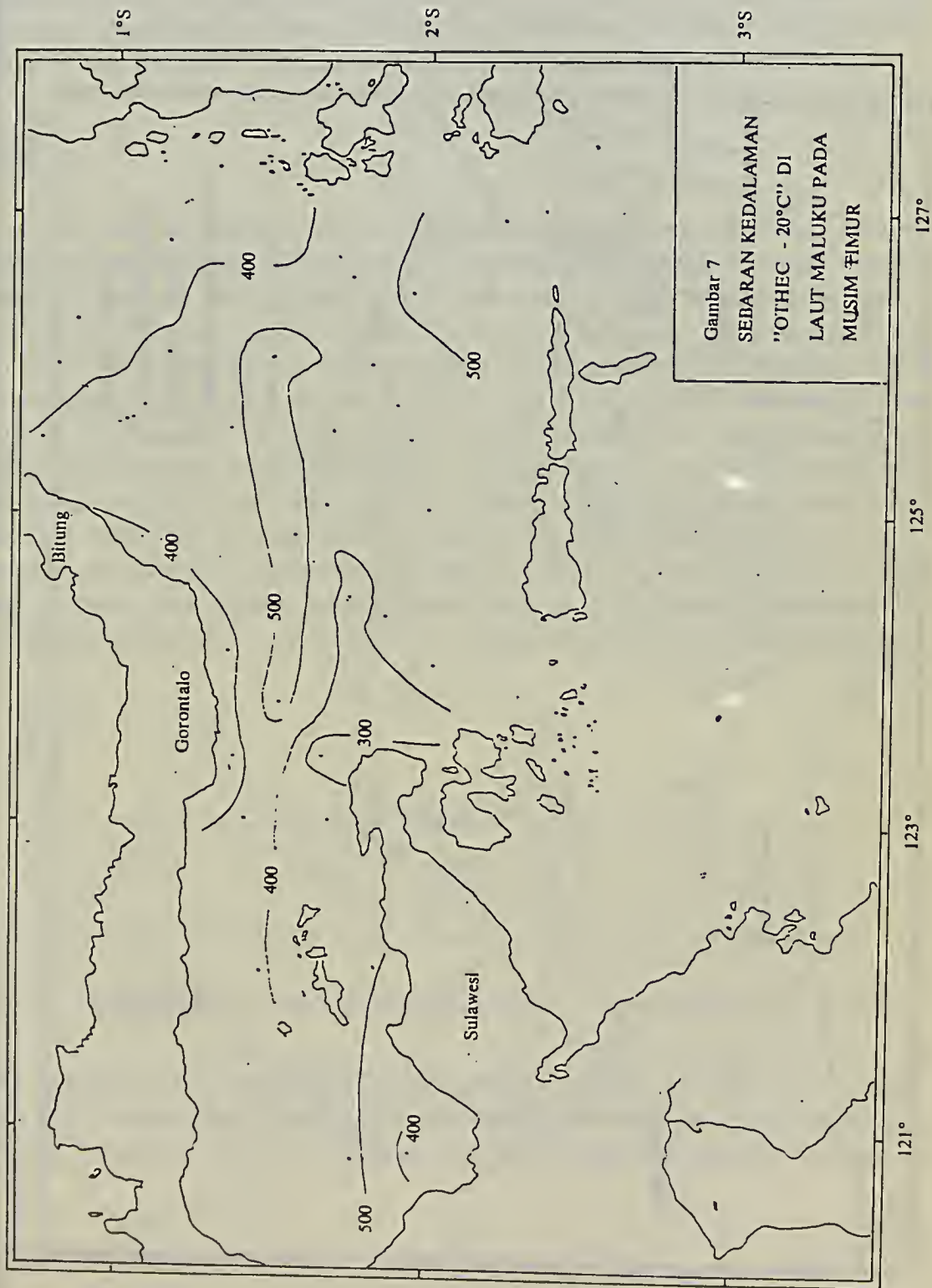


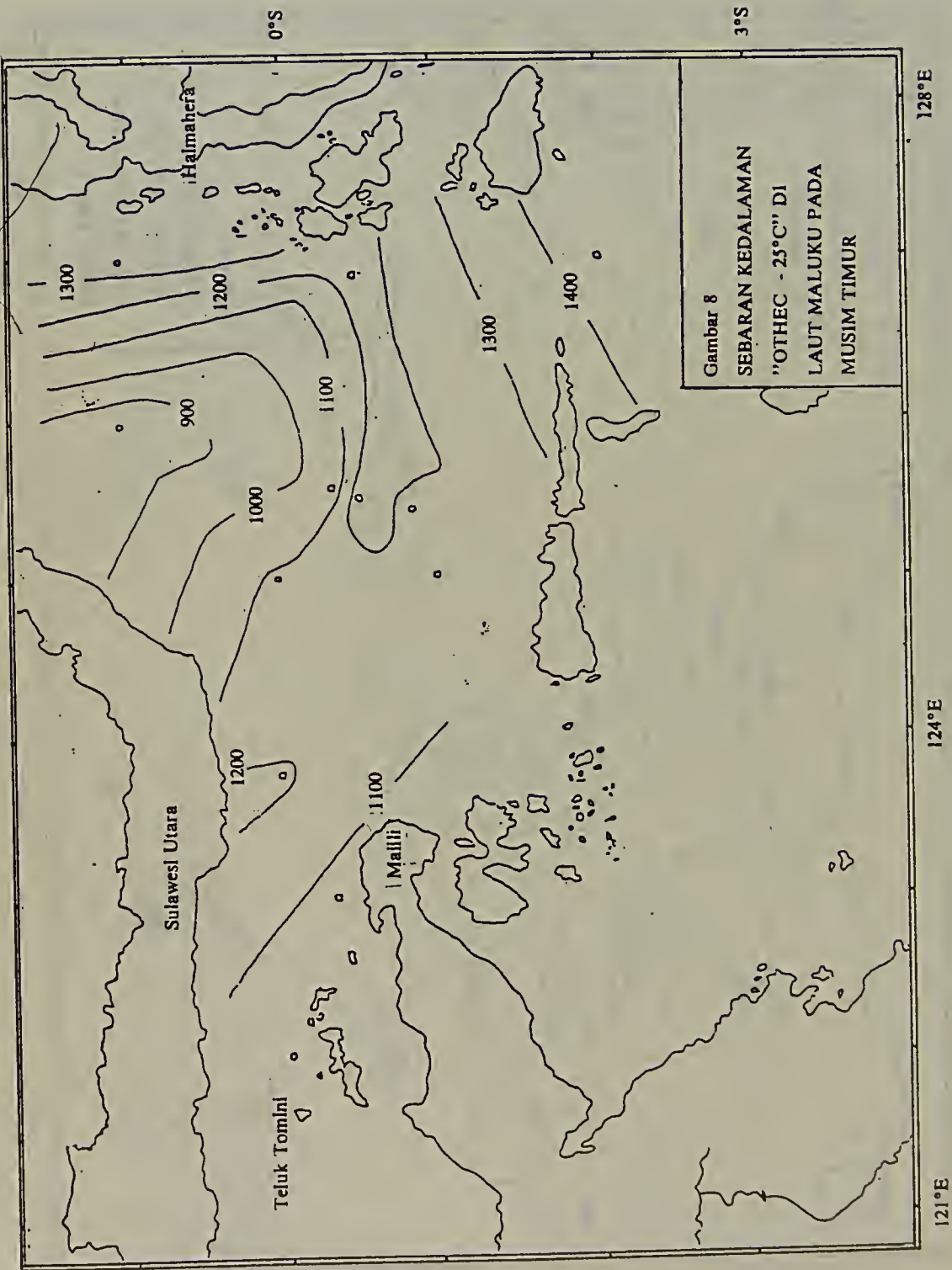










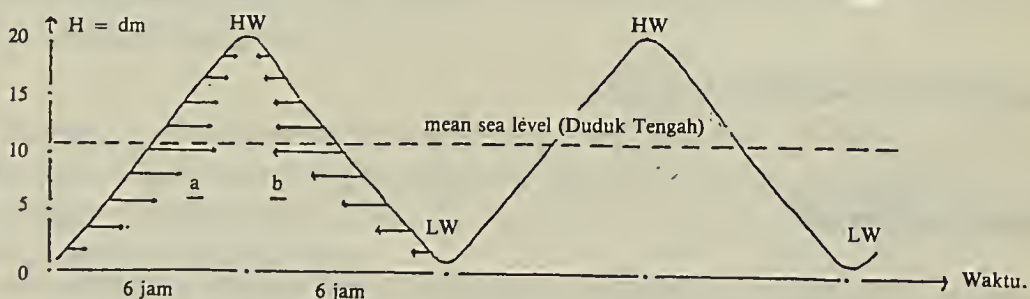




Pada Gambar 7 tampak peta sebaran kedalaman OTHEC -  $20^{\circ}\text{C}$  bervariasi antara 292-542 m. Nilai minimum tercatat pada ujung timur Teluk Tomimi bagian selatan, sedangkan nilai maksimum terletak pada pertengahan Laut Maluku selama Musim Barat. Sedangkan kedalaman OTHEC -  $20^{\circ}\text{C}$  seperti halnya Laut Banda tercatat pada kedalaman 1.000-1.400 m (Gambar 8).

## Arus

Pada perairan Maluku tercatat tiga jenis arus yaitu arus angin, arus pasang surut dan arus dinamis. Dari ketiga jenis arus ini yang mungkin dapat dikembangkan menjadi sumberdaya energi non-minyak yaitu arus pasang surut. Pada selat-selat yang sempit seperti Capalulu, Lifomotala, Lobang Haya dan Lobang Sole kecepatan arus pasang surut dapat mencapai 6 mil/jam. Sifat arus pasang surut pada keempat selat yang disebutkan di atas adalah identik dengan sifat pasang surutnya sendiri yaitu pasang surut harian campuran mirip harian ganda. Ini berarti bahwa arus yang terjadi tidak selalu mengarah pada satu arah tetapi berganti-ganti arah sesuai dengan pergantian pasang dan surutnya muka air. Kecepatan arus maksimum selalu tercatat pada saat permukaan air mencapai kedudukan "mean sea level" (Duduk Tengah). Pada saat moment pasang dan moment surut kecepatan arus pada keempat selat tersebut adalah nol. Pola sebaran vektor pasut dijelaskan sebagai berikut:



Gambar : Sebaran vektor arus pasang surut pada periode pasang (a) dan periode surut (b)

Dari gambar di atas tampak bahwa kecepatan arus pada keempat selat sempit itu yang bisa mencapai 6 mil/jam hanya terjadi pada saat muka air mencapai Duduk Tengah, makin kecil ke arah moment pasang dan moment surut.

## Pasang Surut

Untuk seluruh perairan Maluku sifat pasang surut adalah pasang surut campuran mirip harian ganda dengan tunggang air maksimum yang bervariasi

antara 21-27 dm. Tunggang air maksimum di setiap lokasi yang pernah diteliti (Tobelo, Geser dan Saumlaki) maupun pada lokasi yang diteliti oleh peneliti lain sebelumnya (Ambon, Dobo, Ternate dan Tual) terjadi pada saat matahari berkulminasi maksimum di akhir Musim Barat (Maret dan April) dan di akhir Musim Timur (September-Oktober). Dari data yang ada dapat dikatakan bahwa di perairan Maluku Tenggara tunggang air maksimum relatif lebih tinggi daripada perairan lainnya di Propinsi Maluku (2,70 m untuk Saumlaki). Kondisi yang demikian memungkinkan kemudahan-kemudahan dalam pengolahan sumberdaya hayati laut. Pada saat-saat surut maksimum, daerah bentangan pantai yang basah dapat mencapai 3-5 kilometer dari pantai kering. Kekeringan yang demikian jauhnya biasanya dikenal dengan istilah "Metikai." Pada saat-saat yang demikian pengambilan hasil laut seperti tripang, moluska, rumput laut, krustasea dan hasil laut lainnya seperti yang dijelaskan pada bab sumberdaya hayati di muka akan lebih mudah dilakukan oleh masyarakat di sekitarnya.

Dari penjelasan yang dikemukakan di atas maka masih sulit untuk dikemukakan di sini apakah perbedaan antara tinggi air pada saat moment pasang dan moment surut yang berkisar antara 21-27 dm itu dapat diolah menjadi tenaga yang lain. Hal ini masih perlu diteliti lebih lanjut.

Sumberdaya lain selain yang dikemukakan di atas, seperti energi ombak, masih belum dapat dikemukakan pada kesempatan ini karena penelitian ke arah itu baru mulai diijaki.

## MASALAH PENGEMBANGAN

### **Sumberdaya Hayati**

Sumberdaya hayati merupakan kumpulan dari banyak populasi biota. Kelimpahan suatu populasi dan fluktuasi akibat kegiatan alami biota seperti tumbuh, berkembang biak dan mati. Sebaliknya, karena terdiri dari makhluk hidup maka dinamika populasi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Dengan demikian, dalam pemanfaatan sumberdaya hayati bahari juga harus diikuti penanganan/pengelolaan yang seksama dan menyeluruh.

### *Pengelolaan Lingkungan*

Lingkungan hidup (habitat) merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup biota. Dalam hal ini, lingkungan hidup biota meliputi faktor fisika dan kimia air laut, cuaca dan substrat/dasar perairan.



Di beberapa daerah, kualitas habitat sudah sedemikian menurunnya sehingga tidak layak lagi bagi kelangsungan hidup biota lebih jauh, lingkungan hidup dengan kualitas tertentu merupakan syarat bagi berlangsungnya siklus hidup yang lengkap.

Dengan demikian pengetahuan mengenai kualitas lingkungan hidup bahari perlu dikuasai dengan sebaik-baiknya. Untuk itu penelitian ekologi dan monitoring pencemaran perlu dilanjutkan dan dikembangkan.

### *Pengambilan Hasil*

Pada umumnya pemanfaatan sumberdaya hayati dilakukan dengan pengambilan dari alam. Pada daerah-daerah tertentu pengambilan hasil laut sudah sedemikian efektifnya sehingga keseimbangan sumberdaya terganggu dan terancam kelestariannya. Hal ini disebabkan induk yang diharapkan dapat memulihkan potensinya sudah sangat berkurang. Untuk mengatasi hal ini maka diperlukan dua macam tindakan, yaitu:

Memberikan kesempatan pada sumberdaya tersebut untuk pulih kembali secara alami yaitu melalui perkembangbiakan.

Mempercepat pulihnya sumberdaya dengan cara menambahkan individu baru yang masih muda dari tempat lain (re-stocking). Untuk ini diperlukan jumlah benih yang cukup besar.

Selanjutnya untuk mempertahankan produksi optimum (MSY) maka perlu dilakukan beberapa tindakan seperti menutup suatu daerah dari kegiatan penangkapan, pembatasan jumlah dan jenis alat tangkap serta memperlakukan peraturan-peraturan lainnya.

Di lain pihak, sebagai pilihan perlu digali dan dikembangkan sumberdaya lain yang belum dimanfaatkan. Untuk itu penelitian inventarisasi biota yang ekonomis penting perlu dilanjutkan dan diperluas. Demikian pula penelitian penunjang seperti penanganan pasca panen, pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi dan pemasarannya perlu ditingkatkan.

Seperti diketahui, hasil laut merupakan komoditi yang mudah busuk dan jumlah produksinya tidak tetap, sehingga komoditi ini perlu ditangani dengan seksama agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Di samping itu hasil laut di perairan Maluku pada umumnya diperdagangkan sebagai bahan mentah atau bahan makanan yang langsung dikonsumsi. Dengan per-

kataan lain, di daerah ini belum dikenal adanya industri yang mengolah komoditi tersebut menjadi bahan industri yang lebih tinggi. Permasalahan lain yang dihadapi adalah rantai pemasaran yang terlalu panjang, harga yang tidak stabil dan permintaan pasar yang tidak tetap. Hal ini mengakibatkan keengganan masyarakat untuk menanamkan modal dan berusaha dalam bidang ini.

### *Budidaya*

Seperti diketahui sumberdaya hayati laut adalah sumber yang dapat pulih, meskipun produksi alaminya terbatas sehingga untuk meningkatkan produksi per satuan luas, diperlukan sumber lain melalui budidaya. Dalam budidaya dikenal dua istilah yaitu:

- Budidaya murni, yaitu kegiatan budidaya di mana seluruh kegiatan mulai dari penyediaan benih, pemeliharaan sampai penanaman dilakukan secara sistematis dan terkendali. Pada umumnya budidaya ini diterapkan terhadap organisme yang menetap atau pergerakannya relatif terbatas seperti udang dan ikan tertentu.
- Budidaya semi alami, yaitu kegiatan budidaya di mana salah satu fasenya berlangsung secara alami. Kegiatan ini dilakukan dengan cara menambahkan individu muda ke dalam suatu perairan. Budidaya ini dilakukan terhadap biota yang memerlukan areal yang luas antara lain kerang, rumput laut, ikan dan sebagainya.

Untuk melaksanakan budidaya maka terlebih dahulu harus diketahui pengetahuan mengenai biologi, fisiologi, ekologi, nutrisi dan parasitologi dari biota yang akan dibudidayakan. Untuk itu perlu dilakukan penelitian aspek-aspek biologi dari biota yang berpotensi ekonomis dan percobaan pemeliharaan biota tersebut, baik di laboratorium basah maupun di lapangan.

### **Sumberdaya Non-hayati**

Dari segi sumberdaya non-hayati berdasarkan apa yang diuraikan di atas, tampak bahwa penggarapan OTHEC akan bersifat musiman. Untuk menghindari pengaruh musim tersebut dibutuhkan teknologi yang lebih mengarah pada dua sistem yaitu sistem untuk Musim Barat dan sistem untuk Musim Timur. Daerah-daerah yang terbaik untuk pengolahan OTHEC ini adalah pantai timur Seram Selatan, pantai Seram Utara bagian tengah dan ujung



timur laut Sulawesi Tengah sekitar desa Malik. Untuk penggarapan arus pasang surut yang cukup deras pada selat-selat yang sempit di Kepulauan Sulu dan ujung barat Pulau Seram membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan data yang lebih akurat tentang sebaran vektor kecepatan dan teknologi yang hendak diterapkan. Pemanfaatan tenaga pasang surut walaupun tampaknya agak sulit untuk direalisasi namun penelitian ke arah ini mungkin dapat memberikan jawaban yang lebih pasti terutama di Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru dan Kepulauan Kei. Selain itu perlu pula dipikirkan manfaat energi yang akan diolah bila sumber energi tersebut berada pada pulau-pulau kecil dan terpisah jauh dari pusat-pusat pengembangan yang tercantum dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Maluku maupun dalam rencana-rencana pembangunan yang lain yang berskala nasional atau regional.

### **Pemanfaatan Jasa Satelit**

Dalam pengembangan sumberdaya hayati maupun non-hayati dirasa perlu untuk memonitoring perubahan-perubahan yang terjadi di laut terutama pada lapisan permukaan. Monitoring hal-hal tersebut di atas dengan mengadakan penelitian dari kapal penelitian adalah sangat mahal. Untuk mengatasi masalah ini maka penggunaan satelit dirasakan akan sangat membantu.

Penggunaan data remote sensing untuk berbagai bidang penelitian pada saat sekarang ini telah meningkat dengan pesat khususnya foto Landsat yang merupakan rekaman data permukaan bumi yang mencakup daerah yang cukup luas ( $185 \times 185 \text{ km}^2$ ). Data remote sensing ini bersifat multiguna antara lain dapat digunakan untuk penelitian di bidang oseanografi yang mencakup daerah lingkungan pantai, lepas pantai dan lautan. Di Indonesia penggunaan data remote sensing untuk penelitian oseanologi di daerah lepas pantai baru dimulai sejak tahun 1975.

Daerah Maluku dilintasi oleh dua satelit bumi Amerika yaitu Landsat 5 dan Landsat 6. Masing-masing Landsat tersebut melewati daerah Maluku pada setiap jam 09.30 WIT, setiap 18 hari sekali. Foto Landsat tersebut secara periodik dapat dimanfaatkan untuk memonitor sumberdaya laut di daerah ini, seperti penyebaran karang, kepadatan plankton, perbedaan salinitas dan temperatur air laut untuk lapisan permukaan. Di samping itu sebaran dan potensi hutan mangrove juga dapat dipetakan dan dapat dibedakan antara yang selalu tergenang, yang kadang-kadang tergenang, maupun yang jarang tergenang air laut dan lain-lain.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang disajikan di atas beberapa kesimpulan tentang potensi sumberdaya laut di perairan Maluku adalah:

- a. Perairan Maluku merupakan perairan yang subur bahkan lebih subur dari beberapa perairan tertentu di Indonesia.
- b. Jenis-jenis ikan ekonomis penting seperti cakalang dan jenis-jenis tuna lainnya belum dimanfaatkan secara optimal. Perikanan tuna long line belum dieksploitasikan dengan serius.
- c. Jenis-jenis biota laut lainnya seperti telur ikan terbang, beberapa jenis moluska, ikan hias dan cacing belum dikembangkan sebagai komoditi ekspor yang baru.
- d. Ikan umpan pada umumnya diusahakan pada daerah teluk yang padat pemukiman. Hal ini akan mengganggu kelestarian usaha sebagai akibat dari sampah dan limbah pemukiman lainnya.
- e. Potensi wisata marina sangat tinggi tetapi tidak jelas arah pendayagunaannya sehingga belum diadakan manfaatnya sebagai sumber devisa.
- f. Ikan-ikan yang dapat dibudidayakan adalah jenis bronang, kakap, ekor kuning dan krapu. Selain itu jenis-jenis rumput laut seperti *Eucheuma* dan *Gracilaria*. Juga jenis-jenis moluska seperti anadara, kerang mutiara dan tiram dapat pula dibudidayakan.
- g. Usaha pembudidayaan dapat juga dikembangkan terhadap krustasea seperti udang windu (*Penaeus monodon*) dan udang putih (*Penaeus merguensis*).
- h. Daerah hutan mangrove di pulau-pulau Halmahera, Aru dan Yamdena cukup berpotensi dan dapat dikembangkan sebagai daerah pertambakan dan pembenuran.
- i. Sumberdaya non-hayati seperti suhu air, arus dan pasang surut dapat dikembangkan namun membutuhkan teknologi yang rumit.

### Saran

- a. Perlu dikembangkan usaha penangkapan ikan tuna long line terutama di Laut Banda dan Laut Maluku.



- b. Promosi Wisata Marina di Propinsi Maluku perlu ditingkatkan.
- c. Untuk meningkatkan produksi dan menjaga kelestarian sumberdaya hayati laut perlu diadakan budidayanya, terutama bagi biota yang ekonomis penting.
- d. Penelitian-penelitian yang berhubungan dengan masalah pencemaran dan budidaya perlu digalakkan.
- e. Untuk keakuratan pendugaan potensi sumberdaya laut perlu didukung oleh adanya hasil pemotretan dari satelit yang melintasi perairan Maluku.

# **Pertumbuhan dan Pemerataan Dalam Kaitannya Dengan Ketahanan Nasional**

Syachrinuddin SEMAN

## **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan serta pemerataan merupakan dua hal yang cukup penting dalam kerangka membentuk suatu Ketahanan Nasional (National Resilience) di Indonesia. Tanpa ada pertumbuhan sebagai suatu proses pembangunan dan pemerataan pendapatan sebagai upaya mensejahterakan penduduk secara adil maka ketahanan nasional hanyalah suatu hal yang ideal.

Dalam hubungan inilah dalam membentuk suatu ketahanan nasional di butuhkan adanya kondisi dinamis yang merupakan hasil integritas pertumbuhan ekonomi serta pemerataan oleh pemerintah baik dalam perekonomian, sosial, politik maupun budaya.

Bentuk dari ketahanan nasional berupa pencerminan dari kualitas manusia Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia secara merata. Indikator langsung untuk ukuran ketahanan nasional terdapat pada angka kematian bayi, harapan hidup, pendapatan per kapita, tingkat baca huruf, tingkat konsumsi protein, tingkat konsumsi karbohidrat, jumlah dokter per 1.000 jumlah penduduk usia anak sekolah dan lain-lain.

Jadi pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari ketahanan nasional adalah gambaran dari aktivitas penduduk dalam setahun dari berbagai sektor/lapangan pekerjaan biasanya dalam bentuk Produk Domestik Bruto (PDB) dan dicatat secara kontinu. Dari Produk Domestik Bruto ini dapat dihitung pendapatan per kapita sebagai hasil bagi antara Produk Domestik Bruto dengan jumlah penduduk.



Di lain pihak pemerataan adalah upaya dari pemerintah dalam proses pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh sehingga tercipta pembagian pendapatan yang merata dan sekaligus terkait usaha perluasan kesempatan kerja, pemilikan dan penggunaan tanah, perumahan, perluasan fasilitas dan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan dan gizi, hukum dan ketertiban masyarakat, lingkungan hidup dan lain-lain.

Sampai seberapa besar pertumbuhan dan pemerataan yang sudah terlaksana sampai saat ini, terutama di daerah-daerah perlu ditelaah. Tanpa mengetahui peluang-peluang kekurangan dalam pertumbuhan maupun pemerataan, sulit untuk dikatakan bahwa ketahanan nasional yang ada sekarang di anggap baik.

Tulisan ini mencoba mengamati pertumbuhan dan pemerataan secara umum antar daerah propinsi di Indonesia. Dengan demikian dapat diketahui daerah-daerah mana yang sangat perlu diperhatikan maupun yang cukup diperhatikan. Di samping itu dengan adanya pertumbuhan yang merata dan pemerataan pendapatan yang hampir seimbang antar daerah, maka dapat dikatakan bahwa ketahanan nasional di setiap propinsi akan menjadi efektif dan efisien.

## PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN

Pertumbuhan dan pemerataan di sekitar tahun 1970-an pernah menjadi kondisi yang dipertentangkan. Bahkan di Indonesia pernah diterima faham bahwa upaya pembangunan yang terlalu ditujukan pada pertumbuhan (growth) akan menimbulkan kemerosotan dalam pemerataan. Akibatnya di saat proses pembangunan ekonomi berjalan masalah keadilan menjadi terlantar dan menimbulkan gejolak politik dan sosial. Ternyata pertentangan ini hanyalah terjadi pada situasi dan kondisi tertentu.

Leipzeiger dan Lewis (1980) dalam studinya mengatakan bahwa kebijaksanaan pemerataan (redistributive policies) merupakan bagian yang ampuh guna mencapai kesejahteraan sosial ekonomi pada negara yang termasuk dalam kondisi "middle income group" (PDB per kapita US\$550 lebih), sedangkan negara yang termasuk "low income group" kesejahteraan dapat diperbaiki lewat pertumbuhan (growth) bukan pemerataan (redistribution).

Malahan hasil studi Chenery (1980) menganjurkan agar bagi negara-negara yang mempersiapkan diri untuk membentuk struktur ekonomi yang mampu mendukung upaya pemerataan di awal gerakan menuju posisi "middle income" tampak berhasil mencapai status yang menggembirakan di mana pertumbuhan dan pemerataan berjalan bersama. Ditambahkannya akibat

kebijaksanaan pemerataan tersebut terciptanya pertumbuhan yang cepat sehingga membantu masuknya negara-negara berkembang pada tahapan lepas landas.

Oleh sebab itu Hick (1979) memperingatkan kepada negara-negara yang terlalu rajin mengejar pertumbuhan selanjutnya mengabaikan proses ke arah pemerataan di saat memasuki tahapan pada "middle income" ternyata mengalami kesulitan di dalam meningkatkan pembangunan ekonominya.

### **Pertumbuhan Perekonomian**

Berdasarkan rata-rata nasional pertumbuhan perekonomian Indonesia cukup menggembirakan di mana sejak tahun 1976-1980 rata-rata di atas 6%. Setelah tahun 1982 dengan kejayaan minyak berakhir dan timbulnya resesi pertumbuhan mengalami penurunan yang diperkirakan sekitar 4-5% per tahun.

Jika dilihat pertumbuhan ekonomi per daerah sejak tahun 1976-1980 tampak perbedaan yang cukup berarti. Pada beberapa daerah yakni Aceh, Bengkulu, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara, rata-rata di atas 14%. Hanya daerah D.I. Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat yang rendah, masing-masing pertumbuhan ekonominya sekitar 6,13% dan 7,13% (lihat Lampiran 1).

Indikator yang terpenting untuk melihat pertumbuhan adalah PDB per kapita. PDB per kapita antar daerah menunjukkan perbedaan yang cukup tinggi. Di tahun 1970 disparitas PDB per kapita antara daerah Nusa Tenggara Barat dan daerah Kalimantan Timur adalah sembilan kali lipat (Hendra Esmara, 1973).

Dalam masa 10 tahun yakni sampai tahun 1980 perbedaan PDB per kapita ini tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Pada tahun 1980 PDB per kapita yang terendah tetap daerah Nusa Tenggara Barat yakni Rp 108.000,00 per kapita setahun. Sedangkan daerah Kalimantan Timur merupakan daerah yang tertinggi PDB per kapita yakni sebesar Rp 846.000,00. Disparitas PDB per kapita hanya menjadi, kurang lebih delapan setengah kali lipat.

Akibat disparitas ini jelas membawa kepincangan dalam persiapan lepas landas mendatang. Untuk itu dibutuhkan perhatian yang serius terutama pada daerah-daerah yang PDB per kapitanya di bawah US\$300 per tahun. seperti daerah Nusa Tenggara Barat, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan beberapa daerah lainnya.



Untuk daerah ini dibutuhkan investasi pembangunan yang dapat meningkatkan pertumbuhan dengan cepat di samping pelaksanaan transmigrasi untuk daerah-daerah yang daya dukung lahannya (carrying capacity) sudah sangat terbatas.

## Pemerataan

Pemerataan adalah salah satu dari upaya pembangunan yang oleh Todaro (1977) dikatakan bahwa pembangunan merupakan pencapaian jaminan akan masa depan yang baik (life sustenance), jaminan akan kebebasan (freedom) dan peningkatan harga diri (self esteem).

Dalam usaha mencapai hal tersebut maka berbagai teori dikembangkan terutama untuk pemerataan sebagai cara yang terpenting dalam pembangunan antara lain:

- a. Sistem "employment generation" yang mengutamakan pembukaan lapangan kerja baru terutama pada sektor informal baik bagi penduduk pedesaan maupun bagi penduduk kota. Oleh ILO ditekankan pada bantuan modal untuk golongan ekonomi lemah yang tak mempunyai modal namun cukup berpotensi.
- b. Chenery (1980) lewat Bank Dunia menyarankan agar pemberian modal pada golongan ekonomi lemah dengan cara mengubah kebijaksanaan pada penanaman modal dalam proyek besar yang tersentralisasi pada investasi secara langsung atau tidak langsung untuk masyarakat melalui peningkatan kredit kecil, modal kerja, peningkatan pendidikan dan ketrampilan maupun kesehatan sebagai prakondisi lepas landas pembangunan.
- c. Anjuran dari James Grant, Mahbul ul Haq maupun Hick (Overseas Development Council dan Bank Dunia) yang bertujuan bahwa dalam pertumbuhan dibutuhkan adanya suatu pendekatan pada pendidikan yang sesuai dengan keinginan pembangunan, pelayanan sosial termasuk pelayanan kesehatan, fasilitas dasar seperti pangan, air bersih/sehat, papan, sandang serta partisipasi dalam pengambilan keputusan jika menyangkut dirinya atau warga mereka (basic needs).
- d. Bagi negara agraris seperti Indonesia maka John Mellor melihat unsur pemerataan adalah dari sudut pemilikan tanah. Dengan usaha ini produksi pertanian dapat ditingkatkan sehingga terjadi peningkatan pendapatan. Di samping itu perlu dikembangkan ketrampilan bagi petani, dibutuhkan perbaikan teknologi produksi, Balai Informasi Pertanian dan lain-lain. Peningkatan ini jelas dikaitkan dengan peternakan, perikanan maupun perke-

- bunan. Selanjutnya secara integratif dikembangkan pula industri agribisnis yang padat karya sebagai infrastruktur di masa datang.
- e. Mengembangkan sumber-sumber manusia yang merupakan subjek manusiawi baik kemampuan fisik maupun non-fisik. Pemecahannya adalah redistribusi asset/kekayaan produksi seperti yang dilakukan oleh negara Jepang, Singapura, Taiwan dan Korea. Selanjutnya diarahkan pada industrialisasi, demikian konsep Irma Adelman dari hasil penelitiannya pada keempat negara di atas. Sebab dengan industri pengerahan tenaga kerja relatif banyak (industri tekstil) sekaligus pendapatan menjadi lebih besar akibatnya pemerataan cepat terlaksana.
  - f. Albert Waterson dari ILO menyarankan perlunya integrasi pembangunan di daerah pedesaan. Dikatakannya bahwa proses pembangunan dari atas kebanyakan tidak berhasil dalam rangka meningkatkan pendapatan dan partisipasi masyarakat kelompok miskin. Ditambahkannya bahwa fokus pada bidang pertanian mengakibatkan kesenjangan antara petani miskin menjadi petani gurem/buruh tani. Sedangkan petani yang banyak mempunyai tanah akan bertambah kaya. Karenanya ia berpendapat bahwa revolusi penghijauan justru mengakibatkan perluasan kesenjangan di sektor tenaga kerja dan pendapatan petani. Untuk itu dibutuhkan bantuan sosial bagi masyarakat pedesaan yang mana menyangkut masalah "kesejahteraan mental" yakni redistribusi tanah (landreform) dan padat karya pada saat selepas panen dalam hubungannya peningkatan infrastruktur pedesaan seperti pembangunan jalan, perbaikan irigasi, industri rumah tangga dengan bahan setempat, sehingga dengan cara tersebut dapat dibina mental masyarakat dalam pengembangan wilayah sendiri secara bertanggung jawab. Pada akhirnya dapat diatasi kesenjangan antara kota dan desa.
  - g. Membangun tata internasional ekonomi baru dalam kerangka memecahkan kemiskinan di Dunia Ketiga. Tatanan tersebut belum mencapai jalan keluar yang tegas, malah proteksi demi proteksi di tiap negara bertambah. Walaupun sudah adanya kerjasama wiraswasta-wiraswasta negara maju dan negara berkembang namun kondisi tersebut belum berarti apa-apa.

Ketujuh model di atas merupakan hasil pengamatan Weaver, namun dari keseluruhan teori yang diambil dari sana-sini masih belum menyentuh secara mendasar kepada permasalahan yang sebenarnya. Oleh Weaver (1978) dikatakannya teori tersebut masih makro dan perlu dijabarkan dalam bentuk pelaksanaan yang sungguh.

Di Indonesia masalah pemerataan sudah dilaksanakan sejak Pelita III dan penonjolan masalah pemerataan merupakan perkembangan dari harapan rakyat untuk tahapan pembangunan selanjutnya.



Penjabaran pemerataan dalam bentuk delapan jalur pemerataan yang berlandaskan pada trilogi pembangunan di mana pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Dalam asas pemerataan pembangunan sesuai dengan pola Garis-garis Besar Haluan Negara maka langkah dan kegiatan pemerataan mencakup: Pertama, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan perumahan. Kedua, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ketiga, pemerataan pembangunan pendapatan. Keempat, pemerataan kesempatan kerja. Kelima, pemerataan kesempatan berusaha. Keenam, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. Ketujuh, pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air; dan Kedelapan, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Namun sampai sejauh masa asas pemerataan telah berjalan maka beberapa bagian dari hasil pembangunan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1. Hal tersebut ditunjukkan dari perbandingan antar daerah propinsi di Indonesia. Sedangkan kaitannya dengan ketahanan nasional dapat dilihat dari uraian pada bab berikut ini.

## KETAHANAN NASIONAL, PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN

### Ketahanan Nasional

Dalam GBHN (1983) ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Dengan demikian ketahanan nasional tidak sama dengan kekuatan militer tetapi berhubungan erat dengan kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara.

Dari lima aspek ketahanan nasional yakni ideologi nasional, stabilitas politik, pembangunan ekonomi yang adil dan merata, sosial budaya serta pertahanan keamanan, maka Trilogi Pembangunan merupakan tumpuan yang harus dilaksanakan.

Jelasnya ketahanan nasional adalah tingkat keuletan dan ketangguhan bangsa dalam menghimpun dan mengerahkan keseluruhan kemampuan, mengembangkan kekuatan nasional yang ada sehingga merupakan kekuatan

yang mampu dan sanggup menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dalam kelangsungan cita-citanya.

Dalam ketahanan nasional terkait bidang ekonomi yakni pertumbuhan yang adil dan merata.

Ketahanan bidang ekonomi ini merupakan mata rantai yang paling lemah dalam rangkaian ketahanan nasional di Indonesia (Lemhanas, 1982). Akibat dari bidang ekonomi yang lemah akan tercermin pada kualitas manusianya.

Salah satu dari cara pengukuran kualitas manusia adalah dilihat dari peningkatan indeks kualitas hidup. Oleh Grant (1978) angka kualitas hidup yang cukup baik apabila:

1. Angka kematian bayi di bawah umur 1 tahun adalah 50/1.000 kelahiran;
2. Angka harapan hidup (life expectancy) 70 tahun;
3. Kemampuan baca dan tulis bagi penduduk 10 tahun ke atas adalah 75%;
4. Angka Fertilitas Total 25 per 1.000 penduduk.

Dari 4 indikator di atas akan dibahas 3 indikator mencakup angka kematian bayi, harapan hidup, dan kemampuan baca/tulis.

Angka kematian bayi bila dilihat per daerah (lihat Lampiran 1), ternyata sangat berbeda dari daerah satu dengan daerah lain. Apabila disusun angka kematian bayi dari yang tertinggi sampai yang terendah maka daerah Nusa Tenggara Barat merupakan daerah yang tertinggi angka kematian bayinya (187) dan DI Yogyakarta yang terendah (62).

Jika data angka kematian bayi dibagi atas tiga kelompok, yakni tinggi (lebih besar dari 120), sedang (90-120) dan rendah (lebih kecil dari 90), maka ada 7 daerah yang termasuk kategori tinggi, yakni Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan dan Sumatera Barat. Untuk kategori sedang ada 15 daerah propinsi dan sisanya termasuk kategori rendah, yakni Sumatera Utara, DKI Jakarta, Bali dan DI Yogyakarta. Untuk harapan hidup karena mengikuti pola angka kematian bayi maka bertambah rendahnya kematian bayi akan mengakibatkan tingginya harapan hidup, demikian juga sebaliknya.

Untuk tingkat baca tulis secara nasional persentase cukup dinilai tinggi, karena sampai tahun 1980 sudah mencapai kurang lebih 70%. Hanya pada propinsi tertentu tingkat baca tulis yang dibawah 70% yakni Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat dan beberapa propinsi lainnya.



Dengan tingkat indikator kualitas hidup per daerah bila dikaitkan dengan rata-rata pertumbuhan PDB per kapita dapat dijabarkan pada Skema di bawah ini.

Skema 1

RATA-RATA TINGKAT PERTUMBUHAN PDB PER KAPITA TAHUN 1976-1980 DAN HUBUNGANNYA PDB PER KAPITA DAERAH PROPINSI SE-INDONESIA TAHUN 1980.

		Tinggi	Rendah
Tingkat PDB Per Kapita Tahun 1980	T I N G G I	<i>Daerah Maju</i>	<i>Daerah Berpotensi Rendah</i>
		- Kalimantan	Jawa Timur
		- DKI Jakarta	
		- Aceh	
		- Sumatera Utara	
	R E N D A H	- Kalimantan Tengah	
		- Sumatera Selatan > \$300	
		<i>Daerah Berkembang</i>	<i>Daerah Kurang Berkembang</i>
		- Bengkulu	- Nusa Tenggara Barat
		- Bali	- Jawa Barat
		- Kalimantan Barat	- DI Yogyakarta
		- Kalimantan Selatan	- Jawa Tengah
		- Sulawesi Utara	- Sulawesi Tengah
			- Maluku

Sumber: Diolah dari Lampiran 1.

Dengan Skema 1, maka daerah maju (prosperous area) seperti Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Utara dan lainnya, pertumbuhan perlu dipertahankan pada posisi yang tinggi agar tidak merosot ke kanan menjadi daerah yang berpotensi rendah. Sedangkan untuk Jawa Timur perlu upaya terpadu dalam pertumbuhan ekonomi agar dapat bergerak ke arah posisi yang tinggi dengan meningkatkan rata-rata tingkat pertumbuhan.

Bagi daerah yang berkembang seperti Propinsi Bengkulu, Bali, Kalimantan Barat dan lainnya, mengusahakan tingkat pertumbuhan yang tinggi sehingga dalam jangka waktu tidak terlalu lama dapat pindah pada posisi daerah maju.

Untuk daerah-daerah yang kurang berkembang yang mencakup daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah dan Maluku perlu diupayakan pembangunan yang tinggi. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan investasi pembangunan yang lebih besar atau usaha mengurangi tekanan penduduk terutama untuk daerah Jawa

Barat, D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah. Khusus untuk daerah yang kurang berkembang terutama daerah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tengah harus diprioritaskan mengingat kualitas hidup penduduk sangat rendah tercermin dari PDB per kapita yang rendah (kurang dari Rp 175.000,00 setahun), angka kematian bayi yang tinggi dan harapan hidup yang rendah.

Diharapkan dengan perhatian yang sungguh-sungguh terutama para perencana daerah maupun Bappenas, keenam daerah yang dinilai kurang berkembang dapat meningkatkan pertumbuhan maupun pendapatan per kapita sehingga dapat menuju daerah yang berkembang.

Guna mengukur sampai seberapa jauh pemerataan dilaksanakan di tiap propinsi dapat dilihat pada hasil perhitungan Gini Indeks untuk tahun 1979 oleh Syahrudin (Lampiran 1 kolom 3).

Pada tabel tersebut tercatat bahwa Gini Indeks di atas angka 0,3 ada 10 daerah propinsi yang mencakup Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, dan D.I. Yogyakarta. Daerah ini menunjukkan ketimpangan dalam tingkat pendapatan. Keadaan ini perlu dibenahi dengan upaya pemenuhan "basic needs" bagi masyarakat bawah dan pelaksanaannya perlu diamati dengan cermat sesuai dengan petunjuk delapan jalur pemerataan.

Dalam pelaksanaan pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pada daerah yang kurang berkembang dan daerah yang kepincangan tinggi, merupakan hal yang penting untuk mempersiapkan penduduk yang mampu berpartisipasi aktif dalam ketahanan nasional. Sebab ketahanan nasional yang mapan akan memacu kembali pertumbuhan maupun pemerataan dalam bidang ekonomi.

Dari sudut lain, penduduk yang sehat, harapan hidup yang tinggi, pendapatan yang tinggi dan pendidikan yang tinggi akan berarti kualitas penduduk menjadi tinggi, dan ini merupakan modal yang besar dalam pertahanan.

Di samping itu kualitas penduduk yang tinggi merupakan landasan yang kuat dalam perekonomian di masa damai sekaligus sebagai basis mobilitas rakyat dalam pertahanan semesta di masa perang.

Dalam melaksanakan kebijaksanaan pertumbuhan pada daerah/propinsi yang kurang berkembang, maka keinginan untuk menekan serendah mungkin angka kematian bayi, menaikkan harapan hidup serta meningkatkan pendapatan, perlu dilaksanakan sungguh-sungguh baik oleh pemerintah daerah maupun bimbingan dan pengawasan dari pusat.



Untuk pemerataan, seyogyanya dilaksanakan pada daerah-daerah yang angka Gini Indeksnya masih tinggi.

## KESIMPULAN

Sesungguhnya pertumbuhan dan pemerataan merupakan hal yang cukup penting dalam kaitannya dengan ketahanan nasional sebagai pencerminan kualitas manusia Indonesia.

Pertumbuhan dan pemerataan merupakan hal yang saling menunjang bila didasarkan pada kebijaksanaan pemerataan di saat kondisi negara mencapai posisi "middle income" (yang oleh Bank Dunia dinyatakan dengan pendapatan per kapita sebesar US\$550 atau lebih kurang Rp550.000,00 per kapita per tahun).

Tampaknya disparitas pendapatan antar daerah yakni daerah Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Timur tidak terlalu jauh berbeda selama 10 tahun terakhir sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1980 yakni tetap berkisar dari 9 menjadi 8,5 kali lipat. Kondisi ini tetap tidak berubah di mana Nusa Tenggara Barat tetap merupakan daerah yang paling rendah PDB per kapitanya dan Kalimantan Timur merupakan daerah yang PDB per kapitanya tertinggi.

Dalam pemerataan, maka pengataman Weaver dari berbagai teori pencegahan kepincangan pendapatan belum menyentuh secara menyeluruh kepada permasalahan maka delapan jalur pemerataan merupakan cakupan pelaksanaan yang terbaik dalam upaya menyejahterakan rakyat.

Ketahanan nasional merupakan hakikat dari kemampuan dan ketangguhan bangsa sebagai kondisi yang dinamis dan integratif atas aspek kehidupan bangsa dan negara. Untuk itu dibutuhkan kualitas manusia Indonesia yang tinggi, baik harapan hidupnya, pendapatan per kapita dan tingkat kematian yang rendah. Namun dari berbagai daerah maka daerah Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Jawa Timur dan D.I. Yogyakarta merupakan daerah yang kurang berkembang baik karena pendapatan yang rendah maupun daya dukung lahan yang melebihi kapasitas.

Dari sudut pemerataan ada 10 daerah yang masih pincang, karenanya dibutuhkan pembenahan yang terpadu terutama dalam hal "kebutuhan dasar" bagi penduduk yang berpendapatan rendah. Sehingga dengan meningkatnya pertumbuhan sekaligus pemerataan diharapkan ketahanan nasional akan bertambah mapan dan merupakan dasar yang akan memproses kembali pertumbuhan dan pemerataan yang cepat.

PERBANDINGAN ANGKA KEMATIAN BAYI, PRODUK DOMESTIK BRUTO PER KAPITA,  
GINI RATIO, HARAPAN HIDUP, KEPADATAN, PROSENTASE PENDUDUK 10 + YANG DAPAT BACA/  
TULIS DAN RATA-RATA PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR DAERAH PROPINSI DI INDONESIA 1980

888

ANALISA 1985 - 10

No.	Propinsi	Angka Kematian Bayi (1980)	Produk Domestik Bruto Per Kapita (ribuan) (1980)	Gini Ratio (1979)	Harapan Hidup		Kepadatan Penduduk Per Km <sup>2</sup> (1980)	Persentase Penduduk 10 + Dapat Membaca dan Menulis	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi 1976-1980
					Laki-laki	Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
>120 (tinggi)									
1.	Nusa Tenggara Barat	187	108	0,298	38,00	40,70	135	53,79	7,13
2.	Jawa Barat	129	208	0,280	46,90	49,70	593	72,75	8,48
3.	Sulawesi Tengah	128	168	0,341	47,10	50,00	18	81,29	9,97
4.	Maluku	124	209	0,375	47,80	50,70	19	82,12	8,89
5.	Nusa Tenggara Timur	124	111	0,361	47,80	50,70	57	64,19	11,69
6.	Kalimantan Selatan	121	218	0,261	48,30	51,30	55	74,01	14,00
7.	Sumatera Barat	121	180	0,243	48,30	51,30	68	81,06	8,98
90 - 120 (sedang)									
8.	Sumatera Selatan	118	333	0,284	52,80	56,00	45	80,13	11,04
9.	Jambi	118	-	0,272	48,80	51,70	32	74,41	7,52
10.	Kalimantan Barat	116	214	0,299	49,20	52,20	17	55,73	9,38
11.	Sulawesi Tenggara	114	169	0,302	49,75	52,20	34	67,10	10,38
12.	Riau	113	232	0,338	49,90	53,00	23	75,93	7,11
13.	Sulawesi Selatan	108	195	0,340	50,90	54,00	83	59,91	10,00
14.	Irian Jaya	106	209	-	50,90	54,00	19	82,12	11,68
15.	Bengkulu	106	169	0,299	51,10	54,20	36	73,18	21,39
16.	Kalimantan Tengah	100	313	0,257	50,00	55,50	6	77,27	14,09
17.	Jawa Timur	99	187	0,308	52,30	55,50	609	61,50	8,12
18.	Kalimantan Timur	99	846	0,203	52,30	55,50	6	74,01	14,79
19.	Lampung	97	188	0,299	52,80	56,00	139	76,28	7,87
20.	Sulawesi Utara	94	257	0,372	53,20	56,00	111	90,48	14,07
21.	Jawa Tengah	96	150	0,290	52,80	56,00	742	65,27	8,19
22.	D.I. Aceh	91	691	0,263	54,20	57,50	47	72,51	31,42
<90 (rendah)									
23.	Sumatera Utara	89	309	0,257	54,40	57,70	118	83,69	9,37
24.	Bali	88	198	0,298	54,40	57,70	444	61,27	12,78
25.	DKI Jakarta	80	580	0,370	56,00	59,50	11.023	87,55	9,99
26.	DI Yogyakarta	62	141	0,338	58,90	63,50	868	68,46	6,13



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Biro Pusat Statistik, *Proyeksi Penduduk Indonesia 1980-2000*, Jakarta, 1983.
- Biro Pusat Statistik, *Penduduk Indonesia*, Hasil Sensus Penduduk 1980 Seri S.2., Jakarta, 1983.
- Biro Pusat Statistik, *Pendapatan Regional Propinsi-propinsi di Indonesia 1976-1980*, Jakarta, 1983.
- Chenery, Hollis B., "Poverty and Progress Choices for Developing World," dalam *Finance and Development*, June, 1980, hal. 12-16.
- Esmara Hendra, "Regional Income Disparities," dalam *Bulletin of Indonesia Economic Studies*, 9 (1), ANU, Canberra, 1973.
- Grant, James A., "Disparity Reduction Rate in Social Indicators, A Proposal for Measuring and Targeting Progress in Basic Needs," dalam *Overseas Development Review*, No. 1, 1978.
- Hick, Norman L., "Growth Vs. Basic Needs: Is There A Trade Off?," dalam *World Development*, Vol. 7 (November/December 1979) hal. 985-994.
- Isard, Walter, *Methods of Regional Analysis*, The MIT Press, 1969.
- "Diskusi Panel Ahli Kompas," *Kompas*, 9 dan 10 Desember 1983.
- Leipziger, Danny M., dan Lewis M.A., "Social Indicators, Growth and Distributions," dalam *World Development*, Vol. 8, 1980, Pergamon Press, London, Great Britain, hal. 299-302.
- Lemhannas dan Dirjen Perti, *Kewiraan untuk Mahasiswa*, PT Gramedia Jakarta, 1982.
- Oshima, Harry T., "Perspective in Income Distribution Research," paper dalam *Seminar On Income Distribution, Employment and Economic Development on South East Asia*, Council for Asian Manpower Studies, Japan Economics Research Centre, Tokyo, Vol. I, 1975.
- Poli, Sam F., "Employment and Income Distribution in Eleven Cities in Indonesia," tidak diterbitkan, M.A. Thesis, University of the Philippines, 1977.
- Kuznets, Simon, "Economic Growth and Income Inequality" dalam *American Economic Review*, Vol. 45, March 1955, hal. 1-28.
- Syahrudin dan Syafruddin Karimi, *Pemerataan Tanah di Indonesia, Sebuah Pembahasan Antar Daerah*, dalam Proyek Studi Sektoral Departemen P & K, Ditjen Perti, Juni 1980.
- Todaro, Michael P., *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*; terjemahan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Weaver, James H., "Growth and Equity: Can They Be Happy Together?" dalam *International Development Review*, No. 1, 1978, hal. 20-23.





# BUKU-BUKU TERBITAN CSIS

Untuk menunjang kegiatan studi mahasiswa, para peneliti,  
lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintah dan umum.

## SEKAR SEMERBAK:

### Kenangan untuk Ali MOERTOPO

ix + 341 hal., @ Rp 5.000,00



Buku ini merupakan peringatan satu tahun wafatnya Ali Moertopo. Isinya meliputi berbagai hal yang diperkirakan menjadi minat almarhum semasa hidupnya, yang ditulis oleh Toeti Adhitama, F.R. Dalrymple, Derek Davies, Sukamdani S. Gitosardjono, Michael Leifer, Alejandro Melchor Jr., Goenawan Mohamad, David Newsom, A.R. Ramly, Robert A. Scalapino, Sabam Siagian, A.R. Soehoed, Soemitro, Soerjadi, Juwono Sudarsono, G. Sugiharto, H.N. Sumual, Sayidiman Suryohadiprojo, Abdurachman Suryomihardjo, George K. Tanham, Abdul Gafur, Harry Tjan Silalahi.

## SEJARAH PEMIKIRAN TENTANG PANCASILA

A.M.W. PRANARKA, xi + 509 hal., @ Rp 7.500,00



Disertasi ini diterbitkan karena mempunyai relevansi di bidang epistemologi dan ideologi. Perkembangan pemikiran mengenai Pancasila dewasa ini akhirnya memerlukan adanya penataan epistemologis, sehingga perkembangan pemikiran mengenai Pancasila melalui berbagai jalur dan berbagai pendekatan itu akan terjadi dalam suasana "rukun-patut-laras" tanpa terjerumus ke dalam subjektivisme, dogmatisme atau eklektisisme. Buku ini juga memberikan dokumentasi yang lengkap mengenai pemikiran dan pengkajian tentang Pancasila dan akan sangat berguna bagi usaha-usaha pendalaman selanjutnya.

## Masih Tersedia:

1. PANDANGAN PRESIDEN SOEHARTO TENTANG PANCASILA, Cat. ka-7, 1984 xviii + 95 hal., edisi HVS @ Rp 1.200,00, edisi biasa @ Rp 600,00
2. PANCASILA ARTI DAN PELAKSANAANNYA, Kirdi DIPOYUDO, Cat. ke-2, x + 124 hal., @ Rp 1.750,00
3. STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL, Ali MOERTOPO, Cat. ke-2, 1982, xxii + 296 hal., @ Rp 4.000,00
4. STRATEGI DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL: INDONESIA DI KAWASAN ASIA-PASIFIK, Penyunting: Hadi SOESASTRO dan A.R. SUTOPO, 1981, xxiv + 640 hal., @ Rp 7.000,00
5. PERUSAHAAN MULTINASIONAL DALAM BISNIS INTERNASIONAL, J. PANGLAYKIM, 1983, xii + 348 hal., @ Rp 3.500,00
5. GOLKAR: FUNCTIONAL GROUP POLITICS IN INDONESIA, Julian M. BOILEAU, 1983, viii + 140 hal., @ Rp 2.250,00

7. AFRIKA DALAM PERGOLAKAN-2, Kirdi DIPOYUDO, 1983, xiv + 208 hal., @ Rp 2.750,00
8. ENERGI DAN PEMERATAAN, Hadi SOESASTRO at al., 1983, viii + 289 hal., @ Rp 3.500,00
9. PACIFIC ECONOMIC COOPERATION: THE NEXT PHASE, editor: Hadi SOESASTRO dan HAN Sung-joo, 1983, xiv + 302 hal., @ Rp 3.750,00
10. PEACE AND SECURITY IN THE ATLANTIC AND PACIFIC REGIONS, 1983, x + 293 hal., @ Rp 3.750,00
11. ISSUES FOR PACIFIC ECONOMIC COOPERATION, 1983, vi + 142 hal., @ Rp 4.250,00
12. REGIONAL DIMENSIONS OF INDONESIA-AUSTRALIA RELATIONS, 1983, viii + 124 hal., @ Rp 2.000,00
13. INTERNAL DEVELOPMENTS IN JAPAN AND INDONESIA, 1985, x + 90 hal., @ Rp 1.500,00

## TERBITAN BERKALA:

### ANALISA:

Terbit setiap bulan, menyajikan beberapa analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, @ Rp 750,00. Langganan setahun (12 nomor) Rp 9.000,00 sudah termasuk ongkos kirim, untuk mahasiswa Rp 6.750,00/tahun. Masih tersedia nomor-nomor lepas dari yang sudah terbit.

- 1/1984: MELAKSANAKAN PANCASILA
- 2/1984: KERJASAMA EKONOMI PASIFIK
- 3/1984: PERSPEKTIF PELITA IV
- 4/1984: MASALAH KAMPUCHEA DAN HUBUNGAN INDONESIA-VIETNAM
- 5/1984: PENDIDIKAN DAN BEBERAPA TANTANGANNYA
- 6/1984: JEPANG DALAM MASA TRANSISI
- 7/1984: DAMPAK HUBUNGAN TIMUR-BARAT DI BEBERAPA KAWASAN
- 8/1984: MEMBANGUN DEMOKRASI
- 9/1984: PEMBAURAN DAN TANTANGANNYA
- 10/1984: MEMBANGUN PEDESAAN

- 11/1984: NASIONALISME DAN PEMBENTUKAN BANGSA
- 12/1984: INDONESIA MEMPERLUAS CAKRAWALA

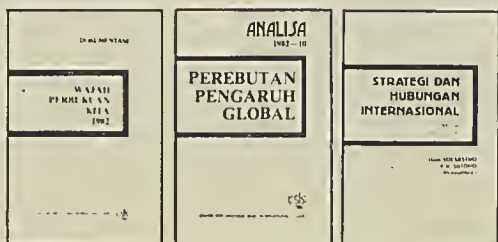
- 1/1985: MASALAH EKONOMI YANG RUMIT DAN PEMECAHANNYA
- 2/1985: PERKEMBANGAN DEMOKRASI DAN POLITIK INDONESIA
- 3/1985: MENGGALAKKAN KEGIATAN EKONOMI
- 4/1985: ASIA-AFRIKA DAN PERKEMBANGAN KAWASAN
- 5/1985: PENDIDIKAN DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
- 6/1985: MENGGALAKKAN EKSPOR DAN MUNCULNYA KELAS MENENGAH
- 7/1985: MASALAH PEMBANGUNAN DAN KEPENDUDUKAN
- 8/1985: EMPAT PULUH TAHUN INDONESIA MERDEKA: POLITIK LUAR NEGERI
- 9/1985: EMPAT PULUH TAHUN INDONESIA MERDEKA: IDEOLOGI, POLITIK DAN EKONOMI

### SERI DOKUMENTASI:

Kumpulan clipping berbagai surat kabar dan bulletin, dengan berbagai subjek dan masalah baik dalam negeri maupun internasional. Nomor-nomor terbaru antara lain:

1. PRA-INTEGRASI TIMOR TIMUR 1975 (67/P/XI/1983), xv + 225 hal., Rp 9.000,00
2. INTEGRASI TIMOR TIMUR 1975 (II), (68/P/XI/1983), xi + 156 hal., Rp 6.500,00
3. INTEGRASI TIMOR TIMUR 1978 (III), (69/P/XI/1983), ix + 111 hal., Rp 5.000,00
4. MUNAS III GOLKAR 1983 (Bagian I), (70/P/III/1984), v + 105 hal., Rp 4.750,00
5. MUNAS III GOLKAR 1983 (Bagian II), (71/P/III/1984), xiv + 158 hal., Rp 6.500,00
8. DIPLOMASI TENTANG TIMOR TIMUR (72/P/III/1984), ix + 146 hal., Rp 6.750,00
7. PEMBANGUNAN TIMOR TIMUR 1977-1982 (73/P/III/1984), v + 115 hal., Rp 5.000,00
8. PAKET 1 JUNI 1983 (74/E/IV/1984), x + 199 hal., Rp 8.000,00
9. KOMINOK 1, JAKARTA 1984 (76/P/IV/1984), xlii + 178 hal., Rp 7.500,00
10. HUBUNGAN RI-UNI SOVIET 6 TAHUN TERAKHIR (1980-1984), (78/HI/VII/1984), xiv + 208 hal., Rp 8.500,00
11. GERAKAN WAJIB BELAJAR (77/PD/IX/1984), ix + 159 hal., Rp 6.500,00
12. ASAS TUNGGAL (78/P/II/1985), viii + 166 hal., Rp 7.000,00
13. MONOPOLI DAN OLIGOPOLI (79/E/III/1985), li + 58 hal., Rp 3.000,00
14. UNIVERSITAS TERBUKA (80/PD/III/1985), vii + 168 hal., Rp 5.750,00
15. ORDE BARU (81/P/IV/1985), viii + 203 hal., Rp 2.250,00
16. KONFLIK KAMBOJA (IV), (82/HI/V/1985), ix + 186 hal., Rp 8.000,00
17. KONFLIK KAMBOJA (VI), (83/HI/V/1985), xvii + 287 hal., Rp 11.000,00
18. PEMILU AMERIKA SERIKAT 1984 (84/HI/V/1985), xiii + 232 hal., Rp 9.000,00
19. INPRES NO. 4, 1985 (85/E/VI/1985), xv + 247 hal., Rp 10.000,00
20. PERINGATAN 30 TAHUN KAA (86/P/VII/1985), xiv + 290 hal., Rp 11.000,00
21. RI-RRC (87/E/VII/1985), xiii + 194 hal., Rp 8.250,00
22. PEMBAJAKAN UDARA (88/HI/VII/1985), xi + 149 hal., Rp 6.250,00
23. TIMOR TIMUR 1983 (89/P/VII/1985), xiii + 179 hal., Rp 7.500,00
24. PEMBAHASAN 5 RUU BIDANG POLITIK (Jilid ke-1), (90/P/VIII/1985), vi + 124 hal., Rp 5.250,00
25. PEMBAHASAN 6 RUU BIDANG POLITIK (Jilid ke-2), (91/P/VIII/1985), viii + 124 hal., Rp 6.250,00
26. PEMBAHASAN 6 RUU BIDANG POLITIK (Jilid ke-3), (92/P/VIII/1985), x + 214 hal., Rp 8.500,00





Untuk menunjang kegiatan studi mahasiswa, para peneliti maupun lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintah dan umum, CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) menyediakan penerbitan berupa buku-buku dan terbitan berkala:

### BUKU-BUKU

Berbagai buku baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, hasil penulisan staf CSIS mengenai strategi, ekonomi, ideologi, politik, hubungan internasional, pembangunan, hankam, sosial budaya dan lain-lain.

### ANALISA

Majalah bulanan, menyajikan beberapa analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh staf CSIS maupun dari luar CSIS. Harga per eks Rp 750,— langganan setahun (12 nomor) Rp 9.000,— sudah termasuk ongkos kirim, untuk Mahasiswa Rp 6.750,—

### THE INDONESIAN QUARTERLY

Majalah triwulanan berbahasa Inggris, memuat karangan-karangan hasil pemikiran, penelitian, analisa dan penilaian yang bersangkutan-paut dengan masalah-masalah aktual Indonesia di forum nasional maupun internasional. Harga per eks Rp 1.000,—, langganan setahun (4 nomor) Rp 4.000,—, untuk Mahasiswa Rp 3.200,—

### DOKUMENTASI

Kumpulan clipping berbagai surat kabar/bulletin secara sistematis mengenai masalah-masalah tertentu.

Penerbitan-penerbitan tersebut di atas dapat diperoleh di Toko-toko Buku, atau langsung pada:

BIRO PUBLIKASI — CSIS

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160, Telepon 356532 s/d 356535

Untuk menunjang kegiatan pengkajian, CSIS juga menyediakan PERPUSTAKAAN dan CLIPPINGS yang terbuka untuk pencinta pengetahuan, analis dan peneliti dengan koleksi yang eksklusif, penyediaan data yang lengkap dan informasi yang cepat. Untuk keperluan tersebut hubungilah:

PERPUSTAKAAN dan BIRO INFORMASI DAN DATA — CSIS

Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160, Telepon 356532 - 35